



**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH
RAPAT KERJA KOMISI IV DPR RI
DENGAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
(BIDANG PERTANIAN, LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN,
DAN KELAUTAN)**

| | |
|------------------|---|
| Tahun Sidang | : 2019-2020 |
| Masa Persidangan | : IV |
| Rapat Ke | : 4 |
| Jenis Rapat | : Rapat Kerja |
| Sifat Rapat | : Terbuka |
| Hari/Tanggal | : Rabu, 24 Juni 2020 |
| Waktu | : 10.40 s.d. 16.30 WIB |
| Tempat | : Kantor/Rumah masing-masing (rapat secara virtual) |
| Ketua Rapat | : Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI/F-PDIP) |
| Acara | : 1. Evaluasi Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2019; 2. Hasil Pemeriksaan BPK Semester II TA 2019; 3. RKA-K/L dan RKP-K/L Tahun 2021; dan 4. Isu-isu aktual |
| Sekretaris Rapat | : Drs. Budi Kuntaryo (Kabag Sekretariat Komisi IV DPR RI) |
| Hadir | : A. Anggota DPR RI: dari 47 orang 55 Anggota Komisi IV dengan rincian: 1. Fraksi PDI Perjuangan (F-PDIP) 10 dari 12 orang Anggota 1. Sudin, S.E. (Ketua Komisi IV DPR RI) 2. H. Sunarna, S.E., M.Hum. 3. Ir. Effendi Sianipar 4. Ono Surono, S.T. 5. Yohanis Fransiskus Lema, S.IP., M.Si. 6. Vita Ervina, S.E., M.B.A. 7. H. Yadi Srimulyadi 8. Dr. H. Sutrisno, S.E., M.Si. 9. Maria Lestari, S.Pd. 10. Riezky Aprilia, S.H., M.H. |

2. Fraksi Partai Golongan Karya (F-PG)

6 dari 8 orang Anggota

1. H. Dedi Mulyadi, S.H. (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI)
2. H. M. Salim Fakhry, S.E., M.M.
3. Budhy Setiawan
4. Firman Soebagyo, S.E., M.H.
5. A. A. Bagus Adhi Mahendra Putra, S.H., M.H.
6. Alien Mus, S.H.

3. Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (F-Gerindra)

7 dari 8 orang Anggota

1. G. Budisatrio Djiwandono (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI)
2. Ir. KRT. H. Dadori Wonodipuro, M.M.
3. Ir. Endro Hermono, M.B.A.
4. Renny Astuti, S.H., S.P.N.
5. Dr. Ir. Hj. Endang Setyawati Thohari, DESS., M.Sc.
6. Ir. H. T. A. Khalid, M.M.
7. Dr. H. Azikin Solthan, M.Si.

4. Fraksi Partai Nasional Demokrat (F-NasDem)

6 dari 6 orang Anggota

1. Drs. H. Hasan Aminuddin, M.Si. (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI).
2. H. Sulaeman L. Hamzah
3. Ir. Abdullah Tuasikal, M.Si.
4. H. Charles Meikyansah
5. Ahmad HI M. Ali, S.E.
6. Julie Sutrisno

5. Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (F-PKB)

5 dari 6 orang Anggota

1. Daniel Johan (Wakil Ketua Komisi IV DPR RI).
2. H. Muhtarom, S.Sos.
3. Drs. H. Ibnu Multazam
4. Luluk Nur Hamidah, M.Si., M.P.A.
5. Edward Tannur, S.H.

6. Fraksi Partai Demokrat (F-PD)

4 dari 5 orang Anggota

1. Dr. H. Suhardi Duka, M.M.
2. Muslim, S.HI., M.M.
3. Hj. Nur'Aeni, S.Sos., M.Si.
4. Bambang Purwanto, S.ST., M.H.

7. Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS)

4 dari 5 orang Anggota

1. drh. H. Slamet
2. Dr. Hermanto, S.E., M.M.
3. Dr. H. Andi Akmal Pasluddin, S.P., M.M.
4. H. Johan Rosihan, S.T.

8. Fraksi Partai Amanat Nasional (F-PAN)

3 dari 4 orang Anggota

1. Haerudin, S.Ag., M.H.
2. H. Muhammad Syafruddin, S.T., M.M.
3. Slamet Ariyadi, S.Psi.

9. Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (F-PPP)

2 dari 2 orang Anggota

1. K. H. Asep A. Maoshul Affandy, M.Pd.I.
2. Ema Umriyatul Chusnah.

A. Sekretariat Jenderal

B. Pemerintah:

1. Dr. Ir. Siti Nurbaya Bakar, M.Sc. (Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
2. Dr. Alue Dohong, S.E., M.Sc., Ph.D. (Wakil Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
3. Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M. (Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
4. Ir. Laksmi Wijayanti, MCP. (Plt. Inspektur Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
5. Ir. Wiratno, M.Sc. (Direktur Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
6. Ir. Hudoyo, M.M. (Plt. Direktur Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
7. Dr. Ir. Bambang Hendroyono, M.M. (Plt. Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan Produksi Lestari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
8. Prof. Dr. Ir. Sigit Hardwinarto, M.Agr. (Direktur Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);

9. Drs. M. R. Karliansyah, M.Sc. (Direktur Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan (PPKL));
10. Rosa Vivien Ratnawati, S.H., M.Sc. (Direktur Jenderal Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Bahan Beracun Berbahaya Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
11. Ir. Ruandha Agung Sugardiman, M.Sc. (Direktur Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan); 1
12. Dr. Ir. Bambang Supriyanto, M.Sc. (Direktur Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan); 1
13. Dr. Rasio Ridho Sani, M.Com., M.P.M. (Direktur Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan);
14. Helmi Basalamah, M.M. (Kepala Badan Penyuluh dan Pengembangan SDM (BP2SDM));
15. Dr. Ir. Agus Justianto, M.Sc. (Kepala Badan Penelitian, Pengembangan, dan Inovasi Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan); dan
16. Ir. Nazir Foead, M.Sc. (Kepala Badan Restorasi Gambut).

JALANNYA RAPAT:

KETUA RAPAT (SUDIN, S.E.):

Bismillahirrahmaanirrahiim.

Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang terhormat Pimpinan termasuk juga Pimpinan bayangan dan Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,

Yang terhormat Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan beserta jajarannya,

Yang terhormat Kepala Badan Restorasi Gambut beserta jajarannya,

Dan hadirin yang kami hormati.

Mengawali rapat hari ini pertama-tama marilah kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa karena berkat rahmat dan hidayah-Nya kita dapat mengadakan Rapat Kerja hari ini dalam keadaan sehat *waa'lfiat*.

Sesuai dengan jadwal acara rapat Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia Masa Persidangan IV tahun sidang 2019-2020 yang telah diputuskan dalam pengganti Bamus pada tanggal 30 April 2020 dan keputusan Rapat Internal Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia pada tanggal 17 Juni 2020 pada hari ini Rabu tanggal 24 Juni 2020 Komisi IV menyelenggarakan Rapat Kerja dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam rangka membahas evaluasi pelaksanaan APBN tahun 2019 Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksaan Keuangan tahun ke II 2019 dan Anggaran Rencana Kerja Pemerintah tahun 2021 serta isu-isu aktual lainnya.

Bapak/Ibu yang kami hormati.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 276 ayat 1 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang tata tertib Rapat Kerja hari ini kami buka dan dinyatakan terbuka untuk umum

(RAPAT DIBUKA PUKUL 10.40 WIB)

Rapat Kerja pada hari ini dimulai pada pukul 10.40 WIB dan akan diakhiri pada pukul 15.40 WIB, apabila belum selesai dapat dilanjutkan sesuai dengan Pasal 254 ayat 1 Tata Tertib atau atas kesepakatan bersama dengan susunan acara sebagai berikut:

1. Pengantar Ketua Rapat.
2. Penjelasan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan terhadap agenda rapat.
3. Tanggapan Anggota Komisi IV DPR RI.
4. Jawaban Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
5. Kesimpulan Rapat.
6. Penutup.

Apakah acara ini dapat disetujui?

(RAPAT: SETUJU)

Sebagaimana kita ketahui tata cara pelaksanaan tugas komisi dalam bidang anggaran sebagaimana diatur dalam Pasal 59 ayat 2 Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia tentang tata tertib antara lain, mengadakan pembicaraan pendahuluan mengenai penyusunan rancangan anggaran pendapatan dan belanja negara yang meliputi rencana kerja Pemerintah serta rencana kerja dan anggaran Kementerian dan Lembaga dalam ruang lingkup tugas Komisi dan usulan. Saya tegaskan lagi dalam menyusun anggaran usulan Anggota mengenai program pembangunan daerah pemilihan bersama dengan Pemerintah.

Selanjutnya hasil pembahasan disampaikan secara tertulis kepada Badan Anggaran untuk disinkronisasi. Perlu kami sampaikan bahwa pelaksanaan Rapat Kerja pada hari ini adalah sesuai dengan surat Badan Anggaran 098/PD.02/602/2020 tanggal 8 Juni 2020 mengenai penyampaian rancangan jadwal pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun anggaran 2021 dan rencana kerja Pemerintah tahun 2021, sebagai acuan dalam rangka pembahasan pembicaraan pendahuluan RAPBN tahun anggaran 2021 dan RKP tahun 2021 antara komisi-komisi dengan mitra kerjanya.

Bapak/Ibu yang kami hormati.

Di pagi yang cerah ini pertama-tama Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mengapresiasi pencapaian kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas realisasi anggaran tahun 2019 sebesar 96,16% atau sebesar Rp8,843 triliun dari pagu anggaran 2019 sebesar Rp9,196 triliun, jika dibandingkan dengan realisasi tahun 2019, realisasi-realisasi ini mengalami kenaikan 7,95 % dari 89,08% dengan penyerapan anggaran sebesar Rp7.163.000.000.000,00 dari pagu Rp8 triliun.

Dalam kesempatan ini juga kami ingin mendapatkan penjelasan dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terkait tindak lanjut rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan dalam ikhtisar hasil pemeriksaan BPK Semester II tahun 2019 berdasarkan, laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan pemerintah tahun 2019. Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia meminta penjelasan atas 23 permasalahan di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup yaitu 17 kelemahan sistem pengendalian internal dan 6 kelemahan terkait kepatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan.

Bapak/Ibu yang saya hormati.

Terkait pandemi COVID-19 yang terjadi sejak triwulan I tahun 2020. Komisi IV dapat memahami adanya penyesuaian-penyesuaian kebijakan yang menyebabkan beberapa program dan kegiatan di Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun 2020 tidak dapat dilaksanakan secara optimal, sebagai konsekuensi dilakukannya penyesuaian anggaran dalam rangka percepatan, penanganan dan pemulihan dampak pandemi COVID-19.

Selanjutnya kerangka ekonomi makro dan pokok-pokok kebijakan fiskal tahun 2021 yang merupakan gambaran awal sekaligus skenario atau kebijakan ekonomi fiskal tahun 2021 digunakan sebagai landasan penting atas penanganan serta pemulihan dampak pandemi COVID-19 serta upaya menjaga kondisi perekonomian nasional dan stabilitas sistem keuangan.

Dalam kesempatan Rapat Kerja ini Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia meminta penjelasan mengenai alokasi anggaran pagu indikatif Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan tahun Anggaran 2021 sebesar Rp7.563.000.000.000,00.

Bapak/Ibu Anggota yang saya muliakan.

Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat meminta penjelasan mengenai isu-isu penting terkini antara lain:

1. Maraknya kegiatan perburuan ilegal, satwa liar, permasalahan konflik satwa dan kasus ilegal logging dan penambahan kawasan hutan yang diduga akibat kurang efektifnya kegiatan pengamanan hutan.
2. Penanganan limbah medis infeksius akibat penanganan COVID-19.
3. Tindak lanjut penanganan kasus impor sampah ilegal.
4. Rencana alih fungsi 1,2 juta hektar kawasan gambut untuk pembukaan lahan sawah.

Bapak/ Ibu yang kami hormati.

Kalau 1,2 juta gambut ini dibuka untuk sawah, maka *insya allah* lahan gambutnya habis. Jadi saya juga lagi itu dalam Rapat Kerja dengan Menteri Pertanian sudah menyampaikan, kenapa tidak menggunakan, kenapa tidak menggunakan lahan-lahan tidur milik PTPN VIII, IX, X di Pulau Jawa? Perhutani di Pulau Jawa, Inhutani di Luar Pulau Jawa. Demikian pengantar yang kami sampaikan.

Selanjutnya kami persilakan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan penjelasan terkait hal-hal tersebut diatas, silakan bu.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN (Dr. Ir. SITI NURBAYA, M.Sc.):

Terima kasih.

Yang kami hormati Pak Ketua.

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Shalom.

Om swastiastu.

Yang kami hormati Pimpinan Komisi IV DPR RI,

Yang kami hormati Ibu-ibu dan Bapak-bapak Anggota Komisi IV DPR RI.

Pertama kami juga menyampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT hari ini dapat melaksanakan Rapat Kerja bersama yang terhormat Pimpinan dan Anggota yang terhormat Komisi IV DPR RI dan kami juga menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang sangat tinggi atas undangan ini dan atas segala dorongan, dukungan, saran-saran dan kritik yang konstruktif selama ini kepada KLHK dan terutama dorongan dan dukungan ketika harus melalui masa-masa sulit COVID yang masih berlangsung dan telah kita lalui lebih dari 3 bulan.

Kami mohon izin untuk mempertegas ucapan terima kasih dan penghargaan dalam melalui masa COVID atas dorongan dan dukungan yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI dan mohon izin kami melaporkan, bahwa bersama-sama dan dalam dukungan tersebut telah diselesaikan kerja-kerja bersama kelompok tani masyarakat hutan perhutanan sosial melalui *e-learning* yang juga dipandu dan dibantu motivasi oleh yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI telah diselesaikan sebanyak 100 angkatan, 3.000 Anggota yang mengikuti, juga telah diselesaikan masalah CSR, dukungan, bantuan sedapat-dapatnya yang kita lakukan melalui kerja bersama-sama antara Sekretariat Komisi IV DPR RI, asosiasi dan KLHK.

Dan Pimpinan yang kami hormati dan Ibu dan Bapak Anggota yang kami hormati.

Rasanya kalau soal CSR ini harusnya bisa terus menerus kita lakukan. Jadi bukan hanya dimasa pandemi COVID karena pada dasarnya memang masyarakat membutuhkan dan Pemerintah bersama Sekretariat DPR RI didukung oleh yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI, dalam hal ini kita akan melanjutkan hal-hal tersebut apalagi ini menghadapi *Idul Adha*.

Jadi kalau boleh Pimpinan kami mohon izin nanti bersama Sekretariat Komisi IV DPR RI dan Para Tenaga Ahli kita akan melanjutkan ini ya Pak Sekjen ya?

Saya juga berterima kasih yang tidak henti-hentinya yang terhormat Anggota yang juga menegur kami soal-soal limbah medis, soal satwa dan lain-lain termasuk untuk kontrol tentang Karhutla.

Pimpinan sesuai dengan agenda rapat, kami telah menyampaikan bahan secara tertulis ada 250 halaman dan nanti kami akan menyampaikan *highlight* dan mohon periksa dari Bapak/Ibu Anggota yang kami hormati dan kami akan memberikan laporan atas hal-hal yang tadi menjadi catatan dari yang terhormat Pak Ketua.

Jadi sesuai dengan Undangan, maka materi Rapat Kerja ini akan meliputi evaluasi pelaksanaan APBN 2019 dan 2020 dan program RKA-K/L/KLHK 2021 hasil pemeriksaan BPK dan permohonan dukungan untuk pagu indikatif serta isu-isu aktual.

Pimpinan dan Ibu Anggota Komisi IV yang kami hormati.

Untuk bagian yang pertama, izinkan kami melaporkan tentang evaluasi APBN sampai dengan 2019 serta pelaksanaan di 2020. Seperti pada materi yang kami sampaikan beberapa hal yang menjadi prioritas dan sangat dan cukup prinsip sebagai langkah korektif yaitu berkenaan dengan perhutanan sosial. Jadi perhutanan sosial merupakan salah satu program yang sampai

dengan 2019 dari target 12,7 juta hektar telah diselesaikan 4,175 juta hektar bagi 857 ribu kepala keluarga.

Kemudian kementerian juga pada halaman berikut dihalaman 7 memang menegaskan bahwa taman nasional, taman wisata alam, kawasan konservasi kiranya dapat menjadi bagian dari sumber-sumber untuk pertumbuhan ekonomi daerah, oleh karena itu kementerian terus mendorong untuk kawasan-kawasan dengan keindahan alam dan dengan tetap menjaga fungsi hutannya itu kita dorong untuk sebesar-besarnya bermanfaat bagi daerah dan bagi masyarakat.

Hal lain yang cukup menonjol dalam korektif selama 5 tahun ini sampai dengan 2019 adalah peran dari kesatuan pengelolaan hutan. *Forest management unit* adalah unit yang paling secara langsung bersentuhan dengan masyarakat, bekerja pada tingkat tapak, jadi bersama-sama dengan Pemerintah Daerah ini kami dorong. KPH adalah unit pelaksana teknis kehutanan yang lembaga dan personilnya ditentukan oleh Pak Gubernur, jadi dia menjadi UPT, unit pelaksana teknis daerah provinsi berada dibawah Dinas Kehutanan tetapi pedoman, program dan sebagian besar dukungan anggarannya dari KLHK. Jadi kedepan kita dorong terus untuk KPH sebagai *Forest management unit* tingkat lapangan menjadi semakin baik.

KLHK juga mendukung bahwa berikutnya bahwa sumber daya hutan itu untuk keperluan pembangunan wilayah daerah dan juga ekonomi. Kemudian di *screen* berikutnya kita juga, kementerian juga berupaya untuk sedapat-dapatnya memberikan dukungan untuk ketahanan pangan, saya kira ini juga didorong dan dibimbing terus oleh Komisi IV DPR RI dalam beberapa tahun ini ada yang namanya program PAJALE (Padi, Jagung, Kedelai) dan sebagainya penyediaan dengan pola-pola kerja sama dengan unit-unit kehutanan. Jadi ada 106 ribu hektar contohnya diperhutanan sosial di Pulau Jawa dan juga di luar Jawa.

Demikian pula langkah-langkah kementerian untuk semakin mendorong atau memberikan kontribusi kepada ekonomi maupun investasi. Terus di *screen* 12 Kementerian juga terus berupaya untuk menjaga kelestarian, jadi kita berusaha untuk menjaga agar deforestasi itu semakin menurun dan kita akan terus mengurangnya. Demikian pula untuk pemulihan wilayah-wilayah seperti wilayah pesisir maupun ekosistem gambut, nanti kami akan menyampaikan uraian lebih banyak berkenaan dengan gambut pada bagian isu aktual.

Demikian pula untuk lingkungan di *screen* 17, untuk penurunan beban pencemaran lingkungan melalui evaluasi terhadap dunia usaha, efisiensi energi bisa dilakukan, demikian pula penurunan emisi gas rumah kaca ini mohon periksa pada halaman 17 dan juga limbah padat. Tentu yang penting juga adalah rehabilitasi hutan dan lahan mohon periksa pada halaman 18 dan demikian pula terkait dengan kerja-kerja korektif, *law enforcement* melalui penegakan hukum yang datanya bagaimana penanganan pengaduan,

pengawasan perizinan misalnya penanganan pengaduan 4.116 kali, kemudian sanksi administratif dikeluarkan sebanyak 1.211 kali, kemudian gugatan perdata lingkungan, pengadilan kemudian maupun kasus-kasus yang telah P21 mohon periksa pada halaman 19.

Demikian pula selanjutnya realisasi anggaran KLHK pada tahun 2019 mohon periksa pada halaman 21, tadi sudah disampaikan oleh yang terhormat Bapak Ketua dan juga realisasi anggaran pada halaman 22. Jadi Pak Ketua tadi sudah menyampaikan dan terima kasih atas lagi-lagi atas dukungan dan bimbingan bahwa kementerian terus berupaya untuk semakin memperbaiki kinerjanya.

Kemudian terkait dengan bagaimana pelaksanaan anggaran untuk tahun 2020, kami mohon periksa pada halaman 24. Jadi pola-pola kerja yang tadi kami laporkan itu terus kita lakukan dan berdasarkan pagu anggaran pasca *refocusing* tahun 2020 itu kelihatan realisasi anggarannya per tanggal 15 Juni adalah 27,61 % yang sudah dipertanggung jawabkan.

Bapak, Ibu yang kami hormati.

Selanjutnya tadi kami sudah diawal juga melaporkan bahwa saya berterima kasih sekali lagi bahwa *refocusing* anggaran untuk KLHK atas dukungan Komisi IV DPR RI ini termasuk yang cepat administrasinya karena kami mendapatkan dukungan yang cepat dari Komisi IV DPR RI, jadi baik tadi *e-learning* dan sebagainya. Jadi kita akan menjaga momentum, dukungan dan kecepatan ini dan kami berupaya untuk tidak mengecewakan bapak dan ibu dan para yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI.

Bapak Pimpinan dan Ibu dan Bapak Anggota yang kami hormati.

Selanjutnya izinkan kami beranjak kepada program untuk KLHK tahun 2020 mohon periksa pada halaman 30 dan seterusnya. Di halaman 31 pada tahun 2021 ini sesuai dengan arahan Pemerintah dalam hal ini dalam hal ini Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional dilakukan *re-design* dari sistem penganggaran. Jadi dari 7 agenda arahnya untuk untuk sinergi yang lebih kuat, jadi berdasarkan surat Bappenas tanggal 8 Mei dilakukan penataan program. Jadi kita lihat di halaman mohon periksa pada Halaman 33 dari semula 13 program untuk KLHK disesuaikan menjadi 6 program. Jadi yaitu 6 program meliputi program dukungan manajemen, program pengelolaan hutan berkelanjutan, program riset dan inovasi ilmu pengetahuan dan teknologi, program pendidikan dan pelatihan vokasi, program kualitas lingkungan hidup dan program ketahanan bencana dan perubahan iklim.

Apa saja tema RKP 2020. Saya meyakini bahwa yang terhormat Pimpinan dan Ibu dan Bapak Anggota telah juga mengikutinya dari penjelasan-penjelasan Menteri Keuangan dan Rapat-rapat Kerja dianggaran DPR, fokusnya tema utamanya adalah mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial dan fokus pembangunannya meliputi pemulihan industri pariwisata dan investasi, reformasi sistem kesehatan nasional, reformasi

sistem perlindungan sosial dan reformasi sistem ketahanan bencana, mohon periksa pada halaman 35 terdiri dari 7 prioritas nasional.

Jadi mulai dari ketahanan ekonomi kemudian mengatasi kesenjangan kesenjangan dan pemerataan, meningkatkan SDM kemudian pembangunan manusia dan kebudayaan, infrastruktur, lingkungan hidup dan stabilitas politik hukum dan transportasi pelayanan publik. Dari program-program prioritas nasional ini mohon periksa kita bisa lihat, satu persatu pada pemulihan industri pariwisata dan investasi misalnya di halaman 36 itu, KLHK terkait pada program pariwisata. Jadi untuk akses, untuk fasilitasi dan juga untuk kesiapan destinasi wisata dan dalam hal investasi dalam kaitan dengan penyederhaan perizinan dan kepastian usaha, integrasi sistem perizinan dan pendampingan investasi.

Kemudian dalam kaitan dengan reformasi sistem kesehatan nasional pada halaman 37, itu ditekankan di sini terkait dengan pengelolaan limbah medis dan pada program prioritas nasional reformasi sistem perlindungan sosial dan sistem ketahanan bencana, mohon periksa pada halaman 38 yaitu dalam kaitan dengan memperkuat manajemen bencana berbasis masyarakat, maupun manajemen krisis secara terpadu dan dalam sistem jaring pengaman sosial. Nah di mohon periksa bagaimana prioritas-prioritas nasional tersebut dalam kaitan KLHK yaitu sebagai rincian dari yang tadi kami laporkan yaitu pada halaman 40 untuk prioritas nasional:

1. Ketahanan ekonomi pertumbuhan yang berkualitas dan berkeadilan meliputi tadi ketersediaan akses dan kualitas pangan, energi maupun industri dan pariwisata.
2. Pengembangan wilayah untuk mengatasi kesenjangan melanjutkan transformasi sosial keunggulan kompetitif wilayah maupun dalam peningkatan pemerataan dan menjaga daya saing sektor-sektor produksi di masyarakat.
3. Mohon periksa pada halaman 42 meningkatkan SDM dan kualitas daya saing tadi juga seperti kami laporkan beberapa hal telah kita laksanakan seperti memperkuat kelompok-kelompok masyarakat dengan *e-learning* dan sebagainya.

Kemudian selanjutnya pada halaman 43 berkaitan dengan prioritas nasional untuk lingkungan hidup dan meningkatkan ketahanan bencana serta perubahan iklim, jadi di sini mohon periksa pada halaman 43 yaitu penguatan upaya pencegahan, penguatan sistem dan respons serta mengatasi atau meningkatkan pencapaian penurunan emisi dan intensitas gas rumah kaca. Pada tahun 2021 ini arah kebijakan prioritas nasional disitu dicantumkan meliputi ada 4 hal yaitu memperkuat ketahanan ekonomi di tengah kondisi ekonomi global yang melambat pertumbuhannya dengan cara akses dan kualitas pangan, penyediaan energi, pemulihan pasar ekspor, pariwisata nasional dan kepastian usaha, kemudian mempercepat pemulihan dampak pandemi dalam kaitan ini yang difokuskan kepada kerjasama investasi perdagangan dan sektor industri serta pariwisata khususnya di wilayah timur, kemudian pengendalian penduduk dan penguatan upaya pencegahan

penanggulangan dan pemulihan terhadap pencemaran dan kerusakan lingkungan.

Ibu dan Bapak Pimpinan yang kami hormati.

Pagu indikatif tahun 2021, mohon periksa pada halaman 46 yang meliputi pagu indikatif untuk operasional, non operasional dengan total Rp 7.562.517.984.000.00 dan uraiannya pada halaman berikut di 47 dan 48 yang sebarannya menurut program-program yang sudah di *re-desain* sesuai arahan Bappenas dan Keuangan seperti Sekretariat Jenderal dalam manajemen Inspektorat Jenderal dan sebagainya. Ini kelihatan unit-unit kerja Eselon 1 atau program-program yang lama itu diorientasikan kepada program yang baru yang sebanyak 6 program yang tadi telah kami laporkan misalnya di Sekretariat Jenderal dan Inspektorat Jenderal program dukungan manajemen dan di semua unit atau program yang lama pasti ada program dukungan manajemen termasuk BRG, kemudian di program-program yang lama ada penyesuaian misalnya Direktorat Jenderal PHPL akan masuk kepada pengelolaan hutan berkelanjutan, mohon periksa pada halaman 47 nomor 3 misalnya.

Demikian pula misalnya Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam pada nomor 5, dia akan di reorientasi programnya kepada selain manajemen pengelolaan hutan juga terkait kualitas lingkungan hidup dan seterusnya sampai di halaman 48.

Pada akhirnya kami mohon untuk dapat disetujui pagu indikatif Kementerian LHK perunit, perjenis belanja, perunit pada sumber dana pada tahun 2021 yaitu pada halaman 49. Sekretariat Jenderal ini karena mohon izin ketua harus dibacakan satu persatu angkanya karena akan nanti diputuskan oleh yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi 4 DPR RI:

- a. Sekretariat Jenderal dengan Pagu indikatif Rp493.415.326.000,00.
- b. Inspektorat Jenderal Rp70.613.724.000,00.
- c. Direktorat Jenderal PHPL dengan pagu indikatif Rp307.306.014.000,00.
- d. Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung dengan pagu indikatif Rp2.040.275.579.000,00.
- e. Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistem dengan pagu indikatif Rp1.909.725.534.000.
- f. Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan dengan nilai Rp367.777.464.000.
- g. Badan Penelitian, Pengembangan dan Inovasi dengan nilai Rp317.017.832.000.
- h. Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia dengan nilai Rp310.249.386.000,00.
- i. Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan dengan nilai Rp340.969.709.000,00.
- j. Direktorat Jenderal Penegakan Hukum Lingkungan Hidup dan Kehutanan dengan nilai Rp344.665.771.000,00.

- k. Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim dengan nilai Rp286.798.156.000,00.
- l. Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah Limbah dan Bahan Beracun Berbahaya dengan nilai Rp266.968.331.000,00.
- m. Direktorat Jenderal Pengendalian, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan dengan nilai Rp193.742.633.000,00.

Dengan demikian jumlah untuk KLHK adalah Rp7.249.522.459.000,00 serta Badan Restorasi Gambut dengan nilai Rp312.995.525.000,00 dan total untuk KLHK dalam hal ini termasuk BRG adalah Rp7.562.517.984.000,00.

Kami mohon berkenan dorongan dan dukungan yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI serta Pimpinan dan Ibu dan Bapak Anggota yang kami hormati mempelajari pagu indikatif ini kami telah melakukan penelitian di KLHK dan untuk itu kami mohon berkenan kiranya mendapatkan dukungan untuk mendapatkan tambahan Pagu mengingat beberapa hal yang sangat dibutuhkan penambahan pagu ini baik untuk tahun 2020 maupun untuk tahun 2021.

Ibu dan Bapak Pimpinan yang kami hormati.

Untuk tahun 2021 izinkan kami mengusulkan pagu tambahan sebagaimana terlihat mohon periksa pada halaman 51 yaitu senilai Rp5.347.698.842.500,00 dengan pokok-pokok pembangunan persemaian modern, RHL, pemulihan Danau, kita juga punya tugas untuk menjadi tuan rumah untuk COP Mercury secara internasional, kemudian pengelolaan sampah yang sangat penting, pencegahan Karhutla ketahanan pangan, *agroforestry* dan lain-lain serta kekurangan belanja perkantoran.

Pimpinan dan Ibu dan Bapak Anggota yang kami hormati.

Pada kesempatan ini izinkan juga saya untuk memohon dukungan untuk tambahan anggaran untuk tahun 2021 kira-kira senilai Rp500 Miliar 2020, untuk tahun 2020 maaf ngomongnya udah kelamaan, kebanyakan, mohon izin mohon maaf. Jadi tadi yang 2021 kami mengusulkan senilai 5 triliun 300 dan seterusnya miliar, kemudian yang untuk 2020 kami mohon dapat dukungan untuk 500 miliar tambahan bagi keperluan rehabilitasi gambut dan kesiapan ketahanan pangan serta untuk keperluan penanganan kebakaran hutan dan lahan sampai dengan akhir tahun.

Bapak Pimpinan dan Ibu dan Bapak Anggota.

Itu hal-hal yang berkaitan dengan RKA.K/L dan anggaran 2020 tambahan dan 2021 pagu indikatif dan usul tambahan. Selanjutnya sesuai dengan agenda dan tadi arahan dari yang terhormat Pak Ketua dan Pimpinan serta Ibu dan Bapak Anggota izinkan kami melaporkan tentang rencana aksi KLHK terhadap LHP BPK RI semester 2 2019 mencakup 23 permasalahan yaitu 17 kelemahan dalam sistem pengendalian intern Pemerintah dan 6

kelemahan dalam kaitan dengan kepatuhan terhadap peraturan perundangan.

Jadi ada 17 permasalahan yaitu, Pertama masalah kelemahan sistem pengendalian dalam kaitan dengan pengelolaan PNPB dan piutang PNPB, jadi di sini pengendalian atas area terganggu kawasan hutan tanpa izin. Kemudian kegiatan pertambangan belum memadai. Jadi memang kita sedang kerja keras juga untuk didalam rencana aksinya ini untuk melakukan inventarisasi pemegang izin, kemudian menyusun dan mengembangkan sistem aplikasi, serta meningkatkan koordinasi dengan Kementerian Keuangan dan merintis koordinasi antar Kementerian.

Bapak Pimpinan dan Ibu dan Bapak Anggota.

Memang ini bagi penambangan tanpa izin atau pertambangan emas skala kecil juga itu bagian yang tidak mudah karena urusannya juga banyak terkait dengan ESDM dan juga Pemerintah Daerah apalagi tambang-tambang izinya kalau yang skala tertentu diprovinsi. Jadi sejak Undang-undang 23 2014 keprovinsi dan sebelumnya di Kabupaten sehingga di provinsi sulit sekali mengumpulkan data yang bekas dari kabupaten. Jadi kami masih terus mengkonsolidasikan ini dan sesuai arahan Bapak Wapres ini agar diintensifkan dan perlu dibuat Peraturan Presiden untuk mengkonsolidasikan langkah-langkah ini.

Memang ada PP 76 tahun 2008 untuk mengontrol ini dan melakukan rehabilitasi lahannya dan ada PP 78 tahun 2010, dimana harus dilakukan reklamasi itu yang dikelola oleh SDM, jadi ini langkah-langkahnya Pimpinan.

Kemudian dalam 17 masalah terkait belanja barang, rencana aksinya kami lakukan dengan mengontrol peta secara periodik, jadi skala pemetaannya dan sebagainya supaya efektif dan regulasi baru serta memberikan sanksi kepada pihak-pihak yang tidak melaksanakan tugas secara optimal dan dalam kaitan dengan sistem 17, dan dengan terkait dalam masalah SPIP pada barang milik negara dan persediaan, rencana aksinya yaitu menyusun *roadmap*, membentuk gugus tugas untuk pengendalian pengawasan optimal yang optimal, menginventarisasi masalah, melakukan koordinasi dan juga sanksi kepada pihak-pihak yang tidak melaksanakan tugas secara optimal.

Terhadap ketidakpatuhan 6 masalah ketidakpatuhan, terkait RHL infrastruktur gambut dan honorarium pembahas dan kendaraan operasional serta rekening hasil lelang kayu sitaan disiapkan rencana aksi untuk mengembangkan sistem monitoring online. Jadi ada evaluasi kinerja secara periodik, kemudian pengawasan pengendalian kemudian memerintahkan setoran ke kas negara dan memberikan sanksi.

Bapak Pimpinan kami laporkan bahwa terhadap 23 masalah tersebut untuk temuan kelebihan bayar senilai 10 miliar telah dipenuhi sebanyak 93%,

jadi sudah dikembalikan uangnya. Tadi ini di halaman 60 saya tadi sudah minta izin untuk persetujuan.

Bapak Pimpinan dan Ibu dan Anggota yang kami hormati.

Selanjutnya dalam catatan kami ada beberapa isu aktual dan telah kami sampaikan secara tertulis dan mohon izin saya *highlight* saja Pak Ketua supaya kami mendapatkan nanti masukan dan catatan yang banyak dari Ibu dan Bapak Pimpinan dan Anggota yang terhormat.

Kami mencatat ada 10 hal yaitu penahan COVID, saya kira, tindak lanjut kasus impor sampah ilegal tadi Pak Ketua sudah sampaikan, patroli pengamanan Hutan Karhutla, *illegal logging*, Pramban Kawasan dan konflik satwa, juga soal ASL tumbuhan dan satwa liar, konflik satwa, jasa lingkungan, ketahanan pangan, karbon, hidrologis gambut, dan tindak lanjut.

Tadi Pak Ketua yang terhormat memberikan catatan terkait dengan limbah medis, izinkan kami melaporkan pada halaman 64 dan seterusnya. Jadi isu utama dalam penanganan limbah infeksius COVID, memang sejak awal kami telah memberikan arahan kepada daerah untuk bagaimana menangani limbah infeksius yang diorientasikan untuk penanganan secara khusus memutus mata rantai penularan COVID kemudian mengurangi jumlah limbah medis dan mempelajari serta mendukung kapasitas pengelolaan.

Pak Ketua, Bapak Pimpinan dan Ibu dan Bapak Anggota yang terhormat.

Pada halaman 65 mohon izin kami melaporkan bahwa kapasitas pengelolaan limbah B3 secara termal dalam fasilitas pelayanan ini kelihatannya sudah bisa dipetakan yang masih yang tidak memiliki pengolahan limbah B3 berizin yaitu Sumatera Barat, Bengkulu, Kaltara, Maluku Utara, Maluku kemudian Papua Barat dan Papua. Sedangkan sudah ada jasa pengolah limbah medis di halaman berikutnya yaitu di Kepri, Kaltim, Banten, Sulsel, Jawa Barat, Jawa Tengah dan Jawa Timur.

Penanganan limbah infeksius di halaman berikutnya, itu sudah ada arahan yang kami sampaikan baik arahan kebijakan dari menteri maupun arahan teknis dan ada juga komunikasi-komunikasi kami melalui rapat-rapat koordinasi dan kita juga mendukung untuk pembangunan fasilitas pengelolaan limbah medis. Pada tahun 2020 ini kita akan bangun untuk Sumatera Barat, Aceh, Kalimantan Selatan, NTT dan NTB di kita akan berikan dukungannya. Pada tahun 2021 sampai 2024 Pemda yang sudah merespons untuk dapat dibangun yaitu Jambi, Papua Barat, Kalbar Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tenggara, Papua, Maluku, Sumsel, Kaltara di halaman 67.

Pimpinan dan Anggota yang kami hormati.

KETUA RAPAT:

Ibu Menteri saya tanya sedikit.

Apabila limbah medis di Lampung itu dikemanakan? karena Sumsel tidak ada, Bengkulu tidak ada, Lampung tidak ada.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Oke pakai jasa, oke Pak Ketua saya mohon izin. Mohon di screen berikutnya kalau begitu, ini jawabannya.

KETUA RAPAT:

Karena dirumah sakit di Lampung ini 2, 3 rumah sakit ini sudah ada yang membuang limbah ke sungai.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Iya itu dia, Pak Ketua saya mohon izin saya kemarin baru tegur Sekda karena satu-satunya provinsi yang tidak melaporkan tentang limbah medis adalah Lampung. Jadi setelah saya tegur, lalu akhirnya laporannya masuk. Jadi mungkin lengah.

KETUA RAPAT:

Iya mungkin Gubernur Lampung sangat sibuk sekali itu temennya Pak Salim Fahkry itu, sangat sibuk sekali dia.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Dihalaman 70 Pak Ketua, jadi sampai dengan tanggal 8 Juni limbah medisnya COVID dari seluruh Indonesia itu mencapai lebih dari 1100 ton ya mungkin 1200 ton. Pada tanggal 8 Juni itu 4 Provinsi yang belum, tapi kita terus kejar sampai dengan kemarin Lampung belum masuk, lalu saya tegur lalu akhirnya malamnya jujur udah masuk. Jadi kita akan kontrol lagi dan kita akan tindaklanjuti tentang ini Pak Ketua, tapi seperti kami laporkan tadi di halaman 72 kita juga akan memfasilitasi termasuk untuk Aceh, Sumbar, Kalsel, NTB, NTT tapi untuk fasilitasi Lampung 2021 Bu Dirjen mungkin harus dilihat ini karena Pak Ketua udah mulai marah soal Lampung.

Mohon periksa Bapak/Ibu yang kami hormati pada halaman 73, kemudian hasil-hasil rapat koordinasi bersama kawan-kawan dinas LH. Jadi pada dasarnya sekarang ini kami punya interaksi khusus melalui WA grup dengan dinas-dinas LH dan Dinas Kehutanan daerah, tapi memang responsnya masih perlu terus-menerus diperkuat.

Pak Ketua dan Ibu dan Bapak Anggota yang kami hormati.

Ada yang menarik saya lihat respons Pemda ini berbeda-beda. Kalau kita lihat NTT dan Sulawesi Selatan misalnya itu Pemda yang menurut saya sangat cerdas begitu. Dia melihat ada sesuatu di sini sehingga dibuatlah Unit Pelaksana Teknis Daerah untuk pelayanan jasa limbah, jadi dia pakainya ke jasa limbah Pak Ketua. Jadi ada unsur *earning power* juga untuk dana PAD dan lain-lain. Jadi saya dilaporkan oleh salah satu Direktur di Otda di Dagri bahwa beberapa daerah mengusulkan dan memproses Unit Pelaksana Teknis Daerah untuk keperluan pelayanan jasa limbah medis. Jadi memang COVID ini akhirnya mengajak daerah juga untuk berpikir, untuk menata dirinya

Bapak Pimpinan dan Ibu dan Bapak Anggota,

Bagaimana sosialisasi kemudian pengadaan sarana dan lain-lain mohon periksa sampai dengan halaman 83. Kemudian terkait dengan hutan sosial dan bantuan penyaluran bantuan pembangunan atau Bang Pesona itu kami mohon dapat diperiksa saja di halaman 84 dan seterusnya, tetapi intinya bahwa dengan *e-learning* kemarin kita sebetulnya mengajak kelompok-kelompok usaha perhutanan sosial pada halaman 85, 86 dan seterusnya, di halaman 87, untuk dia menjadi *start up* bisnis dengan spesifikasi produk hasil hutan bukan kayu yang sangat baik. Kalau istilah yang terhormat Pak Darori *Bioprospecting* ya Pak "sedapat-dapat mungkin produk-produk lokal seperti halaman 90 dan 91 termasuk ecowisata, jadi ini sebetulnya sebuah ruang potensial yang sangat baru dan oleh karena itu kami juga mendorong Dirjen PSKL untuk melanjutkan Bang Pesona serta meningkatkan kualitas kegiatan-kegiatannya yang mohon periksa misalnya termasuk yang telah kita lakukan dengan pelatihan, dengan dukungan untuk pemahaman bisnis dan sebagainya.

Pimpinan dan Ibu dan Bapak Anggota yang kami hormati.

Selanjutnya terkait dengan limbah yang bahan baku industri di halaman 104, pada dasarnya yang jadi masalah adalah bahwa bukan impor limbah atau impor bahan bakunya tetapi permasalahannya adalah impor *scrap* plastik atau impor kertas itu ternyata mengandung limbah dan datanya mohon periksa pada halaman 105, kemudian dan juga di halaman 106 yang sudah di ditangani pemeriksaan bersama kontainer importasi antara KLHK dan Bea Cukai. Kemudian yang sudah diperiksa sampai dengan 18 Mei adalah 1121 kontainer yang dari yang diperiksa itu; yang bersih 685 kontainer dan ada yang sudah di re-ekspor, jadi dikembalikan kepada pengirimnya 304 kontainer dan di dalam proses ada 132. Ini memang tidak mudah Bapak Pimpinan dan Ibu dan Bapak Anggota yang terhormat karena dia terkait dengan apa kehidupan dari industri daur ulang, industri plastik maupun industri kertas. Oleh karena itu telah dilakukan pembahasan-pembahasan yang intensif, dibimbing oleh SESKAB (Sekretariat Kabinet) yaitu..

KETUA RAPAT:

Ibu Menteri kalau tidak salah itu ada surat dari Seskab ya?

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Jadi itu sudah keluar SK Bersama Pak Ketua, SK bersama antara Menteri LHK, Menteri Perindustrian dan Kapolri. Jadi Isinya, jadi Menteri Perdagangan, Menteri LHK, Menteri Perindustrian dan Kapolri yang mohon periksa halaman 109 yang isinya bahwa SKB ini adalah sebagai pedoman pelaksanaan impor limbah, toleransi kandungan material ikutan misalnya apa talinya, ikatannya dan lain-lain itu 2%, toleransi kandungan minyak emulsima dan lain-lain dan tidak menetes. Para pihak yang terikat menyusun peta jalan, jadi ada *roadmap* pengurangan batas toleransi kandungan, penurunan kuota impor secara bertahap atau dan *roadmap* harus disusun paling lambat 6 bulan sejak SKB dikeluarkan. Kemarin SKB nya keluar tanggal 27 Mei 2020 Pak Ketua, dalam rangka ini maka dibentuk Satgas Impor Limbah B3 oleh Kementerian Perdagangan dan kita harus mengeluarkan prosedur operasional baku untuk ini. Jadi mudah-mudahan dengan SKB ini bisa menyelesaikan dan bisa mengatasi kebutuhan bahan baku dari industri

KETUA RAPAT:

Ibu Menteri yang saya tanyakan yang sudah masuk waktu itu kita periksa, ini akan diapakan? karena SKB ini menyangkut yang lalu atau yang akan datang? karena begini kemarin di TVOne, jelas diberitakan bahwa pengusaha importir sampah kebal hukum.

Jadi saya mau tahu nanti saya akan panggil dan tanggal 9 Juli kita adakan Rapat gabungan Kemenlu, Perdagangan, Perindustrian, LHK dan Bea Cukai, supaya terang benderang. Termasuk juga nanti kita panggil pengusahanya karena saya terusik kemarin di TVOne saya lihat pengusahanya kebal hukum, wah hebat sekali saya bilang. Jadi rencana tanggal 9 iya Mbak Ita ya? tanggal 9 kami panggil pihak terkait dan saya agak kurang jelas Undang-undang atau peraturannya. Apabila barang itu dimusnahkan, dimusnahkannya dimana? kalau ditempat importir ilegal itu, apa itu bukan menjadi masalah? apa tidak terjadi pencemarannya lagi? itu yang nanti saya minta jelaskan, Iya terima kasih Ibu Menteri.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Iya terima kasih Ketua.

Saya akan perhatikan ini tetapi intinya bahwa yang ini berlaku untuk kedepan, yang lalu itu kalau dia pencemarannya banyak lebih dari 2%, itu harus dimusnahkan dengan *incenerator* .

KETUA RAPAT:

Yang melakukan pemusnahan siapa?

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Nanti kita akan atur teknis saja, kami akan susun teknis dan kami.

KETUA RAPAT:

Saya minta pada waktu akan datang Rapat Gabungan itu sudah ada jawaban. Karena yang saya tahu ini sebagian ini tidak ada SPI-nya, alias yang dikatakan itu ilegal. Nanti saya minta jawaban Dirjen dan termasuk juga Gakkum supaya kami semua mengerti, apa yang harus kami lakukan langkahnya? kalau memang harus pemusnahan, kalau di tempat yang bersangkutan bagaimana pengawasannya? dan inikan mohon maaf SKB ini agak menggelitik, siapa yang akan memeriksa toleransi kandungan material ikutan untuk kelompok kertas dan plastik ditetapkan sebesar 2%? apa setiap kontainer harus dipilah, diperiksa, siapa yang memeriksanya? satu kontainer satu periksa, yang periksa siapa?

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

LHK atas permintaan Bea Cukai karena itu lokasinya ada di Bea Cukai, jadi kita memeriksa atas permintaan Bea Cukai dan diperiksanya bareng-bareng KLHK dan Bea Cukai, Jadi memang satu persatu betul diperiksa.

KETUA RAPAT:

Oke, terima kasih.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Terima kasih Bapak Ketua.

Ibu dan Bapak Anggota serta Pimpinan yang terhormat.

Saya mohon izin melanjutkan tadi pertanyaan Pak Ketua terkait dengan pengamanan hutan. Mohon periksa pada halaman 114, pada halaman 111 itu beberapa catatan tentang kejahatan kehutanan dan pencapaian Gakkum pada tahun 2015 hingga tahun 2020. Jadi ancaman terhadap kawasan hutan masih tinggi perburuan satwa liar, konflik satwa, *illegal logging* dan Prambanan kawasan, jadi ini datanya. Upaya pengamanan telah dilakukan melalui kegiatan operasi dan penegakan hukum pidana, jadi pengamanan peredaran hasil hutan kemudian penegakan hukum pidana, ini datanya ada di halaman 111 dan 112, mohon Bapak Ibu yang terhormat bisa memeriksa.

Kemudian memang kami melihat ada persoalan gap antara kapasitas penindakan dan persoalan yang ada, Oleh karena itu memang kita melihat bahwa dalam memperkuat KPH dan jajaran daerah ini perlu dilakukan peningkatan-peningkatan dan juga langkah langkah ke depan seperti penguatan *early warning, system intelijen* dan penetapan cek *point* di daerah

perbatasan negara seperti halaman 113. Lokasi-lokasi dan keterangan serta aktivitas apa di dalam operasi pengamanan rutan, mohon periksa pada halaman 114, 115 dan 116 termasuk lokasi-lokasinya misalnya Operasi TSL di Lore Lindu pada Juli 2020 direncanakan untuk bulan Juli, kemudian juga di Tesso Nilo dan juga nanti di Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, di Sijunjung dan lain-lain.

Demikian pula patroli untuk kebakaran hutan dan lahan dan juga di kawasan konservasi, mohon periksa pada halaman 122 dan juga penanganan ataupun patroli ataupun kontrol oleh Direktorat Jenderal KSDAE khusus di kawasan konservasi pada *open up* atau areal yang terbuka dari 27 juta kurang lebih areal konservasi, KLHK mencatat terdapat kurang lebih 1,8 juta yang areal yang terbuka artinya yang *open up*, yang aksesnya begitu terbuka seperti mohon periksa pada halaman 127 sampai dengan 130, demikian.

Nah selanjutnya Bapak Pimpinan dan Ibu dan Bapak Anggota yang kami hormati, saya mohon izin tinggal dua lagi nih melaporkan tentang Karhutla dan nanti soal gambut dan ketahanan pangan seperti tadi yang disampaikan oleh yang terhormat Bapak ketua, tentang kebakaran hutan dan lahan, mohon periksa dimulai pada halaman 134,136,137,138 dan seterusnya. Saya mohon izin melaporkan bahwa pada sampai dengan tanggal 22 Juni kemarin terdapat hotspot sebanyak 870 kemudian dibandingkan dengan periode yang sama pada tahun lalu itu 1400-an hotspotnya, padahal menurut ketentuan atau menurut prediksi iklim tahun ini sebetulnya lebih panas daripada tahun lalu, tetapi kita berusaha mempelajari itu setelah Bapak Presiden meminta *wanti-wanti* pada tanggal 6 Februari, awal tahun ini untuk berhati-hati.

Saya mohon izin melaporkan bahwa kita telah melalui fase krisis pertama Karhutla di *screen* tambahan dari saya deh, terus. Bapak Pimpinan dan ibu dan Bapak Anggota yang terhormat, saya mohon izin melaporkan bahwa kalau kita lihat pola hotspot di Indonesia itu ada dua model ; model pertama, model di sekitar Aceh dan Riau itu yang berbeda dari provinsi lain. di Aceh dan Riau tetapi Aceh tidak sedahsyat Riau karena gambutnya tidak sebanyak di Riau tetapi modelnya kira-kira pada bulan Februari akhir masuk ke Maret April, itu dia hotspotnya tinggi. Jadi ada fase kritis di situ yang cukup gawat, nanti akan masuk lagi berat sekira kira-kira di akhir Juni masuk ke Juli dan paling berat nanti di Agustus-September itu nanti seluruh Indonesia sama disitu. Nah ini kita sudah pelajari sejak tahun 2010 sampai 2019 *pattern*-nya dan dengan mempelajari ini, maka Kementerian bersama BPPT, BMKG dan TNI AU melakukan rekayasa hujan Pak Ketua, Ibu dan Bapak Anggota. Oleh karena itu rekayasa hujan ini memang dimasukkan untuk mengatasi supaya yang bukan diperkirakan oleh BMKG pada bulan April itu kira-kira 17% wilayah udah sangat panas, terus pada bulan Mei itu kira-kira 37% daerah itu panas, iklimnya panas, jadi berarti akan tinggi. Jadi kita sudah melalui fase 17 sama 30 sekian persen, 38% di bulan Mei dan di bulan Juni dan kita melakukan tadi teknik modifikasi cuaca untuk membasahi gambut.

Tunggu dulu, terus lokasinya. Terus, nah ini daerah-daerah yang hijau yang daerah-daerah yang hijau ini yang gambut, konsepnya ternyata tidak ada asap. Kemarin sudah kita ingin Lebaran itu jangan ada asap karena saya nggak mau keluar di ruang publik misalnya maaf ini untuk kita aja jangan sampai duet maut COVID Karhutla, seram banget, saya menjaga banget, jangan sampai ada itu. Oleh karena itu yang gambut ini yang di sebelah wilayah timur ini semua kita coba basahin, jadi dari atas sampai ke Sumsel, jadi supaya jangan, jangan kebakaran dan itu ternyata ada hasilnya. Jadi ini yang tadi kami mohon berkenan untuk dapat didukung selanjutnya.

Jadi hasilnya terus, terus. Nah ini, hasilnya ternyata ini dilakukan TMC-nya pada tanggal 13 Mei sampai tanggal 30 Mei, jadi kira-kira 2 minggu hasilnya adalah 44 juta m³ air dan 138 mm curah hujan. Dalam teori iklimnya *Smith-Ferguson* yang kita pakai sejak tahun 70 Pak Ketua dan Bapak Ibu Anggota yang terhormat itu kalau 138 mm selama 2 minggu berarti 1 bulan itu kira-kira jadi bisa dua kalinya berarti 260 mm, apa artinya? menurut teori klimatologi, 200 milimeter itu namanya bulan basah. Jadi musim hujan, hujannya akan turun terus tapi kalau di bawah 100 mili itu namanya bulan kering itu akan rawan sekali untuk segala macam persoalan termasuk kebakaran dan kekeringan.

Kalau lihat data ini berarti terus, terus, terus. Nah data ini menunjukkan bahwa selama 13 sampai 31 Mei terdapat curah hujan 157 yaitu yang diprediksi oleh BMKG sebenarnya hanya 120 atau menurut rata-rata selama 10 tahun, 11 tahun, 12 tahun hanya 100 mili Jadi ada efektivitas sampai 36% artinya apa? artinya kalau kita kayak mengatur kalau sehari hujan, uap air diawan-awan, diudara itu saling menginduksi terbentuk jadi curah hujan Pak Ketua. Jadi dari 36%, jadi bisa basah berarti gambutnya bisa basah, jadi bisa ditahan.

Nah terus, terus ini masih di Riau kelihatan sekali hubungan antara curah hujan itu dibalok-balok yang keatas dengan grafik tinggi muka air tanah. Kita lihat yang kuning misalnya di Meranti. Diawalkan belum banyak hujannya, terus kita bikin rekayasa hujan, tinggi muka air tanahnya naik. Mula-mula dalam sekali 1 M, itu *ground water level* artinya tinggi muka air tanah, dia naik. Jadi artinya apa? artinya karena hujan gambutnya basah lalu jadi naik. Hal yang sama kita dilakukan di Sumatera Selatan, terus ini dengan volume airnya sampai 50 juta m³, terus, terus apa akumulasi akumulasi milimeternya curah hujannya 162 mili dan efektivitasnya itu kira-kira 23 sampai 29%. Kemudian demikian pula yang di Jambi sama polanya.

Bapak/Ibu, Pimpinan yang kami hormati dan Ibu dan Bapak Anggota.

Selanjutnya kita akan hal itu dilakukan pada tanggal 13 Mei sampai 31 Mei kemudian akan kita lanjutkan di Kalimantan dan seterusnya, terus ini rencananya di Kalimantan Barat, Tengah, Selatan, Timur dan nanti kita lihat kalau perlu sampai ke Utara, coba terus, terus.

Bapak/Ibu Pimpinan dan Anggota yang kami hormati.

Kalau lihat peta ini atau gambar ini ditahun 2020 diperkirakan musim panas itu pada bulan Mei 38% wilayah. Pada bulan April 17% wilayah, pada bulan Maret juga sudah ada kira-kira 4%. Dibulan Juni 27% berarti sisanya Juli, Agustus September itu akan panas di kira-kira 12% wilayah artinya ada yang kritis di bulan Mei, Juni, Juli kita sudah coba lalui sampai dengan bulan Juni. Jadi kita masih deg-degan untuk di bulan Juli, Agustus dan September. Kita lihat lagi data peta berikutnya dibawahnya, iya itu mundurnya awal musim kemarau. Jadi BMKG juga prediksi bahwa 43% wilayah kita akan mengalami musim kemarau yang mundur, itu gambar-gambarnya. Kalau yang tetap misalnya Aceh tetap, Sumatera Utara sebagian, Riau sebagian maju, sebagian mundur sangat kecil tetapi kebanyakan tetap sama, Sumatera Selatan relatif maju sebagian, tapi mundur 10 hari, Ini datanya kelihatan.

Oleh karena itu Pak Ketua seperti tadi harapan kami, kita akan melakukan modifikasi hari hujan setelah Kalimantan nanti, rencananya Kalimantan ini kita akan lakukan di akhir Juni sampai dengan pertengahan Juli. Pak Darori sangat paham posisi seperti ini, lalu kita akan harus kembali lagi ke Sumatera. Nanti dari Sumatera kembali lagi ke Kalimantan, kita jaga betul sampai dengan bulan September. Oleh karena itu sekali lagi kami mohon berkenan dukungan, mudah-mudahan bisa ditambahkan anggaran untuk 2020 dan daripada nanti kalau nggak kita minta ke BNPB atau keasosiasi karena diantara daerah-daerah ini juga ada yang daerah-daerah konsesi hutan, kebun dan lain-lain.

Bapak Pimpinan dan Ibu dan Bapak Anggota yang kami hormati.

Tentang TSL selanjutnya ada di halaman 146 dan seterusnya termasuk bagaimana untuk pengelolaan satwa dan serta peredaran dan kawasan dan lain-lain. Kami mohon izin juga melaporkan seperti dihalaman 162,164 dan seterusnya punya bahwa setelah kita mengikuti perkembangan kondisi COVID melalui agenda-agenda dan catatan dari Tim Gugus Tugas Nasional, ini kita masuk di halaman 164 sekarang. Maka kami bersama, kami mendukung Kementerian Pariwisata bahwa kita sudah bisa mulai membuka secara bertahap kawasan wisata yang bisa dibuka dengan ekstra ketat dengan protokol COVID. Beberapa kawasan yang dibuka dan Sumatera Selatan yang di Puntikayu kemarin sudah mau dibuka tapi ternyata belum mendukung ininya, tetapi kita akan ikuti terus hari perhari, sebab data dari Gugus Tugas Nasional itu juga sangat dinamis. Jadi kalau dia sudah, wilayahnya sudah kuning, jangan merah, jangan orange, apalagi merah itu nggak boleh tapi begitu sudah kuning, hijau itu bisa jalan. Tapi ternyata Puntikayu nih memang yang diminati masyarakat untuk masyarakat bisa melakukan rekreasi begitu.

Angke, Kapuk sudah bisa, Kepulauan Seribu, Halimun Salak, Papandayan, Tangkuban Perahu ini yang pengunjungnya juga sangat banyak sudah bisa, juga di Jawa Tengah di Wonosobo, juga di Grojogan Sewu Karanganyar, maupun di Merapi di Banyuwangi udah bisa, kemudian Kalimantan Timur juga kemudian Sulawesi Selatan Maros yang Bantimurung kupu-kupu sedang kita ikuti juga perkembangannya, sebagian sudah dibuka

oleh Pak Bupati di Maros tapi sedang di saya minta Pak Dirjen untuk ikuti perkembangan karena jangan sampai jadi berbahaya, kemudian di NTT semua udah bisa dilakukan, yang di Bali Barat ini semua akan kita ikuti terus sampai dengan pertengahan Juli. Jadi kalau dia ini ada yang sudah bisa dibuka tapi khusus Bali baru di bulan Juli.

Bapak Pimpinan yang terakhir, izinkan saya melaporkan terkait dengan gambut. Di halaman 179 kaitannya dengan yang Kalimantan Tengah Pak Ketua sejarah PLG kita bisa lihat di halaman 180, itu mulai tahun 95. Sebetulnya planningnya dari sebelumnya dari tahun 92, ini ada semua langkah-langkahnya. Kalau kita lihat hits-nya gambutnya mulai rusak ditahun 97 ketahuan kebakaran hebat setelah ada konstruksi kanal salurannya utamanya pada tahun 95, 96. Kemudian tahun 97, Pemerintah mengeluarkan Inpres lalu 98 keluar *masterplan* baru di tahun 2014, 2015 kita mengalami hal yang sangat dahsyat yaitu kebakaran terus di *screen* berikutnya kebakaran dahsyat di 2015 lalu keluarlah berbagai peraturan dan juga hal-hal di lapangan yang kita ikuti dengan sebaik-baiknya.

Jadi kalau kita lihat hutan sosial masuk, kemudian sistem pemantauan gambut masuk, kemudian restorasi ekosistem, *blocking kanal* dan lain-lain kita masuk ke sana. Kemudian kalau kita lihat peta fungsi ekosistem gambut di eks PLG di Kalimantan Tengah itu ada 1,4 fungsi lindung dan sebagainya, mohon periksa pada halaman 182 dan masuk ke *screen* di halaman 194. Nah ini kalau kita lihat kalau disebut-sebut ada *food estate* Pak Ketua, jadi sebetulnya itu maksudnya adalah bagaimana Pemerintah dengan proyeksi perkiraan kesulitan, kerawanan pangan itu bisa melakukan penyiapan kawasan tapi kawasan yang harus aman dari persoalan kendala gambut dari persoalan hutan primer. Oleh karena itu harus ada instrumen-instrumen yang tepat misalnya teknologi investasi regulasi maupun *governance*-nya sekarang.

Coba liat sejarahnya sejarahnya PLG terus, terus ini satelit dari tahun 97 kami teliti terus tiap tahun kondisi setiap tahun dari 97, 98, terus sampai tahun 2013-2014, terus ini ini ada serie satelitnya puluhan tahun kemudian kalau kita lihat analisis kerusakan gambutnya itu dari tahun ketahun itu sejak 97 Pak Ketua totalnya itu yang rusak berat kira-kira 31.000 hektar. Kenapa rusak berat? karena kubah gambutnya di bagian utara, dibagian atas dari bentuk itu, digambar kami ada yang di lingkaran-lingkaran itu, lingkaran 3 itu yang bagian utaranya itu dia kena sodet kubahnya, kubah yang jadi sumber airnya itu kena sodet. Kita sudah teliti itu ternyata itu sudah subsiden kira-kira 3 meter, ada di bagian-bagian yang tertentu juga sampai 8 meter 7 meter.

Nah dia subsiden tapi sebetulnya bisa direhab, jadi artinya bisa dibahasin, jadi kalau perlu ditanamin lagi. Jadi kerusakan gambut runtuh karena kubah gambutnya kena, jadi airnya keluar dari tempat kubahnya itu sehingga jadi turun dia subsiden dan kemudian rusak seperti permanen 23-31.000. Kemudian dari tahun 2017 kita kelola, ada swasta juga di Kalimantan Tengah sana yang kita wajibkan untuk melakukan rehab, ternyata bisa Pak Ketua 47.000 hektar bisa direhab oleh swasta tapi memang kita injak kaki

banget. Kalau dia enggak rehab, dia kena sanksi administratif begitu selama tahun 2016 sampai dengan terakhir KLHK melakukan itu.

Nah setelah kami meneliti kemarin mendapat tugas untuk KLHS terus, terus ini daya dukungnya itu kelihatan. Jadi ada yang sangat rendah memang, ada yang rendah, ada yang sedang, tinggi, nah tinggi. Jadi ada daya dukung yang bisa dibaca terus, terus nah ini ada kinerja jasa lingkungannya yang bisa berlangsung dan sekarang ini dari kita dapat peta-peta leadernya dari BRG ya? terus, terus yang ini terus, terus, terus, ini peta-peta leader yang dimiliki BRG, kita sama-sama lakukan analisis dan ternyata kita bisa baca balik terus. Kita bisa baca daerah-daerah yang kubah gambut, nah ini dia datanya.

Jadi yang kuning-kuning di tepinya garis merah itu adalah kubah-kubah gambut yang sangat sensitif, dia enggak boleh kesenggol, dan enggak boleh diapa-apain. Kalau kita lihat yang paling atas itu dia kesoded garis lurus, itu karena kesoded saluran pada saat PU tahun 96 melakukan pembangunan, makanya terjadi kerusakan dan lalu seperti seolah-olah PLG itu neraka gitu, kira-kira pada waktu itu. Nah ini ternyata setelah kita ikuti akibat dari kebakaran dahsyat 2015, kita ikuti terus, kita teliti, kita mapping ternyata bisa diperbaiki itu datanya. Jadi puncak kubahnya kesodet itu yang putih-putih sebelah kanan di lingkaran, itu adalah saluran, itu di bawah adalah peta radarnya.

Jadi dengan demikian pada dasarnya dari terus, dari studi ke studi ada area memang yang cukup bisa dikelola secara baik tinggal nanti kita harus kontrol Pak Ketua, kalau perlu apa kita buat tim kerjanya aja untuk mengawasi hal seperti ini begitu. Terus ini hasil AMDAL tahun 97, ini masterplan yang tahun 2007-2008 terus, jadi ini memberikan ruang 478.000, ada yang tadi 600.000, ada yang di AMDAL 578.000. Terus jadi bukan sesuatu yang buruk juga, asalkan kita kontrol gambutnya, ini peluang dari RTRW-nya Kalteng 655.000, terus, terus ini dari RKTN.

Pak Ketua saya mohon izin, mungkin ini terkait dengan pertanian dan PU. Tugas kami adalah menjaga bahwa daya dukungnya memenuhi dan menurut rencana yang sudah Kami ikuti diskusi antara Pertanian, PU, Kemenko Perekonomian bahwa disana itu memang sudah ada real RS sudah ada bukan areal, bangunan bangunan irigasi ini sudah yang kuning-kuning ini, gambut yang sangat tipis. Barangkali paling tebal $\frac{1}{2}$ meter dan itu mungkin bukan gambut, jadi metamorfosis antara aluvial karena proses yang mungkin ratusan ribu tahun atau jutaan tahun sehingga dia seolah gambut padahal dia aluvial begitu dan sudah terbagi menurut *masterplan*-nya PU di tahun-tahun, mungkin lama sekali terbagi kedalam lebih dari 30 daerah irigasi.

Pak Ketua kalau kita bilang daerah irigasi misalnya Way Rar, Way Jepara, Way Kandis itu daerah irigasi. Dia sudah punya *planning* itu dan sebagian daerah *koming*, daerah irigasi *koming* misalnya itu udah terbagi, sudah ada sebagian alur-alur apa namanya saluran-saluran irigasi nya yang lama dan sudah ada transmigrasi dan lain-lain. Oleh karena itu KLHK

menjaga pada kondisi-kondisi, pertama harus rehabilitasi gambutnya. Yang kedua, jaga daya dukungnya. Yang ketiga, jaga konservasi yaitu habitat orangutan atau bekantan atau satwa yang lain.

Jadi ini harus paralel Pak Darori yang terhormat, jadi kalau nggak kita jadi palang pintu juga untuk hati-hati dan dalam kaitan ini terus, maka terus, maka kalau kita lihat daerah ini, itu yang hijau yang di biru-biru itu adalah area yang sangat subur mengikuti lembah sungai dan itu dihuni oleh orang-orang lokal, masyarakat adat dan lain-lain. Oleh karena itu ngeberesin PLG itu enggak cukup hanya soal irigasi dan tani saja tapi keseluruhan termasuk masyarakat adat termasuk wilayah- wilayah.

Oleh karena itu zona *planning* ini dan orientasi pembangunannya ke depan bila perlu karena Komisi IV ini adalah Komisi Lingkungan dan Kehutanan, kita bisa ikuti iya ini bersama-sama Pak Ketua dan untuk itu kami juga terus, kami juga sudah bersaran di jajaran Kementerian bahwa untuk reposisi eks PLG ini harus hati-hati soal hutan, gambut, kewilayahan, SDM dan teknologi, jadi ada orientasinya. Oleh karena itu saya kira kami mengusulkan untuk kita mengikuti ini dengan sebaik-baiknya, sambil terus mengawasi pada aspek lingkungan.

Pak Ketua. kalau diizinkan saya ingin mengakhiri sampai sini dulu dan sambil nanti mendapatkan catatan dan pandangan-pandangan konstruktif dari Bapak, Ibu Anggota yang kami hormati.

Terima kasih kurang lebihnya mohon maaf.

Wassalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Ibu Menteri sebelum ke Anggota ada beberapa hal yang saya ingatkan. Rapat terakhir dengan Kementerian Pertanian, Kementan akan meningkatkan untuk tanaman padi di wilayah Kalimantan Tengah kurang lebih 165.000 dan berita yang saya dapatkan dari media bahwa perintah Presiden untuk ke BUMN. Permasalahannya adalah kemarin saya sudah rapat seminar dengan IPB mereka mengatakan para pakar pertanian, Rektor dan lain-lain mengatakan maksimum dengan teknologi yang ada sekarang, 1 hektar hanya menghasilkan 2 ton, itupun awalnya tidak mungkin. Kalau BUMN yang mengerjakan, apakah BUMN mau rugi terus begitu? bagaimana menanggung beban utangnya, kerugiannya? karena saya masih ingat 9 tahun lalu, 10 tahun yang lalu Kementerian Pertanian juga membuka MIFEE (Merauke *Integrated Food Estate and Energy Estate*) *wasallam*. Udah ada studi kelayakan, segala macam, segala macam hilang tertelan angin, saya juga tidak mau hal ini terjadi di Kalimantan Tengah karena saya yakin kalau BUMN juga yang mengerjakan belum tentu tahan menanggung beban kerugian.

Contoh beberapa tahun lalu Pemerintah agak panik nampaknya. Diperiode yang lalu begitu kekurangan sapi, semua PTPN wajib integrasi sawit-sapi tapi *Alhamdulillah* sampai sekarang satu ekor pun tidak ada sapinya. Begitu pula waktu itu Presiden yang periode yang lalu, zaman Pak SBY kalau tidak salah PT Pupuk Indonesia diminta untuk membeli, menjajaki, membeli ternak lahan peternakan sapi di Australia. Kalau enggak salah waktu itu direktur utamanya yang sekarang menjadi Menteri ESDM, hanya wacana saja tetap tidak jadi.

Maka saya minta untuk membuka lahan yang 165.000 hektar ini harus benar-benar dikaji ulang. Dalam beberapa kesempatan saya meminta kepada Pemerintah, kenapa tidak menggunakan lahan-lahan tidur yang selama ini statusnya tidak jelas milik PTPN VIII, IX, X; Banten, Jawa Tengah, Jawa Timur untuk Pulau Jawa, begitu juga Perhutani kan banyak juga mungkin yang 50, 60 ribu hektar ada lokasinya terbengkalai, tidak jelas statusnya, dibidang milik Perhutani tetapi digarap oleh orang lain tanpa kejelasan. Begitu juga dengan Inhutani di luar Pulau Jawa kenapa enggak itu dulu yang digunakan? apa mungkin Pemerintah turun tangan langsung membangun, mencetak sawah 165.000 hektar di Kalimantan Tengah. Bibit yang digunakan cocok tidak? itu masalah cetak sawah.

Ibu Menteri belum lama ini Bupati Pesisir Barat akan membuka jalan; jalan akses, jalan umum di Kawasan Taman Nasional Bukit Barisan Selatan. Saya sudah WA Sekjen, saya sudah WA Dirjen KSDAE untuk mencermati itu? apakah boleh Taman Nasional Bukit Barisan Selatan bukan hanya milik Indonesia tetapi itu milik dunia, kalau sampai terjadi itu dibuka jalan, saya yang akan pertama kali menuntut karena masalah hutan. Saya sangat setuju sekali apalagi di Lampung kalau bicara Undang-undang minimal harus 30% huta, nyatanya di Lampung sudah *Alhamdulillah* kalau ada 10%.

Saya minta juga di 2021 Ibu Menteri bentuk dalam hal ini saya sudah ngomong 4, 5 kali bahkan 4, 5 kali APBN, tolong bantu! tolong bantu pengadaan baik itu mobil patroli maupun *speed boat* di untuk Taman Nasional Bukit Barisan Selatan karena saya melihatnya kondisinya sangat memprihatinkan bicara Taman Nasional, maling kayunya terlalu banyak karena apa? iya tadi itu sarana prasarannya tidak ada. Ini saya tidak bicara masalah dapil saya bu tetapi sayakan sering ke sana melihat, mereka selalu ngeluh pak bagaimana mau patroli laut Pak? kalau hanya *speed boat*-nya aja tidak ada. Saran saya bu kalau beli *speed boat* itu beli lah yang paling bagus supaya awet dan tahan lama, juga kalau perlu Kepala Tamannya harus tanda tangan, harus bertanggung jawab. Jangan udah dikasih seenak-enaknya saja, tidak bertanggung jawab. Ini yang menjadi perhatian saya untuk masalah hutang.

Terima kasih Ibu Menteri atas penjelasannya yang telah sampaikan, selanjutnya kami persilahkan kepada Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia untuk mengajukan pertanyaan dan tanggapannya, kami persilahkan Yang pertama Profesor Doktor Hermanto, silakan.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Bismillaahirrahmaanirrahiim.

Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Pak Ketua, Pimpinan, Anggota dan Ibu Menteri bersama jajaran.

Pertama saya menyampaikan *Minal aidin wal faidzin taqabbalallahu minna wa minkum* pada semua yang hadir termasuk Ibu Menteri dan semua jajaran.

Baik Ibu Menteri dan Pimpinan, saya pertama sebenarnya memberikan apresiasi kepada Ibu Menteri terutama terkait dengan persoalan penyajian dari paparan yang sudah disampaikan dan khusus dokumen yang disampaikan ini cukup komprehensif, sistematis dan jelas *roadmap*-nya dan juga bahannya sangat *lux* sekali. Kalau Kementerian lain bahannya nggak se-*lux* ini.

Kemudian saya juga masuk pada persoalan yang kedua yaitu Ibu Menteri tadi menyampaikan persoalan deforestasi ini adalah persoalan kehutanan kita ya, saya membayangkan hutan kita ini semakin hari semakin menyempit ruang lingkup habitat untuk kehidupan ekosistem yang hidup dalam hutan itu juga semakin menyempit dan juga semakin berkurang dan hampir ratusan hektar iya, kita itu setiap tahun kehilangan hutan, ini persoalan mendasar buat kita. Nah sementara Indonesia ini adalah negara yang dianggap sebagai paru-paru dunia, jadi ini adalah inti pokok dari persoalan hutan kita.

Nah tentunya saya sering ya mau masuk hutan-hutan di Sumatera Barat itu sampai ke pusat-pusat, karena memang demi untuk membantu Ibu menteri sebenarnya dan saya juga sering berkomunikasi dengan Ibu Menteri terkait dengan keadaan hutan di Sumatera Barat.

Nah saya menyaksikan sekali bahwa hutan kita secara keseluruhan umumnya itu mengalami deportasi yang sangat luar biasa dan itu karena disebabkan oleh *illegal logging* yang Ibu Menteri juga sudah sampaikan tadi dan juga kita menyaksikan *illegal logging* ini seperti apa penanganannya? sekarang sangat canggih Ibu Menteri, iya kalau dulu truk-truk yang keluar dari hutan itu terbuka, nampak sekali dia bawa batang-batang yang dipotong itu berdiameter yang 1 meter, 2 meter itu kelihatan gitu, menariknya pun juga kelihatan, lewat lalu lalang pun juga kelihatan. Sekarang kita menyaksikan truk-truk itu terbungkus Ibu Menteri di dalam satu kontainer. Nah ini sulit untuk kita memantaunya dan praktis kan semua itu tersimpan dan terbungkus sangat baik tapi tiba-tiba kita menyaksikan hutan kita sudah gundul. Nah saya tidak tahu apa cara kita untuk melakukan pengawasan terhadap tindakan-tindakan *illegal logging* seperti ini. Nah ini sebenarnya yang patut kita curigai karena kita di masyarakat pun juga agak kesulitan untuk misalnya menghambat.

Pada tahun-tahun sebelumnya itu di Sumatera Barat ini daerah-daerah perbatasan Sumbar dengan Riau itu terbuka sekaligus, mencolok sekali truk-truk itu keluar dari hutan bawa dan bahkan berendeng-rendeng membawa hasil kayu itu, nah ini peringatan buat kita ya. Saya minta supaya *illegal logging* ini betul-betul dilakukan tindakan yang tegas, kemudian juga inikan akibatnya terjadi penyempitan hutan. Penyempitan hutan ini ya akibatnya kita makhluk-makhluk yang hidup di tengah hutan itupun juga akhirnya ada spesies yang sudah hilang, punah, kan ada juga sebagian yang dilindungi itupun juga mengalami tingkat kepunahan yang derajatnya sangat tinggi juga dan akibatnya makhluk itu pun juga memasuki perkampungan dan perumahan penduduk yang akhirnya ini sudah berhadap-hadapan antara manusia dengan hewan-hewan buas yang dilindungi dan hewan yang langka ini dan kita juga menyaksikan ini perburuan hewan-hewan langka pun juga sungguh luar biasa Ibu Menteri.

Nah di tengah keadaan kondisi hutan kita seperti itu, kita menghadapi dilema yaitu SDM kita sangat terbatas kemudian anggaran juga terbatas. Nah saya sangat mencermati strategi Ibu Menteri ini cukup bagus tapi kalau dua hal ini tidak ditopang dengan baik, saya pikir apa yang tertulis di dalam buku ini saya khawatir tidak terwujud sesuai dengan target. Nah jadi ini saya minta supaya apa yang menjadi target penambahan anggaran oleh menteri, ini betul-betul Komisi IV DPR RI mendukung tapi tergantung Ibu Menteri juga dengan rapat disananya Ibu Menteri.

KETUA RAPAT (SLAMET ARIYADI, S.Psi.):

Mungkin cukup Pak Hermanto, mungkin cukup? lebih 3 menit ini waktunya Pak Hermanto. Baik kita tambah 1 menit lagi.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Nah itu satu ya Ibu Menteri, yang kedua kami ini Anggota diminta memberikan sambutan online di pelatihan online. Kami tidak tahu perkembangannya seperti apa? dan kami juga tidak diberitahu kapan itu terjadinya pelatihan itu dan dimana pelatihannya? tapi kami ini Anggota sudah memberikan statement ya kan? nah ini perlu juga mendapat penjelasan. Yang ketiga ini ada program-program penyerahan bantuan APD ke rumah sakit-rumah sakit dan segala macam itu. Secara formal itu sudah diserahkan simbolisnya tapi barangnya belum kita saksikan, apakah itu sudah hanya simbolnya saja atau bagaimana begitu? nah kita juga ditanya oleh masyarakat Ibu Menteri, mohon ini juga penjelasan

KETUA RAPAT:

Pak Hermanto, mungkin nanti biar dijelaskan terkait masalah bantuan itu Pak Hermanto.

F-PKS (Dr. HERMANTO, S.E., M.M.):

Sedikit saja, nah ini sangat substansi buat kita yang kita tanyakan. Ini persoalan kita Ibu Menteri ya, ini belum 3 menit. Baik itu saja Ibu Menteri, ini sebenarnya hak DPR itu tidak boleh diikat dengan aturan iya Pak Ketua ya? karena hak Anggota itu sudah jelas harus bicara, demikian.

Wassalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Iya terima kasih Bapak Hermanto, selanjutnya Bapak Muslim dari Demokrat dan persiapan Bapak Slamet dari PKS. Mohon singkat dan padat Bapak Muslim.

F-PD (MUSLIM, S.HI., M.M.):

Terima kasih.

Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Pimpinan dan Teman-teman Anggota Komisi IV DPR RI, Ibu Menteri beserta jajarannya.

Pertama tentunya paparan Ibu Menteri berkaitan dengan kinerja anggaran, tentu saya memberikan apresiasi Ibu Menteri ya mencapai 96% sampai pikir ini sudah Paripurna lah ya. Namun demikian tentu kita mengingatkan kembali bahwa prestasi yang baik ini tetap terus dipertahankan jadi sehingga untuk laporan BPK semester kedua nanti kita harapkan tidak ada lagi temuan-temuan berikutnya iya Bu Menteri ya.

Kemudian terkait laporan BPK semester ke-2 2019, kita tahu betul dimana kawasan hutan kita sekitar 350.000 hektar dan juga kawasan gambut sekitar 345.000 hektar, ini tanpa izin. Ini merupakan indikasi bahwa betapa pihak korporasi ya dan modal besar yang mudah menyelewengkan penggunaan lahan tersebut. Ini tentu kita berharap dari Kementerian KLHK ini juga harus ada tindakan tegas. Kita tahu betul berkaitan dengan perizinan dan lain-lain.

Kemudian yang ketiga kita lihat juga berkaitan dengan realisasi program perhutanan sosial Ibu Menteri. Tadi udah disampaikan Ibu Menteri dari 12,7 juta, itu baru terealisasi sekitar 32% yaitu sekitar 4,1 juta. Kalau kita melihat dalam konteks ini, ini sangat masyarakat ini sangat berharap betul dalam konteks prestasi perhutanan sosial ini. Kita harapkan juga berkaitan reformasi agraria ini bisa segera dilanjutkan untuk digenjut bisa terlaksana.

Terakhir berkaitan juga dengan Karhutla ya, kita tahu betul di bulan Agustus dan September ini, ini kan juga akan terjadi kemarau panjang. Ini tentu harus ada langkah-langkah konkrit dari Ibu Menteri berkaitan juga

menghadapi bencana apalagi ini bukan hanya persoalan Karhutla juga Ibu Menteri, persoalan juga masalah pangan ketahanan pangan, kita juga luar biasa.

Terakhir mungkin berkaitan dengan tadi *illegal logging* ya, waktu itu sudah saya sampaikan ke Ibu Menteri kita tahu betul hampir sebagian besar wilayah Indonesia menjadi problem. Saya belum melihat ini beberapa kali pertemuan langkah-langkah konkrit termasuk juga polisi hutan dan lain-lain, saya pikir ini juga harus ditambahkan, apakah solusinya? kalau ini terus dibiarkan, terus terang Ibu Menteri ini terus terang banyak sekali penyelewengan.

Saya tidak menuduh siapa di sini, tapi kita tahu betul bahwa *illegal logging* ini pasti di *backup* oleh pihak-pihak tertentu dan ini terus terjadi di mana-mana. Memang diluar bagus, kita lihat misal di tempat saya Ibu Menteri, di Aceh itu begitu diluar itu bagus sekali hutan tapi begitu masuk ketengah itu, itu udah kosong bahkan beberapa ada anak aktivis mahasiswa yang masuk mereka malah diancam, jangan mendekati ke situ. Hal-hal seperti ini perlu disampaikan Pak Menteri, kalau bila perlu ada rapat koordinasi dengan termasuk dengan TNI Polri, jadi supaya pembalakan hutan ini tidak terus terjadi. Yang kita harapkan kedepan nanti, jangan sampai di luar bagus dalamnya kosong. Ini mungkin menjadi catatan Ibu Menteri, mudah-mudahan menjadi perhatian khususnya Kementerian KLHK. Mungkin itu beberapa hal, terima kasih.

Wassalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum salam.

Terima kasih selanjutnya Bapak Slamet dari PKS, persiapan Mbak Vita Ervina.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Baik, terima kasih.

Bismillahirrahmanirrahim.

Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Pimpinan baik yang virtual maupun yang hadir.

Para Anggota Dewan yang saya hormati, Ibu Menteri, Pak Sekjen dan seluruh Jajaran Eselon 1 dan seluruh Jajaran di Kementerian LHK yang saya hormati.

Belum terlambat barangkali saya juga menyampaikan mohon maaf selama ini barangkali di masih walaupun syawalan sudah lewat "*minal aidzin*

wal faidzin” mudah-mudahan kita saling memaafkan, ada hal-hal yang kurang berkenan.

Beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama, terkait dengan dukungan, mohon dukungan terkait dengan penambahan anggaran. Saya pikir ini juga bagi saya secara pribadi ini menjadi penting untuk kemudian menjadi perhatian kita baik di 2021 yang sekitar Rp5 triliun dan juga 2020 Rp500 M tinggal kemudian kita optimalkan pengawasan dalam rangka kemudian terlaksananya program yang sangat baik apalagi kalau kita kaitkan di 2020 persiapan-persiapan Karhutla ini saya pikir menjadi penting untuk itu. Yang ini tentunya saya memberikan dukungan, mudah-mudahan tinggal kemudian pengawasan kita tingkatkan.

Yang berikutnya, Saya ingin mendapatkan gambaran terkait dengan evaluasi Ibu Menteri yang disini sampaikan sumbangan KLHK bagi PDB itu kan Rp104,1 miliar. Nah saya ingin mendapatkan itu target di 2019 itu berapa? jadi angka itu sehingga nanti kita akan tahu apakah angka itu besar atau kecil? mohon dikoreksi kalau saya salah. Kalau tidak salah di RPJMN itukan targetnya sudah sekitar 12,3% sehingga asumsinya ya dari 15,8 tim mungkin asumsi saya sekitar 0,65%. Ini catatan saya mohon di koreksi kalau salah.

Kemudian berikutnya terkait dengan Gakkum, beberapa waktu awal itu saya juga pernah menyampaikan terkait dengan putusan perdata yang terbesar, yang berhasil dilakukan oleh KLHK ini akan menjadi catatan sejarah kita, tetapi tentunya kita tidak ingin berhenti di situ, tetapi bagaimana eksekusi itu untuk kemudian seluruh *stakeholder* yang berkepentingan khususnya KLHK bisa terus mensupport sehingga eksekusi ini menjadi kenyataan karena dari Rp19,4 triliun kalau tidak salah kan baru Rp100 miliaran ya? sehingga ini kita berkepentingan dengan penegakan hukum ini tidak sekedar menjadi pemasukan negara tetapi bagaimana dengan kepastian hukum ini ada di negara kita sehingga seluruh yang ada akan taat azas dan taat hukum.

Saya juga menyoroti terkait dengan temuan BPK Ibu Menteri, temuan BPK disitu kalau tidak salah terkait dengan Kementerian Pertanian itu ada 180, salah satu perusahaan yang menggunakan kawasan hutan sekitar 349.000 hektar kemudian juga menggunakan 110 kawasan gambut. Nah ini saya ingin mendapatkan gambaran? yang jelas ini melanggar Undang-undang Kehutanan dan juga sekaligus juga PERMEN KLHK, nah ini bagaimana *follow up* itu?

Terakhir terkait dengan perhutanan sosial, jadi ada beberapa catatan minimal 2 dari saya, yang pertama, terkait dengan perolehan Bu, ini minimal saya cerita yang ada dikasus di Dapil saya, dimana suatu wilayah ketika saya reses kunjungan kepada Perhutani dan juga memang saya melihat sendiri bahwa penerima apa perhutanan sosial ini ternyata bukan masyarakat setempat. Jadi yang ada di daerah saya itu kebanyakan didapil saya Jawa Barat 4 Sukakota dan Kabupaten Sukabumi kebanyakan dari Bandung

sehingga disini justru menimbulkan sudah terjadi konflik antara masyarakat setempat dan juga penerima itu? nah ini tentunya menjadi perhatian kita semuanya sehingga dalam hal ini juga perlu menjaga penertiban.

Barangkali saya dari awal mengkhawatirkan kehutanan sosial itu ketika kemudian sudah menjadi hak milik pada akhirnya karena masyarakat itu butuh duit dijual kepada orang-orang yang punya duit, yang mohon maaf kemudian kepada korporasi Nah mungkin perlu dikaji apakah sebaiknya tidak berupa hak milik, tapi hak guna, ya sehingga dia tidak mempunyai hak untuk menjual tetapi menggunakan seumur hidup mereka. Saya pikir ini perlu dikaji oleh KLHK sehingga tujuan mulia awal perhutanan sosial ini tidak disalahartikan dan disalahgunakan oleh masyarakat kita yang notabene dia memang butuhnya uang cash untuk dikonsumsi. Jadi saya apresiasi bahwa program ini sangat luar biasa, sangat bermanfaat tetapi kita khawatir tujuan akhir dari ini disalahgunakan oleh penerima.

Barang kali itu Pimpinan dan Ibu Menteri yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, mohon maaf atas kekurangannya.

Wassalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Slamet selanjutnya Mbak Vita Ervina dan persiapan Mbak Luluk, terima kasih.

F-PDIP (VITA ERVINA, S.E., M.B.A.):

Koreksi nama pimpinan, Vita Ervina.

F-PKS (drh. H. SLAMET)

Maklum Mbak pimpinan baru dan bayang-bayang.

F-PDIP (VITA ERVINA, S.E., M.B.A.):

Terima kasih Pimpinan, Bu Menteri dan jajaran.
Dan seluruh Rekan Anggota Komisi IV yang saya cintai.

Memasuki era tatanan New Normal, semoga kita senantiasa sehat wa'alfiat. Pertama dalam kesempatan kali ini, saya terlebih dahulu mengucapkan terima kasih kepada KLHK terkait penanganan pandemic COVID didapat saya. Saya selama hampir 3 bulan, saya ingin cerita sudah menjangkau masyarakat didaerah pegunungan. Saya bekerja sama dengan Dirjen KSDAE melalui TNG Merbabu, saya melakukan baksos penyemprotan disinfektan dan penyampaian bantuan. Dampak COVID-19 di sana sangat luar biasa membantu masyarakat di pelosok melalui kendaraan operasionalnya, saya ucapkan terima kasih.

Kemudian Ibu Menteri, saya kemarin baru mendapatkan mengapresiasi materi 250 halaman kemarin yang baru saya terima luar biasa ini karena cukup memudahkan buat saya agak ini lumayan. Sebagai *new comer* ini memudahkan saya untuk memahami alur kerja yang runut di Kementerian. Masuk dalam materi tentu saya menyoroti banyaknya temuan-temuan di BPK adanya 17 kelemahan SPI dan 6 kelemahan di perundangan ini tentu kami sebagai Mitra dari KLHK berharap agar bisa memperbaiki kinerja kedepan dan bagaimana solusi konkret dari KLHK berkaitan dengan temuan-temuan yang selama ini terjadi? sehingga sepertinya perlu melakukan penyebaran teknologi internal yang lebih terintegrasi dan update knowledge terhadap perundang-undangan sehingga dalam pelaksanaannya para Eselon dan petugas di lapangan bisa mengerti benar aturan dan perundangan yang ada.

Kemudian yang kedua dalam menyikapi situasi pandemi COVID-19 ini memang jumlah yang terpapar semakin banyak, namun kita harus optimis tentunya yang sembuh juga semakin meningkat. Namun ini isu utama yang kita hadapi sekarang memang penanganan limbah infeksius COVID-19 yang terus bertambah, limbah B3 yang semakin meningkat jumlahnya, pertanyaan saya bagaimana kesiapan KLHK dalam menampung dan mengolah limbah COVID-19? ini agar diusahakan bisa memberikan tempat limbah secara merata terutama di daerah-daerah yang saat ini berada di zona merah. Untuk itu saya mendukung pembangunan fasilitas pengolahan limbah medis yang belum terakomodir di beberapa provinsi di tahun anggaran 2021.

Yang ketiga terkait dengan langkah pendampingan KUPS sebagai starter bisnis, saya sangat menyambut baik untuk itu diharapkan bisa juga dibantu dengan tenaga pendamping yang lebih mumpuni dan bisa berkelanjutan yang juga terhubung dengan jaringan di tingkat provinsi, tingkat nasional bahkan juga mancanegara sehingga bisa menghasilkan untuk *export* begitu sehingga KUPS yang sudah berkembang bisa diharapkan bisa memberikan penguatan kepada KUPS yang baru.

Mungkin itu dari saya, mungkin sedikit intermezzo yang tadi juga dari Pak Hermanto. Kemarin kami sudah web binar sosialisasi, saya di rumah sakit daerah merah putih Bu Menteri, Rumah Sakit Merah Putih itu merupakan rumah sakit yang baru dipercepat untuk khusus untuk penanganan COVID-19 sehingga memang sangat membutuhkan dukungan sarana prasarana untuk penanganan COVID-19, tinggal mohon untuk segera direalisasi, terima kasih.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Intrupsi sedikit.

Ketua saya mohon izin, ini ada sidang kabinet. Saya minta izin Pak Wamen keluar untuk mewakili saya di kabinet bersama Bapak Presiden, saya *stay* di Komisi IV DPR RI. Pak Wamen keluar.

KETUA RAPAT:

Oke siap.

Terima kasih.

Pertanyaan selanjutnya Mbak Luluk dan persiapan Kakanda Charles.

F-PKB (LULUK NURHAMIDAH, M.Si.):

Terima kasih Pimpinan dan Ibu Menteri dan semua jajaran yang hadir. Bapak, Ibu sekalian, Anggota Komisi IV DPR RI.

Ada beberapa hal yang ingin saya kasih tanggapan Ibu Menteri, yang pertama yang terkait dengan impor limbah dan sampah. Sebagaimana mungkin menjadi pengetahuan umum bahwa hampir 40 tahun kaitannya impor limbah dan sampah di Indonesia ini tidak pernah diselesaikan dengan baik. Ada persoalan di tahun 2018 misalnya ketika China sebagai negara pengimpor sampah terbesar dunia itu menghentikan impornya kemudian sasaran berikutnya adalah negara-negara di Asia Tenggara termasuk di Indonesia.

Tahun 2018 juga Malaysia itu karena kewalahan dengan adanya impor sampah/limbah ini kemudian mereka mencabut izin 114 perusahaan. Pertanyaan saya ibu dengan adanya skandal yang begitu besar yang dialami oleh Indonesia yang terkait dengan limbah sampah termasuk yang campuran dengan limbah B3 itu, ada berapa banyak perusahaan yang dicabut izin impornya? dan ini dikaitkan dengan rekomendasi yang dikeluarkan oleh KLHK untuk impor sampah kembali, apakah perusahaan-perusahaan yang ini bukan bagian dari perusahaan yang membuat masalah karena memang pihak kementerian tidak memberikan data perusahaan-perusahaan mana yang melakukan kejahatan dengan melakukan impor ilegal itu? atau yang sengaja mencampurkan dengan limbah B3 dan sebaliknya juga belum ada data 114 perusahaan yang akan dikasih rekomendasi itu yang seperti apa? kualifikasinya kayak apa? mereka sudah berapa lama punya izin operasi dan seterusnya. Kita khawatir ini nanti hanya topeng saja ibu, sebenarnya ini pemain-pemain lama saja, dia bisa kemudian mengurus izin baru dan seterusnya karena kemudahan-kemudahan itu.

Nah yang terkait dengan limbah ini saya sebenarnya menegaskan yang sudah disampaikan oleh Bapak Ketua, ini bukan hanya soal kita punya kebutuhan apa terhadap sampah ini. Rasa-rasanya ini kok malu ya karena Indonesia negara yang sebesar ini kemudian menjadi negara tujuan impor sampah begitu, apakah ini bukan dianggap sebagai bentuk dari kolonialisme baru cara-cara lain, industrinya dibangun dimana? sampahnya dibuang disini, itu kita yang sangat pilu saja ibu dan ga rela rasanya.

Nah pertanyaan yang berikutnya kalau dilihat dari kerugian akibat kegiatan yang ilegal ataupun yang legal tapi pada akhirnya kemudian itu ilegal

jadi kejahatan lingkungan ini berapa sih sebenarnya nilai kalau ini dinominalkan kejahatan lingkungan dan kemudian berapa nilai denda yang sudah pernah dikumpulkan oleh Pemerintah kita? imbang ga begitu? nah kalau kemudian tidak imbang, apa kemudian tidak ada semacam kemauan dan tekad yang kuat dari kita? ya sudah distop untuk apa? apa iya kita tidak punya bahan untuk kebutuhan industri? apa tidak cukup yang namanya sampah diproduksi di Indonesia? wong konon aja kita ini termasuk salah satu negara yang memproduksi sampah terbesar didunia juga. Kita ingat bagaimana perairan kita dan laut kita yang sudah dipenuhi oleh sampah-sampah plastik diantaranya juga limbah yang berbahaya. Jadi kaitannya ini sangat luas, termasuk juga menurunnya atau degradasi kelautan dan perikanan yang kemudian produktivitas ikan kita juga sangat menurun dengan tajam dibandingkan oleh negara-negara yang lain.

Nah yang berikutnya ibu, ibu tadi saya senang sekali sebenarnya karena dimateri yang ibu sampaikan, disini ada semacam komitmen yang terkait dengan keberlanjutan. Jadi berkelanjutan lingkungan hidup yang berkelanjutan tetapi disisi lain apakah ini kemudian tidak paradok kalau kemudian KLHK menjadi bagian yang tanda kutip ini katanya teman-teman sih, itu mendukung RUU *omnibus law* bu? sementara *omnibus law* ini sebenarnya sangat tidak mendukung keberlanjutan pembangunan yang berkelanjutan juga tidak, lingkungan yang berkelanjutan itu tidak nanti saya kira teman-teman semua bisa cek pasal per pasal.

KETUA RAPAT/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Mbak Luluk kalau masalah *omnibus law* nanti suruh Fraksi Mbak Luluk saja protes ke Baleg.

F-PKB (LULUK NURHAMIDAH, M.Si.):

Bukan bapak karena tadi saya melihat dari materi ibu itu sebenarnya sudah bagus, tetapi yang harus kita antisipasi bahwa konsekuensi ini yang akan dihadapi oleh kementerian ini akan sangat berat karena nyaris ini semua tidak akan pernah bisa berlaku lagi. Mulai dari perizinan yang sudah berbeda, sanksi yang sudah berbeda, penanganan limbah yang berbahaya itu juga berbeda apalagi kejahatan korporasi yang akan dihilangkan dengan adanya pasal-pasal itu. Nah bagaimana kemudian LHK dengan rencana-rencana yang hebatnya ini memposisikan diri apabila ini kemudian akan dihasilkan Undang-undang baru yang kita katakan akan melibas habis gitu loh Pak Ketua. Jadi saya kira ini saya butuh jawaban dari ibu terkait ini semua.

Yang terakhir sekali karena memang kerusakan hutan dan juga kasus pencurian kayu yang gak pernah bisa selesai dan ternyata dari waktu ke waktu juga semakin besar, saya hanya menegaskan yang sudah disampaikan oleh Pak Muslim, apakah memang instrumen penegakan hukum kita ini yang relatif lemah Ibu? pernahkah ada kajian bahwa sejak dicabutnya kewenangan menindak dari polusi hutan kemudian *deforestasi* itu justru meningkat tajam? jadi boleh disampaikan bahwa ada ternyata korelasi yang positif antara

kewenangan yang dicabut dengan kondisi kerusakan hutan yang semakin meningkat atau kemudian faktor-faktor yang lain yang mungkin ibu bisa disampaikan kepada kita.

Saya kira itu terima kasih dan saya tentu mendukung jika ada usulan dari ibu yang terkait dengan penambahan anggaran tetapi tentu panjang bahwa kita bertemu pada tataran misi untuk mewujudkan lingkungan hidup yang berkelanjutan, terima kasih.

Wassalam.

KETUA RAPAT:

Setahu saya kewenangan Polhut tidak dicabut sebagai PPNS ya tetap masih berlaku itu loh. Yang menindak juga termasuk tugasnya Polhut, contoh Kemarin kami di Batam dengan Polhut dan Dirjen Gakkum langsung saya minta segel, pelakunya ditangkap, langsung dibawa ke Jakarta, bisa eksekusi juga.

Selanjutnya Pak Charles Meikyansah, silakan.

F-NasDem (H. CHARLES MEIKYANSAH):

Terima kasih Ketua.

Pimpinan dan Ibu menteri yang kami hormati serta Bapak Sekjen dan Dirjen.

Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Selamat siang dan salam sejahtera.

Dalam forum Raker ini pertama ucapan apresiasi terhadap laporan kinerja berdasarkan anggaran tahun 2019 yang sudah mencapai 96,16% semoga tahun 2020 yang sedang apa berjalan ini juga lebih optimal lagi ibu karena mengingat serapan anggaran pada tahun 2020 ini baru berkisar 27,61% sedangkan kita masih ada tinggal 6 bulan kedepan. Kemudian dukungan juga kami berikan kepada Kementerian Lingkungan Hidup untuk penambahan pagu indikatif kementerian tahun 2021, kami memberi catatan terutama untuk bidang pencegahan Karhutla, penanggulangan juga Karhutla dan yang terakhir dukungan soal ketahanan pangan tahun 2021 ibu, itu catatan kami yang penting terhadap penambahan pagu indikatif Kementerian LHK tahun 2021.

Kemudian yang lain ibu, beberapa pertanyaan kami yang menurut kami cukup penting soal indeks kualitas lingkungan hidup ibu, kami melihat antara 2019 dengan 2018 mengalami penurunan. Kalau di 2018 71,67 tapi sekarang menjadi di 2019 ini tinggal 66,55% ibu. Pertanyaan kami yang penting adalah mengapa terjadi penurunan indeks kualitas lingkungan hidup pada tahun 2019 dibandingkan dengan tahun 2018? itu yang pertama.

Yang kedua yang tidak kalah pentingnya yang ingin kami tanyakan soal pengelolaan limbah bahan beracun dan berbahaya B3 ibu, mengingat sebuah laporan investigasi dari Majalah Tempo tanggal 18 Januari 2020 menyebutkan adanya praktik pengelolaan limbah B3 yang tidak sesuai dengan prosedur ibu. Disebutkan bahwa limbah medis berupa kantong bekas, wadah infus diperjualbelikan dari rumah sakit dengan harga kiloan. Tentunya ada peringatan agar hal serupa tidak boleh terjadi ibu, apalagi mengingat betapa berbahayanya COVID-19 terhadap manusia yang menular dengan cepat. Saya ingin pertanyaan kepada ibu, kita juga tahu di Pulau Jawa limbah infeksius itu jumlahnya mencapai 478,18 ton hingga 8 Juni 2020.

Saya ingin menanyakan bagaimana pengawasan baik monitoring maupun evaluasi dari KLHK untuk memastikan pengelolaan limbah infeksius atau B3 ini dijalankan dengan baik dan sesuai dengan prosedur? tadi beberapa hal ibu sudah menyampaikan, saya ingin tahu juga beberapa provinsi yang belum kooperatif ini apa langkah-langkah yang lebih tegas yang akan dilakukan oleh Kementerian LHK terkait itu?

Terakhir soal kebakaran lahan gambut, kami memberikan apresiasi Pemerintah telah menetapkan status siaga darurat dini api hingga 9 bulan dimulai dari Februari hingga Oktober 2020 ibu. Tentu ini langkah antisipatif yang baik untuk terus memonitoring agar bencana kebakaran lahan gambut tidak menjadi masalah tahunan yang terus mengancam kita, perlu dilakukan langkah-langkah yang lebih integratif untuk mempercepat restorasi lahan gambut dan tentunya integrasi restorasi pemulihan lahan gambut harus berbasiskan ekosistem gambut agar pemuda lebih cepat dan optimal. Pertanyaan yang kami ingin sampaikan ibu, bagaimana potensi kebakaran lahan dan gambut yang mungkin akan kembali terjadi? beberapa laporan kemarin di media kami lihat dan kami mengapresiasi dan kemudian juga terus memberikan dukungan agar upaya-upaya ini memang harus merupakan kerja sama yang penting baik dari Kementerian Lingkungan Hidup baik dari Pemerintah Provinsi, Kabupaten dan tentunya juga pihak-pihak terkait lainnya baik Kepolisian, Tentara dan lain-lain. Saya pikir itu yang perlu saya sampaikan, materi-materi yang ibu sampaikan kepada kami sama yang tadi disampaikan beberapa rekan sebelumnya sangat membantu Kami memahami apa yang akan ibu lakukan baik di tahun 2020 maupun langkah-langkah yang akan disampaikan ibu untuk di 2021. Terima kasih Pimpinan.

Wabillahitaufiq walhidayah.

Wassalamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih selanjutnya Pak Suhardi Duka.

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Yang saya hormati Ketua, rekan-rekan Anggota Dewan yang terhormat,
Saya hormati Ibu Menteri bersama dengan seluruh jajarannya.

Realisasi anggaran 2020, 27% saya kira ini sudah bulan Juni ya barangkali perlu dipacu bu sehingga tidak keteteran di akhir tahun. Yang kedua SKB impor limbah sampah non B3, toleransi 2% saya kira semua teman mengkritisi. Saya juga tidak percaya ini adalah kepentingan korporasi, *kongkalikong* ini, bagaimana wibawa negara kita di satu sisi kita tidak berpihak kepada pemulung yang kecil-kecil mengumpulkan sampah, membersihkan kemudian kita biarkan demi untuk kepentingan korporasi yang importirnya yang mengimpor sampah, toleransi 2% bisa 5% sepanjang tebal dia punya sogokan kepada pejabat. Nah ini tidak ada teknologi yang mendeteksi berapa persen, katakanlah 1000 sekian kontainer mau diperiksa semua secara manual omong kosong dan tidak benar.

Jadi menurut saya ini kajian akademiknya apa sehingga mengeluarkan SKB semacam seperti ini? mungkin saja LHK tidak mau dikritik sendiri, akhirnya melibatkan Kementerian Perdagangan, melibatkan lembaga yang lain sehingga lebih kuat kekuatan korporasi yang menangani ini, itu yang pertama. Yang kedua pagu indikatif, saya kira kita juga support ibu karena kerja kinerjanya bagus. Hanya saja dengan Rp7,5 triliun saya kira kita semua di Komisi IV DPR RI perlu sehingga dengan demikian lebih luas cakupan yang akan ditangani nantinya utamanya dalam rangka penyelamatan hutan dan pemanfaatan hutan, utamanya masyarakat yang disekitar hutan.

Saya sedikit mengkritisi mengenai *re-design* program Kementerian LHK 2021 dari 13 program prioritas menjadi tinggal 6, walaupun secara rinci 6 program ini saya tidak baca secara mendalam tapi ada hal-hal yang penting, yang barangkali hilang, utamanya adalah penegakan hukum. Penegakan hukum ini banyak sekarang pelanggaran terhadap lingkungan ini tidak dijangkau oleh KLHK. Pada beberapa rapat yang lalu, saya menyampaikan bahwa ada PKS yang tidak mengelola limbahnya tapi tidak pernah KLHK melakukan peninjauan terhadap PKS itu. Lapornya sudah kasih masuk, laporan masyarakatnya sudah kasih masuk tapi tidak pernah. Ini mencemari lingkungan karena tidak dikelola limbahnya, langsung dibuang kesungai akhirnya tambak-tambak itu menjadi tidak berfungsi.

KETUA RAPAT:

Pak Suhardi Duka, kalau boleh ya PKS yang dimana?

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

PKS-nya yang di Kabupaten Pasangkayu Kecamatan Bambalamotu dan Kecamatan Karossa Kabupaten Mamuju Tengah.

KETUA RAPAT:

Saya minta Bu Dirjen dan Gakkum segera datanya disiapkan Pak.

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Sudah saya kasih datanya pak.

KETUA RAPAT:

Kalau begitu segera ditindak lanjutin, kalau perlu rekomendasi.

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Terima kasih Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Limbahnya tidak benar, iya ditutup aja dulu sampai limbahnya menjadi baik. Karena tidak mau saya sampai pencemaran Sungai, iya Pak Suhardi. Jadi saya minta Rapat Kerja yang akan datang sudah ada progress laporannya, begitukan Pak Suhardi?

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Siap Ketua.

KETUA RAPAT:

Lanjut.

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Iya selanjutnya dalam rangka penanganan COVID ini, 2021 anggaran Covid itu terserah 905 triliun. Saya kira ini menyedot semua anggaran kementerian lembaga, jadi memang akhirnya ketahanan pangan menjadi bagian yang tidak prioritas. Nah kita dari Komisi IV DPR RI ini punya sinkronisasi yang bagus harusnya terhadap ketahanan pangan. Saya tadi Ibu Menteri sudah menyampaikan bahwa hal-hal yang penting seperti terhadap area jagung, padi ladang atau PAJALE ini tetap menjadi prioritas didalam anggaran 2021 dalam rangka mendukung ketahanan pangan.

Yang terakhir Ibu Menteri adalah ada yang memiliki sertifikat hak milik masyarakat tapi tiba-tiba menjadi kawasan hutan. Saya kira ini perlu diatur atau disikapi secara bijaksana oleh KLHK, kasihan masyarakat sudah punya kebun kemudian punya sertifikat, kemudian tetap menjadi kawasan hutan. Sertifikatnya Ibu Menteri sudah kasih beberapa waktu yang lalu, ada fotonya saya. Saya kira juga ini baru sampai sekarang masyarakatnya tanya-tanya setiap saya reses ada yang lanjutnya Pak? saya bilang sudah tak kasih

menteri, hanya saya tidak tahu apa yang akan dilakukan menteri? Iya ibu ya, saya kira itu terima kasih. Siap kami *support* ibu dan semua Dirjen agar Kementerian KLHK tetap menjadi mitra yang baik terhadap Komisi IV DPR RI.

*Wallohul Muwafiq ila aqwamith Thariq
Wassalaamu'alaikum warahmatullaahi barakaatuh.*

KETUA RAPAT :

Wa'alaikum salam.

Selanjutnya Ibu Nuraini setelah itu Kanjeng, setelah Kanjeng Dirjen. Saya minta persetujuan untuk kita *break* dulu, isoma, 13.30 WIB kembali lagi. Silakan Ibu Nurani.

F-PD (Hj. NUR'AENI S.Sos., M.Si.):

Baik terima kasih Pak Ketua.

Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Selamat pagi
Salam sejahtera bagi kita semuanya.

Ketua Komisi beserta jajaran yang saya hormati,
Ibu menteri beserta para dirjen yang saya hormati.

langsung saya mencoba untuk bisa mengevaluasi kaitan dengan LHP BPK ya?. Sebelumnya memberikan apresiasi atas pencapaian dari realisasi 96% dari sisi mungkin beberapa masalah yang disampaikan kaitan dengan pengendalian internal maupun kurang bayar yang harus memang dilakukan. Saya mencoba untuk melihat bagaimana dari permasalahan yaitu tentang pengelolaan PNBPN, inikan sangat disayangkan dan rencana aksi yang disampaikan ini harus benar-benar diintegrasikan menyeluruh sampai ke wilayah pelosok Indonesia ya, PNBPN ini kenapa sangat disayangkan? satu sisi Kementerian KLHK inikan masuk bergabung dengan Kementerian Ekonomi dan Investasi dimana harapannya bahwa sektor kehutanan ini mampu untuk bisa memberikan kontribusi terhadap devisa negara melalui PNBPN ya?kedepannya berharap banyak bahwa bagaimana Kementerian LHK ini untuk bisa mengendalikan dari sisi penegakan hukum serta mengendalikan dari sisi regulasi yang mungkin regulasi untuk sebagai kekuatan besar dalam capaian PNBPN tersebut.

Yang kedua, saya mencoba untuk bisa bagaimana melihat dari prioritas tahun 2020 ini tentu disini Ibu Menteri belum menyampaikan kegiatan 2020 ini berapa persen capaian 27% ini? apakah optimis dalam pelaksanaannya? sementara saat ini aja sudah memasuki semester kedua ya bulan Juni. Dari sisa anggaran yang ada, kira-kira masihkah diarahkan terhadap penanganan COVID-19?, nah terhadap alokasi *refocusing* kemarin

kurang lebih Rp2 triliun, apakah dari beberapa Mitra seperti mungkin dari PMN ataupun perusahaan-perusahaan yang memang ada di bawah dibawah Mitra LHK ini memberikan kontribusi terhadap CSR untuk membantu program penanganan COVID-19? bagaimana refocusing kemarin Rp2 triliun ini untuk bisa dialokasikan? apa itu tidak ada tabrak atau tumpang tindih terhadap anggaran yang kita keluarkan dengan bantuan CSR yang diberikan kepada Kementerian LHK itu? dan berikutnya untuk program 2021, saya kira sama dengan Pak Ketua tadi, adanya redesign dari 13 program menjadi 6 program. Tentu ini juga jangan sampai 6 program itu mengikis daripada urgensi 13 program yang lalu dan 13 program yang sangat urgent yaitu penegakan hukum. Saya setuju sekali bahwa ini jangan sampai hilang, mengingat hasil pemeriksaan LHPBPK saja masih mencuat persoalan penegakan hukum yang masih lemah, ini jangan sampai redesign ini menggugurkan semua untuk akhirnya dalam rangka mungkin investasi dibidang kehutanan tambah longgar dan lain sebagainya.

Dan terakhir tentu saya ingin berharap banyak bahwa pembangunan 2021 ini difokuskan terhadap sektor pariwisata, mendukung sekali ya Bu Menteri akan tetapi memang KLHK ini tidak bisa bekerja sendiri, harus ada kinerja-kinerja yang koordinatif serta kit-terintegrasi melibatkan beberapa Kementerian seperti Kementerian Pariwisata dan PUPR dalam rangka perbaikan sarana prasarana.

Disamping itu kaitan dengan kehutanan, masih banyaknya hutan produksi, hutan rakyat serta hutan lindung ini dari sisi administrasi kepemilikan ini masih menemukan kejanggalan dan masih masyarakat di bawah ini terjadi gesekan contoh saja di Banten antara Tangerang dan Lebak Pandeglang yang merupakan di wilayah Perhutani yang dikelola oleh Perhutani ini masih terjadi gesekan di tingkat masyarakat. Mohon untuk Ibu Menteri bisa mengatasi antara perselisihan masyarakat disana agar apa kaitan dengan ke depan.

KETUA RAPAT:

Mbak Nuraini.

Nanti Rapat Kerja yang akan datang baik itu Perhutani, Inhutani akan diundang secara fisik karena inikan bahas anggaran Jadi mereka hanya virtual saja.

F-PD (Hj. NUR'AENI S.Sos., M.Si.):

Terima kasih Pak Ketua.

Saya lanjutkan ya? dari sisi mungkin ini Ibu Menteri disana yang terjadi kaitan dengan Tora, ini perdebatannya masih cukup luas dan kaitan dengan program tentang lingkungan hidup. Saya sepakat dengan Pak Charles tadi ada pertanyaan mengapa dari grafik indeks kualitas lingkungan hidup Indonesia ini mengalami penurunan? terus punya *grand design* seperti apa

untuk bisa mengantisipasi serta memberikan solusi terhadap grafik indeks kualitas lingkungan hidup itu agar meningkat agar masyarakat kita di perkotaan juga hidup dengan nyaman, damai serta asri ini tentu harus ada *grand design* melakukan cluster zonasi terhadap wilayah perkotaan yang ada di seluruh Indonesia. Mungkin itu Ibu Menteri, terima kasih.

Wabillahitaufiqhidayah.

Wassalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

KETUA RAPAT :

Terima kasih, selanjutnya Kanjeng Dirjen silakan.

F-GERINDRA (Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.):

Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Pak Ketua, teman-teman dan Ibu Menteri dan Eselon I semua.

Ini saya menyampaikan titipan yang sebagian juga sudah saya sampaikan kepada Ibu Menteri. Ini saya agak komentar bu ya? saya ini Anggota DPR RI bukan orang wakil kehutanan bu karena seolah-olah kalau saya dianggap di sini tidur percuma dong wakilnya di situ orang kehutanan, saya bukan orang wakil kehutanan wakilnya dari Kebumen, Banjarnegara, Purbalingga.

KETUA RAPAT:

Jadi sudah tidak mau mengakui asal-usulnya?

F-GERINDRA (Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.):

Bukan setiap ada masalah, seolah-olah kami nggak pernah ngomong gitu. Iya ini saya sampaikan bu walaupun sebetulnya contoh ini ada yang bertanya Pak Daruri ini aku kalau musim kemarau sawah aku kering terus gimana ngaturnya air? waktu Bapak Dirjen apa kerjanya? waduh itukan nggak enak ngomongnya, nggak tahu bu bahwa merusak lahan kawasan itu udah puluhan juta hektar, kita kemampuannya berapa? misalnya kita ada 30 juta hektar, kalau 40 juta sudah Rp120 triliun untuk menanam aja. Nah ini berapa? jadi temen-temen nggak mengerti nih.

Jadi gini bu ya, kalau ini masukkan aja. Gimana kalau kita punya program perdaerah aliran sungai bu? misalkan Batutegei kampungnya Pak Ketua, Ibu juga pernah kesana, turbin sekarang tinggal dua yang hidup karena hulunya rusak. Cari DAS yang banyak sumber pangan Pertanian dan hulunya Kehutanan yang kita memperbaiki, tengahnya PU, hilirnya Pertanian. Coba Mungkin di luar Jawa misalnya di Makasar saya pernah ikut terbang dengan Pak Wapres. Makasar banjir karena hulunya di Bili-bili nggak ada tanamannya, di Jawa saya kira nanti pilih lah bu. Jadi anggaran yang ibu

usulkan ini saya sangat mendukung, disamping itu juga untuk konservasi misalkan kita ada insitu, eksitu kita kombinasi 5 jenis satwa yang dilindungi; gajah, harimau, badak, burung, orang utan misalnya itu diprioritaskan.

Yang ketiga, soal limbah bu. Ini ada yang mengatakan ini masalah lingkungan pindah ke Komisi IV DPR RI anggarannya dikurangi gitu waduh bukan kurangi, makanya Pak Ketua saya kira ini perlu diperhatikan ini masalah bukan berarti yang lain tidak bu. Soal yang kedua mengenai kebakaran bu, mulai bulan ini, bulan depan ini sudah akan terjadi kebakaran. Saya ingin evaluasi bu ya, kenapa kok kebakaran sekarang itu seperti ini sampai Presiden, Panglima, Kapolri kami dulu nggak, ya ini masalahnya ada. Kalau dulu Menteri KLHK itu diberi kuasa penuh melakukan pengendalian di lapangan, kalau sekarang langsung penindakan bu. Jadi kalau udah terjadi ditindak tidak bisa, maka mohon melalui ibu kepada Presiden tolong dikembalikan kewenangannya. KLHK itu garis komando kalau namanya garis koordinasi Ibu nggak jalan ya? mana ada tentara bisa periksa polisi ga bisa bu tapi kalau ibu punya pasukan sampai didesa. Jadi kalau anggaran terbatas gimana? ini jangan saya loh, kita juga pernah menanganin, jangankan menteri bu, dirjen aja nggak pernah, bukan berarti dulu kearah kebakaran. Mohon ini juga dikoordinasikan dengan Kementerian Pertanian, hutan terbakar hingga sampai 30% bu, 70% di luar kawasan tapi seolah-olah Menteri KLHK ini yang tanggung semuanya gitu, Menteri Pertanian santai-santai aja, Dirjen Bun-nya ada, direktornya tidak dianggarkan ini soal pengendalian kebakaran disana.

KETUA RAPAT:

Kangjen Dirjen Bun-nya jalan-jalan terus.

F-GERINDRA (Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.):

Ngeh maturnuwun, terus yang selanjutnya bu mengenai konservasi tadi udah ya dan saya mengenai kebun binatang bu. Inikan sering di TV satpamnya enggak makan, yang nonton nih udah jadi berhenti apa betul ini evaluasinya sampai di mana bu? ini saya tanya itu bu. Pak kebun binatang inikan tutup, satwanya kan milik Pemerintah, tanggung jawab Pemerintah sampai dimana? saya sudah pernah sampaikan ke ibu, yang mudah-mudahan ini sudah dievaluasi sehingga ini bisa teratasi. Masalah ini tidak berlanjut seperti pengalaman 10 tahun yang lalu, kebun binatang harimaunya makan plastik bu, karena di Surabaya ini saya tangkap karena suaminya kerja di situ ngurusi satwa, istrinya jualan bakso jadi beli dagingnya untuk bakso. Saya tangkap, saya cabut izin bu. Ini tolong teman-teman juga nggak nyangka situ, kita nyamar masuk sana nonton itu kok ada harimau makan plastik itu ternyata saya teliti seperti itu.

Nah yang selanjutnya tadi sudah sampaikan Pak Slamet bu, ini ada temuan BPK bu, kemarin Menteri Pertanian melaporkan tidak bisa berbuat apa-apa karena bukan kewenangannya. Temuan BPK itu ada HGO yang tidak lengkap, tadi disampaikan ada 194 perusahaan, terus yang belum ada

izin pelepasannya 181 perusahaan Pak, terus di gambut aja perusahaan kebun 110 ini temuan BPK Bu. Tolong ini kalau Pak Ketua sudah punya solusi sebenarnya bu kita sering diskusi, ada tiga solusi yang semuanya bisa nerima tapi melalui ibu mohon ini dikordinasikan dengan Pertanian, ATR, Kepolisian, Kejaksaan dan KPK bu, apa ini tindakannya? saya nggak mau nanti setelah kita nggak duduk lagi, diobok-obok bu karena masalahnya pengalaman kita itu administrasi kita itu 5 tahun dibuang Bu berikutnya diperiksa kita bingung cari arsipnya, ini mohon jadi perhatian pada ibu.

Terus yang terakhir ini Pak Ketua, saya juga sudah melapor Pak Ketua, ini sekarang HPH-nya punya produksi, LOG banyak. Kerjasama ekspor dengan Eropa. Di Eropa *lockdown* sehingga kayu atau *plywood* gak bisa ekspor ke Eropa bu, saya kira saya sudah. Kalau kehutanan tidak ada masalah ini, yang jadi masalah karena bila ekspor gudangnya penuh LOG-nya di hutan masih banyak. Perkiraan saya mungkin ada 1.000.000 m³, nah solusinya apa? kalau ini mau PHK, saya sudah lapor Pak Ketua ini perlu ada solusi bu, mungkin melalui KPHI karena ini kewenangan ada di Menteri Perdagangan, bagaimana kebetulan Cina dan Jepang itu butuh LOG bu. Dalam negeri itu harga LOG hanya 100 dolar pun nggak ada yang beli, tapi di Cina sama di Jepang 200 dolar bu, boleh diekspor tapi *tax* ekspor itu 25% kasihkan saja mau nggak? masih untung soalnya perusahaan kalau 200 dolar di Indonesia saja 100 dolar masih untung 50 dolar per kubik. Sudah bayar, itu berapa 50 dolar x satu juta x Rp14.000 udah pendapatan luar biasa.

Yang kedua kita minta waktunya terbatas Bu, nah ini mungkin didorong bu untuk rapat di perdagangan tapi Ibu sudah kami kontak udah secara prinsip tidak ada masalah tapi ini karena menanyakan kepada saya tadi, Pak sudah disampaikan belum? waduh udah, tapi ini saya sampaikan lagi biar ini jelas karena ini waktunya bisa 4 bulan, 6 bulan bu, dibatasi lewat itu batal itu. Nah itu mungkin kalau setuju yang 25% tadi *tax* ekspornya berapa triliun itu untuk biaya ini, jadi anggarannya nggak perlu dari APBN untuk LHK misalnya bentuk rehabilitasi konservasi. Saya kira itu Ketua, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Saya sangat setuju sekali Kanjeng, bu kira-kira kalau usulan tadi Kanjeng Dirjen tadi direalisasikan, bisa ekspor LOG, kira-kira bisa nggak bu dari sisi hukum apakah diperbolehkan oleh LHK? kalau nanti perdagangan, biar saya akan bicara dengan Dirjen Perdagangan Luar Negerinya. Tapi dengan batasan waktu mungkin berlaku hanya 1 tahun saja karena Paling gak kan persiapan-persiapan itu kan nggak gampang. Jadi kalau berlaku 6 bulan itu omong kosong, bukan Kanjeng LOG-nya sudah ada. Jangan seperti kemarin ekspor benih lobster, benihnya sudah ekspor, PMK-nya mengenai PNBPN, mengenai pajak belum ada. Inikan terjadi memang, ditahan sama ke Bea Cukai. Jadi kalau misalnya hanya 6 bulan ngurus di PMK-nya, PNPB, Penetapan pajak segala macam mustahil kalau bisa 2 bulan karena Menteri Keuangannya sedang sibuk mengurus anggaran, iya bu ya? coba kira-kira solusinya tadi Pak, enggak bisa?

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Boleh Ketua, saya memang memahami ada persoalan ini karena kalau kita lepas LOG itu harganya bisa 900-1100 dolar per/m³ tapi kalau yang sekarang memang ketentuannya potong-potongan dengan luasan tertentu itu harganya kira-kira nya hanya Rp300 belum lagi beban produksi dan lain-lain. tapi ada tapinya ketika kita melihat kebijakan itu perspektifnya harus menyeluruh ketua. Kebijakan untuk tidak ekspor LOG ini kebijakan yang sudah sangat lama yaitu catatannya untuk menjaga pemenuhan kebutuhan bahan baku industri. Jadi saya dalam melihat hubungan kausalitas kebijakan ini, itu belum bisa mengatakan bahwa oke kehutanan merekomendasi, kita harus lihat dulu secara keseluruhan Pak Ketua, sebab yang kita coba usulkan untuk perluasan penampang saja. Jadi ini dari potongan kecil-kecil kita minta agak lebar dikit gitu, itu aja aspeknya cukup berat. Jadi banyak dimensinya Pak Ketua, bukan hanya dimensi kultivasi atau kultur atau penanaman tetapi dimensi-dimensi lain kemajuan industri dan sebagainya. Jadi ada kelihatannya ada narasi besar untuk memajukan industri kita yang belum sampai-sampai gitu Ketua. Jadi saya tidak bisa jawab sekarang, mungkin kita harus teliti lagi dari segala aspek Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Atau gini Bu Menteri nanti dikaji dulu kalau tidak bisa LOG, kenapa nggak di permudah lebih turun statusnya yaitu balok kaleng sebutnya yang sudah segiempat bisa nggak kira-kira?

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Kami sudah usulkan Pak Ketua, jadi istilahnya luas penampang saya lupa angkanya jadi berapa 15? 15.000 milimeter kalau ga salah, jadi lebih lebar begitu.

KETUA RAPAT:

Jadi bentuknya seperti kotak kaleng gitu, segiempat ya? jadi bukannya LOG ya? LOG kan pengertiannya bunder.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Itu saja belum selesai Pak Ketua, saya sudah beberapa tahun.

KETUA RAPAT:

Iya sudah itu dikaji ulang, agar tidak terjadi gelombang PHK yang seperti dikatakan Pak Darori tadi.

F-GERINDRA (Ir. KRT. H. DARORI WONODIPURO, M.M.):

Pak Ketua, bisa?

Begitu bu ini kasus soalnya bu, bukan memang keinginan. Eropa sekarang *lockdown* semua tidak bisa nerima *plywood* sama kayu olahan, didalam negeri nggak ada yang beli karena nggak laku. Nah sekarang kayu numpuk di hutan dan ini orang di hutan juga nggak ada COVID bu aman, bersih. Nah ini mau keluar semua, waduh nanti saya lapor, minimal bolanya ga dikitalah, kalau menolak itu tanggung jawab perdagangan misalnya. Itu bu terima kasih.

KETUA RAPAT:

Demikian bapak-ibu saya usulkan untuk kita *break* dulu, kembali lagi kita mulai pukul 14.00 WIB, terima kasih.

(RAPAT DISKORS ISHOMA)

(SKORS DICABUT PUKUL 14.10 WIB)

Effendi Sianipar, silakan Pak Effendi.

F-PDIP (Ir. EFFENDI SIANIPAR):

Terima kasih Pak Sudin.

Pimpinan dan Rekan-rekan Anggota DPR,
Yang saya hormati Ibu Menteri, Kepala BRG dan Kepala Sekjen dan seluruh Eselon I yang ada disini, terima kasih.

Saya langsung aja ke Pak Restorasi Gambut, kenapa Pak Fuad ini sering ketemu di Riau tapi kita belum pernah jalan sama sekali? jadi maunya saya Pak Fuad, Pak Kepala BRG bagaimana karena Riau ini adalah salah satu gambut terbesar di seluruh Indonesia, ada 400.000 hektar kalau nggak salah gambut di Riau yang tentu penanganannya mesti sistematis bertahap dimana yang paling kritis karena sumber dari pada kebakaran juga termasuk adalah gambut. Jadi saya mohon kalau ada acara-acara di Riau kita harus koordinasi gitu pak.

KETUA RAPAT:

Bilang aja minta diajak begitu singkatnya? iya?

F-PDIP (Ir. EFFENDI SIANIPAR):

Jadi Bu Menteri Lingkungan Hidup, di Riau ni tentu ibu udah tahu yang paling luas sawit dan ada 168 PKS kalau saya nggak salah dan sering menjadi gonjang-ganjing karena penanganan daripada alim banyak orang baik. Tentu saya mengharapkan karena ini adalah daerah gambut terbesar di Riau, limbah tolong dibuatkan tim untuk monitoring ini tapi timnya betul-betul yang memang tujuannya untuk melakukan perbaikan karena banyak kita lihat kayak di Kali Siak ini nanti datanya saya serahkan Pimpinan daerah-daerah

mana yang ada pencemaran lingkungan, yang nyata-nyata masuk ke dalam Sungai, ada sebagian ditanam di lokasi, nanti saya serahkan sama ketua datanya. Saya kira saya nggak banyak cuman itu aja restorasi gambut terutama di Meranti Pak. Di Meranti di daerah Suko Aki itu perlu ditangani supaya mereka bisa menjaga hutan yang ada di situ karena kalau tidak nanti merusak. Saya kira itu saja dari saya, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Selanjutnya Pak Salim Fakhry, silakan.

F-PG (H. M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Makasih Pak Ketua.

Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Pak Ketua yang kami hormati, teristimewa Pak Slamet yang mendampingi Pak Ketua, Ibu Menteri dan jajarannya yang kami hormati.

Pertama-tama masih dibulan baik bu, mohon maaf lahir dan batin. Setahun kita sudah sama-sama, mungkin ada kata-kata yang kurang berkenan, mari kita saling memaafkan. Saya langsung aja Pak Ketua setelah pemaparan dari Ibu Menteri tadi masalah keberhasilan khusus Di Gakkum sepanjang 2015-2020 kita apresiasi Pak Ketua. Contoh ketika kita di Batam Pak Ketua, Pak Dirjen langsung ikut, langsung *action*, cuman kelanjutannya kita nggak tahu Pak Ketua. Saya pribadi nggak tahu jawabannya apakah barang tersebut? apakah orang yang kita angkat tersebut sudah dihukum ataupun bagaimana?

Yang kedua Pak Dirjen melalui Bu Menteri, sudah berapa perusahaan perambahan hutan atas prestasi Gakkum tersebut yang dihukum bu? maksudnya perusahaan mana yang sudah dihukum? kita mau ambil sampel, perusahaan yang paling hukuman yang mendapat hukuman berat saja bu. Yang kedua, andaikan ada denda Pak Ketua yang akan dimasukkan ke kas negara, kita mau datanya sepanjang tahun khususnya 2019 apa yang dikerjakan oleh Kementerian dalam hal ini Dirjen Gakkum? kita inginkan datanya berapa dari hasil denda tersebut yang sudah disetorkan ke kas negara?

Selanjutnya yang kedua masalah yang ibu paparkan tadi dari program lahan gambut. Satu juta lebih kalau saya ndak salah menyimak tadi Pak Ketua, satu juta lebih ini menurut pandangan pribadi saya Ibu Menteri bukan tidak setuju cuman perlu kita pikirkan kembali sebab lahan gambut ini kalau kita tanamin pun akan mempunyai apa ini, apa namanya Pak Ketua kadar keasaman tanahnya tinggi apakah ini bisa berhasil ke depan? contoh di Aceh bibit yang kita tanam warna hijau Pak Ketua hasilnya kuning, mungkin karena kadar asamnya.

Selanjutnya ada anggaran 2020 ini Ibu Menteri masalah pembangunan sarana prasarana di Taman Nasional Gunung Leuser dan sudah *Alhamdulillah* sudah tertampung, rencana dulu sebanyak pertama 20 miliar. Ternyata 10 miliar akibat COVID Pak Ketua, akibat COVID ada pemotongan 2/3 kalau saya tidak salah bu prosesnya proses lelang sekarang hanya berkisar Rp2 miliar. Kenapa saya selalu usulkan di Taman Nasional Gunung Leuser ini bu, karena Taman Nasional Gunung Leuser ini ada ketentuan Keppres 33 kalau saya tidak salah bu. Di Taman Nasional Gunung Leuser ini banyak bahan tambang cuman tidak bisa dimanfaatkan oleh rakyat, oleh daerah karena sudah terpotong pada peraturan Keppres 33.

Andaikan Keppres 33 ini kita sepakat untuk menjaga hutan cuman rakyat juga mesti kita sejahterakan. Taman Nasional Gunung lauser khususnya di kawasan Kabupaten Aceh Tenggara 84% di bawah Taman Nasional Gunung Leuser hanya berkisar 14% yang bisa ditanami, diusahakan ataupun disitu semua sudah tempat rakyat, di situ perkantoran, disitu perumahan. Apa salahnya melalui Kementerian mencari solusi yang terbaik bu, jangan karena Taman Nasional Gunung Leuser ini adalah paru-paru dunia katanya, Orang Aceh Tenggara tersebut paru-parunya tidak sehat.

Harapan kami ibu di Taman Nasional Gunung Leuser andaikan ibu dan jajaran berkenan untuk 2021, usulan kami bisa dibuat suatu Balai Penelitian. Ada yang dibuat bu, kalau nggak salah saya di Sulawesi dimana dengan saya kira disitu lengkap semua bu. Suatu Balai Penelitian supaya kenapa? karena adanya Balai Penelitian ini bisa rakyat di sekitar kawasan Taman Nasional Gunung Leuser tersebut menjaga Taman Nasional ini supaya jangan dirambak, *Insy Allah* sampai hari ini kalau dulu lain, hari ini tidak ada perambahan, kalau pun perambahan sekira hanya perambahan kepentingan produk lokal. Selanjutnya Pak Ketua tadi Pak Ketua sudah katakan tanggal 7, kita akan proses masalah limbah.

KETUA RAPAT:

Tanggal 9 bulan 7.

F-PG (H. M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Sengaja saya kurangi 2 Pak Ketua, kalau bisa tanggal 7 nggak masalah cuman kalau keputusan Ketua tanggal 9 juga tidak masalah. Saya rasa Pak Ketua, kita juga harus konsisten Pak Ketua sini sudah langsung hari itu, untuk apa kita berdebat dengan Kementerian khusus lingkungan hidup? lebih bagus mana kementerian yang menurut Bapak Ketua tadi kita panggil semua ketua, nanti disini akan kita beberkan, akan kita buka seterang-terangnya, seluas-luasnya. Kalau kita berdebat disini dengan Kementerian KLHK pemahaman kita ataupun masukan gitu kurang. Jadinya apa yang dikatakan Mbak Luluk tadi dan gitu juga Mbak Lulu, Pak Johan ini melalui virtual melihat, mendengar ibu. Ada Pak Johan ya? iya Pak Johan tuh dan Pak Johan dan Pak Khalid ini persaingan luar biasa ini bu.

KETUA RAPAT:

Cukup Pak Salim?

F-PG (H. M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Cukup, cukup bu sedikit lagi pak.

KETUA RAPAT:

Oh iya satu menit.

F-PG (H. M. SALIM FAKHRY, S.E., M.M.):

Bapak yang pimpin atau Pak Slamet ini Pak?

Saya kira itu saja bu, ini dalam arti kata bu yang anggaran yang disana tadi 2 miliar itu juga disyukuri bu, cuman untuk apa terus bu dipotong yang di sana bu? kalau katanya 50%, cukup 50 lah bu, ini hanya 2/3 yang dipotong Pak Ketua. Hari itu menurut Pak Dirjen 20 miliar yang dimasukkan, cuman untuk tahun depan ada lagi ternyata yang Rp9,4 miliar ini pun hanya Rp2 miliar Pak Ketua. COVID ya COVID Pak Ketua cuman COVID yang lain dipotongkan nggak papa? cuman inilah masuknya masukan yang kita dapat. Terima kasih Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Jadi kalau mau anggarannya besar, tugasnya anda sebagai Anggota Banggar dari Komisi IV DPR RI, kalau iya tidak mampu ya jangan ditambah lagi anggaran untuk Gunung Leuser tadi. Selanjutnya Pak Andi Akmal, silakan.

F-PKS (Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P., M.M.):

Terima kasih Ketua.

Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Pimpinan dan juga Wakil Ketua Bayangan,
Anggota Komisi IV dan Adi yang hadir secara fisik maupun virtual,
Ibu Menteri, Pak Sekjen dan Bapak, Ibu sekalian yang berbahagia.

Yang pertama saya memberikan apresiasi terhadap Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang dimana pada saat COVID-19 ini memberikan kontribusi kepada daerah pemilihan kita masing-masing. Semoga kedepannya ini bisa ditambah bu ya agar betul-betul dirasakan oleh masyarakat yang mengalami masalah.

Kemudian yang kedua dibandingkan dengan mitra kita yang kedua Pak Ketua, paling lengkap bahannya ini Kementerian LHK, ini sangat lengkap sekali bahannya dan ini juga memudahkan kita untuk melihat ya sejauh mana perkembangan baik anggaran maupun dari sisi kinerja yang terjadi di LHK. Namun demikian Pak Sekjen maupun juga Ibu Menteri.

KETUA RAPAT/F-PDIP (SUDIN, S.E.):

Tapi kemarin katanya Abang bilang yang paling lengkap temannya Abang dari Solo.

F-PKS (Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P., M.M.):

Bukan Ketua, ga, ga.

KETUA RAPAT:

Bukan Kementerian Pertanian bukan?

F-PKS (Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P., M.M.):

Ga Ketua.

KETUA RAPAT:

Karena temannya Abang ini dari Solo.

F-PKS (Dr. H. ANDI AKMAL PASLUDDIN, S.P., M.M.):

Tidak Ketua, jadi Pak Sekjen mungkin nanti terutama kepada saya pribadi pak untuk diberikan penjelasan tentang PNPB pak, ini Penerimaan Negara Bukan Pajak karena Kementerian LHK ini kementerian salah satu Kementerian terbesar kontribusi untuk PNPB-nya Pak karena PNPB ini menggambarkan saling pendapatan; 2 kinerja Pak, kinerja dari LHK dan juga kita melihat juga sejauh mana pembangunan kehutanan ini berkontribusi untuk apa namanya penerimaan negara kita pak ya? mudah-mudahan ini bertambah Ibu Menteri ya? target 2020, 2021 walaupun ada COVID ya.

Kemudian yang selanjutnya Pak Ketua, kita ingin juga nanti berharap bahwa betul-betul program yang ada di Kementerian Kehutanan ini bisa dilihat dari, bukan hanya pelaksanaannya tapi *output* dan *outcomenya* ya? iya mungkin di sini sudah ada data Ibu Menteri tapi saya belum baca semuanya tapi saya kira ini penting dan juga lebih penting sebenarnya Ibu Menteri meyakinkan Pak Presiden dan Menteri Keuangan bahwa anggaran LHK ini perlu ditambah ya bu ya? kalau kami di sini dan mungkin Anggota Banggar jugakan mau menyuarakan tapi mungkin lebih bagus lagi atau lebih kuat lagi kalau dari tim medianya atau dari Kementerian ataupun dari masyarakat yang memang yang menyuarakan ke media bahwa anggaran Kementerian LHK ini

kenapa diturunkan dari Rp9 triliun menjadi Rp7 triliun ibu ya, walaupun ada usulan kembali Rp5 triliun.

Saya pribadi tentunya bersama Anggota Banggar juga tentu sangat setuju ada penambahan Rp5 triliun bu ya karena memang seperti itulah sebabnya kebutuhan kita yang sangat besar apalagi kebutuhan kita di sektor lingkungan hidup ya Bu ya? yang saya kira ini juga saya berikan apresiasi juga kepada Ibu Dirjen Sampah dan Limbah kita sudah melaksanakan kegiatan bu ya yang dirasakan oleh masyarakat. Oleh karena itu bu, kita dukung ini penambahan apa namanya usulan tambahan Rp5 triliun ini untuk 2021.

Dan yang terakhir saya tidak banyak berkomentar Pak Ketua, saya nanti berharap dari Dirjen Gakkum nanti bisa datang ke Sulawesi Selatan karena adanya apa keluhan masyarakat tentang limbah di PT Semen Tonasa dan Makassar tene. Mungkin nanti direses berikutnya Bu Menteri bisa nanti didampingi dari Gakkum agar kita bisa mencari solusi bagaimana masalah limbah dari pabrik yang saya katakan tadi ini ada solusi kedepannya sehingga masyarakat apa namanya bisa menerima gitu. Demikian Pak Ketua, terima kasih.

Wassalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum salam.

Selanjutnya Ibu Riezky Aprilia, silakan.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Nama saya Rizki Aprilia Pak, mohon maaf lahir batin Ibu Menteri beserta jajaran. Dari tadi beberapa sudah disampaikan oleh para rekan-rekan senior-senior saya tadi yang mungkin agak penting juga untuk digarisbawahi. Tadi Pak Suhardi Duka menyoroti serapan mungkin ya Pak Suhardi Duka yang baru tercapai mohon di segera dikejar jangan sampai nanti tidak maksimal dalam angka akhir. Kemudian kalau saya tadi memang saya mohon maaf teman-teman, rekan-rekan yang virtual juga, saya meminta waktu mungkin agak sedikit panjang dari biasanya.

Pertama tadi dari Ibu Menteri menyoroti masalah Karhutla, kita sepakat bahwa Karhutla ini memang harus diantisipasi tapi memang ada pertanyaan saya juga kemarin. Pak Darori tadi barusan juga bahas Karhutlah itu diantisipasi dan seringkali yang dikejar juga Kementerian Lingkungan Hidup kan begitu, lah kalau banjir bandang itu tanggung jawab siapa? ini pikiran saya kemarin. Berarti DAS juga perlu di mitigasi mungkin bahasanya supaya memang tindakan pencegahan itu maksimal ya? karena saya baca ada

bantuan untuk DAS melalui PUPR, ya Bu Menteri ya? jangan sampai yang apa yang menjadi perannya KLHK ini malah terabaikan, itu pertama.

Kedua, saya juga ingin membahas tadi ada *statement* Ibu Menteri yang sangat saya senang mendengarnya gitu bahwa kebijakan harus menyeluruh dalam bahasanya adalah *holistik*. Saya di sini ada Bang Effendi Sianipar mungkin ada teman-teman virtual dari Kalimantan yang memiliki gambut bu. Saya mencoba berulang kali membaca terkait gambut, saya mohon maaf Pimpinan mungkin kalau mungkin ada yang kurang sepaham tetapi untuk gambut ini mohon maaf Bapak, apa ini Kepala Badan ya? Kepala Badan Restorasi Gambut gitu ya. Harapan saya Komisi IV DPR RI ini serius juga terhadap gambut karena gambut kita termasuk 5 besar dunia dan ini adalah *world heritage* ada di Indonesia jangan gambut ini restorasi gambut cuma ngurusin kebakaran doang, iya? kan begitu. Bapak sudah pernah menunjukkan di slide, slide bapak terkait daerah yang sudah bapak kelola untuk wilayah gambut, kampung gambut itu kan begitu? akan tetapi dari anak-anaknya Ibu Menteri yang ada, kemarin saya menyerap ilmu, ada hal namanya *agrosilvofisheries*. Kemarin KKP bikin *silvofisheries* saja tapi anak-anaknya Ibu Menteri ini buat informasi saya mendapatkan program *agrosilvofisheries* dan buat saya itu untuk keberlangsungan gambut ke depan cukup bagus hanya karena anggaran BRG ini terbatas terus, saya berharap Pimpinan dan Rekan-rekan Komisi IV DPR RI serius atau tidak Pemerintah membentuk Badan Restorasi Gambut untuk menjaga gambut di Indonesia ini harus kita dorong, bila perlu Badan Restorasi Gambut berdiri sebagai badan sendiri begitu loh agar anggarannya kasihan juga Ibu Menteri kebakaran yang disalahkan entar juga buntut-buntutnya BRG begitu loh. Ada berapa banyak dirjen yang harus Ibu urusin, belum lagi Badan Restorasi Gambutnya kan begitu. Nah jadi saya dan mungkin Pak Effendi Sianipar silakan dikritisi juga pak kalau memang saya salah pak. Riau itu juga termasuk yang paling besar gambutnya tapi jangan kok seolah-olah gambut ini masalahnya cuma Karhutla tok, kebakaran aja. Kita ini bisa kedepannya menjadi negara yang membantu dalam proses *climate change* katanya itu kan begitu loh, menanggulangi *climate change*.

Nah itu saya mohon kepada Rekan-rekan di Komisi IV DPR RI walaupun hanya terbatas gambut ini wilayahnya tapi ini *heritage* yang dimiliki oleh Indonesia. Kita harus jaga dan saya mendukung 1000% Ibu Menteri ya kan itu dan Bapak Kepala Badan juga bukan maksudnya apa, saya kepengennya gambut ini benar-benar dijaga, dijaga agar kedepannya ini untuk keberlangsungan anak cucu begitu loh dan ini *legacy*-nya Ibu Menteri juga kalau berhasil mendorong ini lho Bu gitu loh, bukannya apa-apa, nah ini yang paling penting kita sampaikan.

Sekali lagi saya garis bawahi, saya berharap pemerintah serius dalam menjaga kelestarian ekosistem gambut dan mungkin dengan hal ini kami mendorong, saya terutama dari Sumatera Selatan mendorong ada Badan Restorasi Gambut ini menjadi badan yang berdiri sendiri agar dapat serius menangani gambut bukan hanya masalah kebakaran tapi pelestariannya itu dan terakhir terima kasih yang sebesar-besarnya kepada KLHK terkait

masalah penanganan COVID. Dirjen PSLB 3 betul ya Ibu Vivien ya? saya nggak enak dengerin Dirjen Sampah di bilang ya tadi masalahnya? jadi terima kasih walaupun baru simbolis seperti yang itu, saya harap juga dipercepat Bu entar COVIDnya keburu bubar bu, ya kan gitu. COVIDnya bubar, kita juga akhirnya dikomplain lagi seperti biasa. Tapi tadi yang disampaikan juga oleh Pak Andi Akmal, Pak Suhardi Duka dan teman-teman yang ada di Banggar kami mendorong memang anggaran ini supaya dibantu oleh senior-senior saya yang ada di Banggar karena ini serius karena COVID harus dibakar pakai apa in nah itulah namanya.

KETUA RAPAT:

Cukup?

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Iya terima kasih Bapak Pimpinan.

Wassalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Selanjutnya Pak Fransiskus Lema.

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Terima kasih Pak Ketua, Bapak, Ibu Anggota Komisi IV DPR RI yang saya hormati,

Ibu Menteri yang terhormat dan Pak Sekjen beserta jajaran Eselon 1 yang hadir pada sore hari ini.

Kesempatan pertama saya secara pribadi mau menyampaikan terima kasih kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan bu, kemarin saat-saat pandemi COVID bersamaan dengan reses, ada sejumlah paket kerjasama dengan Komisi IV DPR RI yang juga dilakukan di Nusa Tenggara Timur di Dapil saya; pembagian bibit, benih, ada bantuan konkrit sembako dan yang terakhir bahkan bekerjasama dengan Bu Vivien Dirjen Limbah ya bahan berbahaya dan beracun. Terima kasih bu ini sesuatu yang bagus sekali dan patut saya apresiasi.

Yang kedua terkait dengan beberapa isu aktual yang perlu diperhatikan lagi bu, saya ingin fokus soal pengamanan hutan bu dalam rangka pencegahan dan pengendalian ya katakanlah perusakan hutan dan sebagainya. Masih saja ada kejadian *illegal logging* walaupun mungkin dengan skala yang terbatas Karhutla dan lain-lain dengan juga ada perburuan satwa liar bu, nah ini terus terjadi karena itu usulan saya pengawasan dan mungkin perlu dukungan sarana prasarana serta peningkatan kualitas jumlah ya sumber daya manusia, polisi hutan dan sebagainya bu dan mungkin

kesejahteraan mereka juga perlu lagi kita perhatikan lagi bu karena masa depan kita juga sebenarnya ada di hutan-hutan ini bu.

Yang berikut terkait dengan pandemi COVID ini yang pasti mungkin teman-teman yang lain sudah bicara pasti limbah *infeksius* juga akan bertambah bu. Dengan demikian saya kira kita juga harus memberikan atensi dan perhatian yang cukup besar ke arah sana untuk penanganan dan pengelolaannya. Di NTT saya langsung saja mengucapkan terima kasih KLHK sudah mau berkomitmen untuk membantu *insenerator* di Labuan Bajo Manggarai Barat. Tadi saya baru bicara dengan Bu Vivien, saya baru menelpon Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nusa Tenggara Timur sudah Bu Viviennya sudah ada lokasi dan sebagainya, mohon dukungannya bu saya sebagai Anggota Banggar yang ada di Komisi IV DPR RI juga Bu tentu terbuka sekali untuk mendapatkan masukan dari kementerian Ibu sejauh itu memang baik dan memang patut untuk kita perjuangkan Bu.

KETUA RAPAT:

Cukup?

F-PDIP (YOHANIS FRANSISKUS LEMA, S.IP., M.Si.):

Cukup pak, terima kasih. Selamat sore.

KETUA RAPAT:

Tolong ditayangin yang tadi yang saya minta, jadi ini adalah progres kunjungan ke Batam. Jadi Pak Salim tolong dilihat, naikin ke atas dikit, Komisariss PT BNB terancam 10 tahun penjara. Penyidik KLHK bakal dijemput paksa dari perusahaan. Ini saya dapatkan dari yang ikut menyegel namanya Pak Slamet Aryadi, nanti bisa dilihat di grup Komisi IV DPR RI. Harusnya di tampilkan fotonya Pak Slamet waktunya nyegel, selanjutnya untuk yang virtual. Yang pertama waktunya jangan lama-lama, saya harapkan pukul 3 semua pertanyaan selesai, dijawab Ibu Menteri setengah jam, kesimpulan rapat setengah jam, kita selesai. Yang pertama Ibu Ema silakan.

F-PPP (EMA UMIYYATUL CHUSNAH):

Terima kasih Pimpinan.

Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Bapak Pimpinan dan Bapak, Ibu Anggota yang kami hormati, khususnya Ibu Menteri beserta jajaran.

Yang pertama untuk RAPBN tahun 2021, pada intinya kami mendukung adanya penambahan anggaran di KLHK menjadi Rp5,3 triliun untuk merealisasikan kegiatan-kegiatan KLHK yang tertunda akibat

refocusing anggaran di tahun 2020 ini. Kami berharap program-program pemberdayaan masyarakat lebih ditingkatkan di tahun 2021 seperti KBR, KBD, Bibit Produktif, BANGPESONA dan sebagainya.

Terkait KBR, mohon ada evaluasi terkait teknis pelaksanaannya Bu Menteri di daerah pemilihan. Kami mendapat beberapa masukan terkait program KBR seperti penyediaan lahan yang harus disiapkan kelompok namun besaran anggaran untuk kegiatan ini dinilai belum relevan, mohon nanti ada evaluasi. Yang kedua terkait penanganan sampah akibat limbah *infeksius* COVID-19, kami menilai anggaran untuk kegiatan ini perlu ditambah, kami menggarisbawahi bahwa potensi bahaya yang ditimbulkan oleh limbah *Infeksius* COVID-19 ini sangat beresiko dan menurut kami sudah semestinya KLHK mendapat dukungan penuh untuk penanganan limbah ini sehingga mampu mengurangi risiko penularan virus.

Yang ketiga menghadapi *New Normal* beberapa kegiatan di masyarakat sudah mulai diizinkan untuk dibuka kembali, salah satunya kegiatan di pondok pesantren. Kami meminta kepada Ibu Menteri LHK untuk memberikan jaminan protokol kesehatan bagi para santri yang mulai kembali ke pondok dan memulai kembali aktivitasnya. ribuan santri bahkan jutaan santri yang ada di pondok-pondok pesantren di Indonesia adanya pendampingan dan edukasi terkait pola hidup bersih dan sehat menyongsong era *New Normal*. Adanya bantuan hand sanitizer atau edukasi terkait pengelolaan sampah *organic* dan *unorganic*, kami nilai cocok sebagai sarana pembelajaran sejak dini di lingkungan pondok pesantren sekaligus sebagai upaya pencegahan, penanggulangan atau pemulihan pencemaran-pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup. Mohon KLHK juga memperhatikan lingkungan pondok-pondok pesantren dalam menghadapi *New Normal* tersebut. Dan yang terakhir sama seperti yang telah disampaikan oleh Bapak-bapak, Ibu anggota terkait realisasi anggaran Kementerian LHK tahun 2020 saat ini telah memasuki semester 2 namun disini kami melihat besaran anggaran yang terserap seluruh Eselon belum ada yang mencapai 50% dari pagu, apakah ada kendala dalam realisasinya? mohon penjelasan Bu Menteri dan ini dari kami mohon maaf dan mungkin ini masih bulan Syawal akhir, ini akhir Syawal saya mohon maaf lahir dan batin kepada Ibu Menteri dan seluruh jajaran.

Wallahufiminthariq.

Wassalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum salam.

Selanjutnya saya sarankan kepada penanya masalah tadi penanganan kok apa limbah medis tidak perlu ditanyakan kembali karena yang bertanya menurut catatan saya lebih dari 10 orang. Ini sudah clear pasti akan ditangani. Selanjutnya yang mulia Pimpinan Bapak Hasan Aminuddin, silakan Pak.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-NasDem (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):

Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Selamat sore.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Bapak Ketua dan segenap Anggota serta Ibu Menteri dan keluarga besar KLHK.

Yang pertama saya mengapresiasi terhadap semua kinerja sebelumnya yang telah dinilai oleh eksternal pun, BPK cukup baik. Yang kedua bagaimana mewujudkan cita-cita Ibu Menteri selaku pemimpin di KLHK ini, temanya cukup menarik mempercepat pemulihan ekonomi dan reformasi sosial. Saya ingin,, mohon maaf diluar ada sepeda motor.

Yang pertama saya ingin mempertegas agar supaya ada keseriusan yang memfokuskan kepada sampah bukan hanya sampah akibat COVID ini namun sampah pada umumnya ini akan terjadi permasalahan tersendiri Ibu Menteri. Mungkin ada terobosan bagaimana Ibu Menteri ini membuat alat, membelanjakan alat yang canggih, silakan studi banding ke luar negeri atau dalam negeri di Bandung memanfaatkan teknologi dalam negeri atau luar negeri bagaimana di TPS itu ada truk sampah yang bisa mengelola dari barang? karena menurut saudaranya, bukan saudara Slamet, saudaranya Slamet, saudara Madura itu sampah menjadi uang. Nah ini bagaimana sampah dipinggir jalan itu Ibu Menteri yang sudah menjadi masalah tersendiri antara kabupaten kota apalagi perbatasan antara Kabupaten A dengan B dibuang di tengah-tengah saling-saling mengklaim bahwa itu sampah kota A dan itu kota B Bahwa sehingga tidak terangkut, bagaimana Ibu Menteri mencari sebuah alat, bagaimana sampah jadi itu menjadi setengah jadi di TPS akhirnya diangkut ke TPA dengan sudah nantinya menjadi barang jadi dan menjadi uang.

Yang kedua saya tertarik ada swastanisasi sampah, bagaimana ini digerakkan diseluruh Indonesia dari provinsi miskin kata-kata orang NTT yang menjadi Wakil Komisi IV DPR RI itu Pak Doktor itu sering menyampaikan, saya ini NTT ini kota miskin tapi ada terobosan yang menarik itu, itu bisa dicontoh barangkali kita bisa gerakkan seluruh kabupaten kota untuk menswastakan dengan dimotivasi oleh Bu Menteri melalui Dirjennya dicarikan solusi yang terbaiklah.

Yang kedua rakyat sudah rindu dan jenuh di rumah termasuk saya. Nah bagaimana Taman Nasional ini segera dibuka Bu Menteri terutama Gunung Bromo. Gunung Bromo ini sudah banyak warga masyarakat luar Kabupaten, luar provinsi yang sudah bertanya kapan Pak Hasan Gunung Bromo dibuka? sebentar saya sedang Raker dengan Ibu Menteri akan saya tanyakan. Korkopinda setempat sudah rapat sejak kemarin mempersiapkan dibukanya kembali Gunung Bromo sebagai sarana agar supaya Rakyat

Indonesia sehat berekreasi tidak di mall, *care free day* di Jakarta diusahakan datang ke kampung halaman diseluruh Republik Indonesia.

Yang ketiga gerakan 2021 ini bagaimana memobilisasi rakyat untuk melakukan program padat karya Bu Menteri. 3 usulan ini barangkali Pak Ketua sekian terima kasih, *Insy Allah* saya Senin memimpin rapat. Kasihan pak ketua sudah sendiri

Wabillahiminthoriq.

Wassalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih yang mulia Pimpinan, masih ingat nama saya, masih sayang sama saya. Selanjutnya Ibu Endang.

F-GERINDRA (Dr. Ir. Hj. ENDANG SETYAWATI THOHARI, DESS., M.Sc.):

Ibu Menteri dan Pimpinan yang saya hormati terutama Ibu Menteri dan jajarannya.

Saya mengucapkan selamat Hari Raya "Mohon Maaf Lahir Batin.

Ibu Menteri yang saya hormati.

Tadi Pak Ketua sudah menyarankan untuk tidak membahas lagi tentang sampah, jadi saya hanya ingin beberapa hal yang ingin saya kemukakan yaitu tentang pengadaan bibit Bu Menteri. Bibit-bibit ini yang dilakukan untuk lahan kritis dan juga DAS mohon ditinjau lagi karena ada beberapa DAS yang sampai sekarang belum ditanami dengan tanaman-tanaman yang bisa mengurangi banjir. Kemudian yang kedua kami menyarankan Ibu Menteri bahwa bisa koordinasi dengan Kementerian Pertanian karena sekarang ini banyak sekali tanah-tanah yang diperlukan untuk pembibitan hortikultura tapi Kementerian Pertanian program hortikultura ini hanya di pekarangan. Jadi mungkin kalau ada tanah-tanah yang bisa dipakai untuk penanaman hortikultura mencegah impor buah-buahan itu bagus sekali.

Kemudian yang berikutnya adalah tentang penanganan limbah tadi nggak boleh tapi di Rumah Sakit Bogor diperlukan 27 titik yang menginginkan adanya plastik-plastik untuk menampung-menampung bekas-bekas dari limbah tadi, kemudian yang berikutnya adalah tentang konservasi sumber daya alam dan ekosistem. Jadi mohon dalam masa pandemi ini kita dihadapkan masuknya musim kemarau, nah jadi potensi Karhutla ini perlu ada inventarisasi lagi terutama *illegal logging* tadi yang sudah diungkapkan oleh Pak Ketua. Kemudian yang ketiga adalah tentang ketahanan pangan tadi, adanya masa pandemi ini membuka mata kita untuk mulai memperhatikan bahwa lahan-lahan yang ada di sekitar hutan mestinya bisa

ditanami dengan tanaman-tanaman pangan yang bisa membantu para pengelola hutan terutama hutan rakyat ini bu untuk menanganinya.

Kemudian berikutnya adalah tentang ekosistem bu, jadi karena kita ini kan sudah dikenal dengan nomor dua di dunia tentang tadi nomor dua di dunia tentang keanekaragaman hayati, jadi mohon ibu memperhatikan tentang yang sudah mulai keanekaragaman hayatinya berkurang dan juga tentang binatang-binatang yang ada di sekitar hutan-hutan itu sudah mulai mengalami penurunan habitatnya, jadi mohon itu diperhatikan. Demikian Ibu Menteri sekali lagi terima kasih, bibit-bibit yang tadi di sebarluaskan oleh ibu, kami di Cianjur belum dapat kiriman bu padahal kami sudah menunggu untuk penanaman bibit unggul, terima kasih.

Wabillahitaufik walhidayah.

Wassalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Bu Endang yang dari holtikultura itu bukan hanya untuk di halaman rumah, masa kalau di halaman rumah pohon durian mencapai 20.000 bibit kok di halaman rumah. Jadi tolong nanti staf ahlinya belajar bu, dibaca bahwa juklaknya itu holtikultura memberikannya bibit durian sebanyak 20.000 batang dan yang lain-lainnya itu hampir kurang lebih hampir 60 sampai Rp70.000, ya Bu ya? selanjutnya Pak Johan Rosihan nun jauh disana.

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):

Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Salam kangen Pak Ketua dan teman-teman semua Komisi IV DPR RI Bapak, Ibu,
Ibu Menteri yang saya hormati beserta seluruh jajarannya.

Pertama mungkin sama dengan semua teman-teman Ibu Menteri ingin menyampaikan teman-teman, *Insyah Allah* Komisi IV DPR RI untuk hutan lestari lingkungan berkelanjutan dan kesejahteraan masyarakat, *Insyah Allah* Komisi IV DPR RI juga akan komit untuk mendukung Ibu termasuk mungkin anggaran *Insyah Allah*.

Yang kedua Ibu Menteri saya ingin menyampaikan beberapa hal, yang pertama soal pendapatan belum Bu Menteri karena kita bicara evaluasi APBN yang karena APBN itu bukan hanya belanja tapi juga kita urus-urus pendapatannya ini. Catatan dari yang ibu sampaikan itu putusan perdata dari Rp19 triliun itu baru terbayar Rp100 miliar lebih, nah padahal 9 potensi inikan bisa untuk menambah pemasukan negara dari sektor kehutanan lingkungan hidup nih, itu yang pertama. Minta tanggapan Ibu Menteri bagaimana caranya agar potensi Rp19 triliun sebagai sebuah keputusan yang sudah inkrah ini bisa kita kemudian kita tarik atau kita tagih gitu biar bisa menjadi pendapatan negara.

Yang kedua, terkait dengan realisasi perhutanan sosial yang secara fisik baru 32% ditambah lagi dengan minimnya realisasi anggaran untuk apa perhutanan sosial ini baru sekitar 18%. Kalau data di Dapil saya Pulau Sumbawa baru sekitar 5.169,54 hektar, nah ini kalau dari target yang disampaikan tadi itu kan sangat rendah sekali. Nah bagaimana caranya agar perhutanan sosial, karena ini menyangkut tentang 32 juta penduduk di 33.000 desa di seluruh Indonesia yang ada di kawasan hutan ini karena ini kalau bisa dipercepat realisasinya tentu akan meningkatkan pendapatan atau meningkatkan ekonomi masyarakat di sekitar kita.

Mungkin menurut saya kementerian perlu membentuk pusat pelaporan untuk dan pelayanan akses kelola perhutanan sosial ini, intinya bagaimana kita mempercepat atau mungkin juga menambah anggarannya di perhutanan sosial ini karena sangat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat itu yang pertama.

Yang kedua dikarakter pertama Ibu Menteri saya menyampaikan agar ada pos Gakkum di Pulau Sumbawa agar mungkin, Dirjen Gakkum ini bisa memikirkan itu agar potensi-potensi hutan kita terutama di selatan juga di Gunung Tambora itu tidak kemudian diselundupkan karena ada juga indikasi pelabuhan-pelabuhan di sekitar Taman Nasional Gunung Tambora itu itu dijadikan sebagai tempat penyelundupan baik itu kayu maupun hasil perkebunan. Kalau misalnya ada lucu menjadi apa menjadi pembicaraan di tengah-tengah masyarakat kemudian contoh di Kabupaten Dompu itu kita punya pabrik gula di sana tetapi katanya itu gulanya itu dimasukkan dari luar karena dilihat dari apa tanaman tebu nya di daerah Taman Nasional Gunung Tambora itu tidak memadai untuk kemudian menghasilkan tebu itu jadi pabrik itu hanya jadi semacam kamuflase saja itu bisa menjadi perhatian.

Yang berikutnya Ibu Menteri yang saya hormati,

Tadi sudah disinggung beberapa hal yang kedua soal Taman Nasional. Nah di NTB ini ada dua Taman Nasional. Ada Taman Nasional Gunung Tambora dan ada Taman Nasional Gunung Rinjani. Nah saya bicara dulu tentang Taman Nasional Gunung Tambora karena ini yang ada di Dapil saya. Seminggu yang lalu saya berjalan-jalan ke sana Bu Menteri, saya mendapatkan kantor di Taman Nasional Gunung Tambora ini dia sepi ditengah Savana Dorocana ya, tidak terawat, tidak ada pagarnya padahal itu adalah bisa menjadi pintu masuk pendakian di Gunung Tambora. Potensi di situ sudah banyak sekali ada kopi, ada kayu putih macam-macam ada disitu dan dengan kekayaan *geothermal* dan lain-lain sebagainya tapi kantornya tidak memadai untuk itu. Padahal setiap tahun di situ ada event nasional yaitu Tambora Menyapa Dunia tetapi kalau kantor Taman Nasional kita seperti itu ya tidak menarik dan tidak ada apa dampak dari kegiatan nasional itu kan rugi kita revisi anggaran padahal dulu pernah kita sarankan minimal gitu dikembangkan semacam *nomaden tourism* ya.

Jadi mungkin Taman Nasional kita bisa menyiapkan tenda karena Pemerintah tidak mengizinkan orang bangun Hotel atau penginapan minimal

bisa menyiapkan tenda untuk orang-orang yang mempunyai hobi di bidang *tourism* terutama *tourism nomaden*.

KETUA RAPAT:

Pak Johan cukup?

F-PKS (H. JOHAN ROSIHAN, S.T.):

Berikutnya yang satu lagi Pak Ketua, Taman Nasional Gunung Rinjani. *Insyah Allah* Bu Menteri hari Sabtu besok Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Barat bersama Taman Nasional Gunung Rinjani membuat acara Lombok Pegawai sebagai sebuah tanda dibukanya jalur Rinjani. Karenanya saya meminta perhatian Ibu Menteri soal dukungan sarana dan prasarana pendakian, reboisasi di sekitar tapak dan pengelolaan sampah di Rinjani yang kebetulan peminatnya sangat banyak, tentunya sampahnya juga banyak, nah ini mungkin pengelolaan sampahnya ini bisa menjadi perhatian. Itu Pak Ketua terima kasih.

Wassalaamu'alaikum warrahmatullaahi wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Terima kasih Pak Johan segeralah datang di Jakarta ada yang menanti anda, selanjutnya Pak Asikin Sultan.

F-GERINDRA (Dr. H. AZIKIN SOLTHAN, M.Si.):

Terima kasih Pak Ketua.

Teman-teman Anggota Komisi IV DPR RI yang saya hormati.

Terkait dengan pembuangan limbah medis di daerah Sulawesi Selatan. Ibu Menteri memang di Sulawesi Selatan sudah ada proses pemusnahan limbah medis itu di kawasan industri Makasar tapi kapasitasnya sangat kecil sehingga yang bisa dilayani adalah wilayah Makasar dan sekitarnya, daerah-daerah lain Ibu Menteri masih mengirim limbah medisnya itu ke Surabaya, itu satu hari satu malam baru sampai.

Oleh sebab itu, Ibu Menteri saya ingin mengusulkan agar proses perizinan limbah medis itu bisa dipermudah agar masyarakat dan Pemerintah Daerah dapat melaksanakan proses tersebut. Didapil saya Ibu Menteri ada daerah yang sudah menyiapkan lahan di kawasan industri Bantau dan dia akan bekerja sama dengan beberapa kabupaten kalau saya ga salah ada 8 kabupaten, dia akan merger nanti pembangunannya untuk menangani hal tersebut. Kalau itu bisa diproses secara cepat, saya yakin pemusnahan limbah medis yang ada di Selatan, di Sulawesi Selatan bisa tertekan dan kalau ini kita laksanakan inilah wujud desentralisasi yang selalu didengungkan oleh Pemerintah Pusat.

Yang kedua Ibu Menteri, tanggal 12 yang lalu didapat saya terjadi bencana alam banjir ini diakibatkan karena curah hujan yang terus menerus selama 3 hari dan terjadinya erosi di beberapa lereng Gunung Lokomata. Sehubungan dengan hal tersebut ada beberapa aliran sungai yang rusak bahkan menambah aliran sungai baru. Di daerah tersebut kurang lebih 2.000 rumah yang rusak termasuk rumah jabatan Dandim, rumah jabatan Kapolres, dan kantor perizinan yang ada di daerah Kabupaten Bantaeng. Sehubungan dengan hal tersebut Ibu Menteri, Panglima telah mengirim alat-alat berat kesana tetapi untuk melakukan normalisasi sungai membutuhkan alat-alat tersendiri, katakanlah alat-alat yang ada di Kementerian Kehutanan dan Lingkungan Hidup agar dapat membantu kondisi tersebut. Ini mungkin yang perlu kami sampaikan pada kesempatan ini, terima kasih Pak Ketua.

Wassalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum salam.

Selanjutnya yang mulia Pimpinan Komisi IV, Pak Budi Satrio.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-GERINDRA (G. BUDISATRIO DJIWANDONO):

Baik terima kasih Pak Ketua.

Ibu Menteri dan jajarannya yang saya hormati.

Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Selamat sore dan terima kasih atas kesempatan yang diberikan.

Sebenarnya tadi banyak yang sudah mengungkapkan tetapi saya ingin menggaris bawahi tadi apa yang dikemukakan oleh senior saya Pak Hasan Aminuddin. Kemarin saya mendampingi Ibu Vivien untuk mengikuti seminar didapat saya dan saya rasa ini adalah bentuk program yang sangat baik ya dan kemarin itu mungkin saya bisa cerita sedikit itu pembimbingannya sangat baik, sangat teknis, dan sangat dibutuhkan khusus untuk penyedia jasa-jasa kesehatan yang ada di daerah masing-masing.

Yang tadi saya tangkap dari Pak Hasan saya sangat setuju bagaimana kita bisa mengencarkan metode ini untuk keluar bukan cuman di lingkup pembuangan atau penanganan sampah limbah B3 tapi sampah secara umum juga. Yang saya lihat juga mungkin kita bisa menggunakan momentum ini untuk mengadakan program-program seperti yang kita lakukan atau *e-learning* yang sudah kita lakukan bermitra dengan KLHK di dirjen-dirjen lainnya di lingkup KLHK, kita bisa bicara, kita bisa edukasi masyarakat secara umum mulai masalah konservasi, *climate change* ini banyak sekali yang

sebenarnya mendambakan *webinar* atau *e-learning* proses seperti ini dan saya rasa ke depan Bu Menteri ini bisa dipikirkan untuk dikembangkan lagi.

Jadi kalau kita dengan Ibu Vivien, kita bicara penanganan sampah dan limbah B3, kita bisa mungkin sama Pak Wiratno kita mengadakan webinar yang sama untuk masalah-masalah konservasi dan sebagainya. Saya rasa pandemi COVID-19 ini kita bisa gunakan sebagai momentum untuk benar-benar kita mengedukasi masyarakat secara luas dan saya sepakat ini terobosan-terobosan sangat dibutuhkan bukan cuman untuk penanganan limbah B3 tapi limbah sampah pada umumnya. Pak Hasan ungkapkan kita perlu terobosan untuk penanganan sampah di lingkungan rumah-rumah kita masing-masing. Pada saat saya melakukan *webinar*, saya lebih menitikberatkan kedisiplinan atau perilaku yang diperlukan untuk orang-orang mengetahui, menangani sampah di rumah masing-masing karena itu juga ke depan bisa menjadi sumber penyakit atau sumber pandemi baru yang kita ingin hindari.

Kedua mengenai daerah aliran sungai juga, Ibu Menteri tolong menjadi perhatian. Didapil saya ingin melaporkan juga kemarin ada beberapa bencana banjir, salah satunya sudah kita tangani dan solusinya sudah kita diskusikan di Kabupaten Paser tapi dari tahun ke tahun juga Kota Samarinda dan daerah aliran sungainya itu sangat-sangat membutuhkan perhatian. Jadi kalau boleh nanti Ibu Menteri, kita cari solusinya bersama.

Jadi saya kira ini dua hal yang ingin saya kemukakan pada kesempatan ini. Terima kasih lagi tadi atau kesempatan Pak Ketua dan minggu depan kita akan berjumpa lagi, terima kasih pak.

KETUA RAPAT:

Pak Budi jangan lama-lama, ada yang kangen disini.

Selanjutnya Pak Bambang Purwanto dari Kalimantan Tengah.

F-PD (BAMBANG PURWANTO, S.ST., M.H.):

Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

Yang terhormat Pimpinan dan Seluruh Anggota,
Dan yang saya hormati Ibu Menteri beserta seluruh jajarannya.

Ada beberapa pertanyaan dan dukungan terkait dengan, yang pertama program yang beberapa saat yang lalu kami mengeluh terkait dengan kondisi lahan masyarakat setempat yang masih masuk dalam kawasan hutan produksi dan *Alhamdulillah* dari KLHK sudah membuat program Tora, namun perlu kami sampaikan bahwa program ini ada sebagian yang tidak tepat sasaran karena setelah kami evaluasi pada saat reses ada lahan pengusaha yang justru mendapatkan program ini dan masyarakat petani sebagian tidak mendapat program ini.

Setelah kami tanyakan kepada orang yang melakukan evaluasi dari kehutanan ternyata dasarnya adalah peta dari pusat dari citra satelit. Harapan kami agar kiranya *floating* ini bisa disesuaikan dengan kondisi yang ada di lapangan karena jangan sampai nanti masyarakat setempat ini ketika mau membuka ladangnya ditangkap oleh Polisi, dan bahkan sudah ada yang memotong pohon untuk memperbaiki rumah diladangnya itu ditangkap oleh Polisi, ini kasihan.

Kemudian pada saat kondisi saat ini kalau masyarakat di sekitar hutan ini tidak mendapatkan perhatian dari Kementerian tentu ini akan menjadi potensi konflik kedepan, oleh karena itu kami memberikan dukungan terkait dengan program Tora agar tetap diteruskan, nanti akan kami berikan data dari tabel kami kepada Ibu Menteri.

Kemudian yang kedua, terkait dengan bibit produktif dan bibit kebun bibit rakyat. Kemarin sudah dapat cuman Ibu Menteri perlu kami sampaikan bahwa Kalimantan Tengah ini luasnya 3 x Pulau Jawa. Jadi ketika mendapatkan bibit produktif 20.000 ini ga ada artinya padahal harapan kami ini bisa digunakan untuk melakukan reboisasi terkait dengan lahan-lahan yang beberapa tahun terakhir sering terjadi kebakaran dan antusias masyarakat luar biasa Ibu Menteri sehingga kami minta tambahan kuota sesuai dengan harapan dari masyarakat Kalimantan Tengah.

Kemudian yang ketiga terkait dengan sampah, sampah ini yang bisa di daur ulang memang banyak tetapi ada yang tidak bisa didaur ulang seperti plastik kresek termasuk juga terpal, ban bekas yang sudah tidak bisa digunakan lagi, kemudian juga bekas karung-karung, ternyata ini bisa diproses, bisa dimusnahkan. Kemarin kami melihat dimedia sosial perlu kami coba ternyata ini cukup efektif dan ini masih kami mencoba nanti kami sampaikan kepada Ibu Menteri untuk membuat peralatan guna memusnahkan plastik-plastik yang selama ini tidak ada manfaatnya. Saya kira itu yang dapat kami sampaikan, terima kasih.

Wassalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum salam.

Selanjutnya Pak Rudi dari NTB, Pak Rudi dari NTB ada? nggak ada? kalau nggak ada Pimpinan bayangan Pak Slamet Ariyadi silakan. Oh ini Pak Rudi dulu silakan, kalau nggak ada Pak Pimpinan Bayangan dulu silakan.

Silakan Pak Slamet 1 menit.

F-PAN (SLAMET ARIYADI, S.Psi.):

Terima kasih Pimpinan Abah Sudin, dan Anggota Komisi IV DPR RI yang sangat saya cintai dan sangat saya hormati,

Ibu Menteri dan jajarannya yang saya hormati pula.

Sedikit mungkin yang akan kami ulas Ibu Menteri terkait dengan Karhutla dan sebagainya sudah teman-teman yang membahas, cuman kami ingin menambahkan terkait masalah adanya tambahan anggaran yang Rp500 miliar pada tahun 2020 dan Rp5 triliun pada 2021.

Prinsipnya kami sepakat untuk dilakukan penambahan, cuman dengan syarat kami ingin menitikkan bagaimana pengolahan sampah yang ada di desa, yang pertama juga yang ada di lingkungan Pesantren ini perlu diperhatikan Ibu Menteri, itu syaratnya karena ketika kita lihat pondok pesantren ini juga merupakan salah satu institusi pendidikan yang juga butuh bagaimana memiliki suatu manajemen lingkungan di dalamnya yang juga bisa mengolah sampah, yang memiliki sistem yang juga bisa mengantisipasi adanya pencemaran lingkungan khususnya dalam edukasi di dalam mengolah sampah karena kita lihat didalam pesantren khususnya dalam dunia pendidikan ini sampah pasti ratusan kilo yang tidak dikelola setiap harinya. Tentunya kita harapkan bagaimana pesantren selain hanya fokus pada pembinaan karakter dan *attitude*, kami harapkan KLHK hadir untuk memberikan suatu edukasi pembinaan agar pesantren memiliki karakter terhadap peduli terhadap lingkungan.

Jadi ketika kami melihat pada Februari lalu KLHK ada terobosan baru yaitu membangun instalasi pengolahan air limbah IPAL domestik ini sebetulnya ketika dijadikan program terpadu ini di lingkungan pesantren sangat bagus, mungkin nanti kita minta dukungan kepada Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI, bagaimana inovasi yang sudah dilakukan oleh Kementerian LHK ini bisa dijadikan suatu program lanjutan, sehingga antara Pesantren dan dunia pendidikan itu bisa melakukan pengolahan limbah ataupun sampahnya karena kami perwakilan Madura Ibu Menteri, Jawa Timur rata-rata mayoritas adalah 50% adalah dunia pesantren tentunya kami hadir, kami butuhkan hadirnya Ibu Menteri dan jajarannya bagaimana inovasi ini diciptakan di dunia pesantren.

Yang kedua Ibu Menteri karena ini ada usulan terkait masalah sampah yang berkeliaran Ibu Menteri di sekitar pasar, ini ada videonya kami dikirim oleh salah satu desa.

KETUA RAPAT:

Pak Pimpinan Bayangan bukan sampah yang berkeliaran, tapi sampah yang berserakan atau berantakan, iya bukan berkeliaran sampahnya?

F-PAN (SLAMET ARIYADI, S.Psi.):

Iya, iya bisa diartikan Pak Ketua, Iya terima kasih Pimpinan atas koreksinya.

ini Bu Menteri saya minta bagaimana yang kedua ini ada suatu inovasi Bu Menteri, minimal ada inovasi satu desa, satu pembinaan ataupun ada edukasi yang bisa diterapkan oleh Kementerian LHK karena kita sadari sampah ini akan menjadi masalah bagi kita hari ini hingga kepada 5 tahun kedepan bahkan kepada anak cucu kita. Tentunya kita harapkan untuk sampah-sampah ini yang di desa ini ada pembinaan, ada edukasi, kita mungkin bisa bekerja sama dengan desa, bisa bekerjasama dengan pihak kecamatan bagaimana ada edukasi manajemen untuk bisa mengelola lingkungan mulai dari desa misalkan satu inovasi untuk 1 Desa itu Ibu Menteri.

Mungkin itu saja yang kita harapkan, ini mungkin terakhir Ibu Menteri. Kita juga butuh transportasi bagaimana untuk bisa mengangkut sampah dari pesantren Ibu Menteri, itu yang terpenting selain itu juga ada tempat bantuan untuk pesantren untuk bisa mengolah sampah dan juga tempat untuk pembuangan sampah. Itu saja yang disampaikan

Wassalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum salam.

Bu saran saya tadi yang masukan dari Pimpinan Bayangan itu bagus sekali, jadi 2021 apabila dananya cukup dibantulah dari LHK bak-bak sampah dengan pakai logo LHK yang besar, jadi tidak ada penyelewengan untuk pembagiannya tapi satu lagi saya minta tolong kalau pembuatan bak sampah mutunya yang bagus lah supaya jangan pecah. Jangan nanti kalau bak sampah itu ada logonya LHK tapi adanya di rumah Pimpinan Bayangan, kan nggak bener itu. Selanjutnya Pak Bagus Adi, silakan.

F-PG (A. A. BAGUS ADHI MAHENDRA PUTRA, S.H., M.H.):

Iya terima kasih Pimpinan.

Pimpinan dan Anggota yang saya hormati, begitu juga Ibu Menteri.

Yang pertama menyikapi terkait anggaran saya memberikan apresiasi dan setuju terhadap penambahan anggaran yang ada. Yang kedua terkait dengan Pandemi COVID-19 ini dimana pertanggal 15 Juni 2020 kalau saya tidak salah mengartikan dan membaca di anggaran masih kisaran diangka 27% lebih sedikit lah.

Nah jadi kira-kira dengan kondisi tersebut, kira-kira bagaimana gambaran Bu Menteri tentang kebijakan anggaran yang kurang lebih berkurang lagi sekitar Rp6,793 triliun tersebut, mudah-mudahan bisa habis pada waktunya dan yang ketiga adalah tadi teman-teman Para Anggota sudah menyampaikan terkait dengan limbah dan pada kesempatan ini saya menyarankan dan mengusulkan selama ini persyaratan pembangunan rumah

sakit sudah bagus, namun perlu adanya peraturan yang lebih mengikat dan lebih kuat dimana pembangunan rumah sakit itu diwajibkan dan harus ada pengolahan sampah yang dekat pada sumbernya. Sumber yang dimaksud adalah rumah sakitnya bukan lagi dalam arti wilayah karena didalam era COVID ini seperti Ibu Menteri sampaikan, peningkatan sampah tersebut sampai limbah tersebut sampai dengan 30% dan bagaimana terjadinya pada pengemasan, sudah itu penyimpangan yang waktunya hanya 2 hari dan sekarang pengangkutan dari Anggota sampaikan lebih kepada subjek yang ini akan menimbulkan masalah baru terhadap lingkungan kita.

Terus yang ketiga tadi teman saya Pak Slamet telah menyampaikan hal yang sama dengan Anggota lainnya. Usul konkrit saya bagaimana Ibu Menteri membuat sebuah terobosan adanya pengelolaan sampah yang menghasilkan langsung sampah organik dimana Bang Pesona yang kita berikan kepada masyarakat pada hutan-hutan sosial ini sangat membutuhkan pupuk yang begitu besar dan alangkah lebih baiknya kalau kita bisa menghasilkan suatu yang dikatakan Pak Ketua tadi tong sampah, dimana tong sampah ini bisa menjadi suatu fermentasi terhadap sampah-sampah organik yang hanya beberapa minggu kemudian bisa menghasilkan pupuk organik, nah ini akan lebih bagus sekali.

Terus yang keempat, Ibu Menteri sudah saatnya kita *care* pada lingkungan dan apakah tidak sebaiknya kita wajibkan kepada masing-masing kabupaten kota memiliki hutan kota sehingga ketersediaan atas udara yang bersih ini bisa kita dapatkan, nggak bisa kita capai di wilayah nusantara ini. Dan yang terakhir, dapat saya laporkan kepada Ibu Menteri bahwasanya perkembangan hutan sosial kita ini masih sangat jauh sekali antara yang berhasil dan antara yang belum berhasil.

Nah oleh sebab itu kegiatan lomba-lomba atau penilaian yang Ibu Menteri sudah lakukan yang dilakukan oleh staff ibu, alangkah lebih banyak sekarang setiap tahun pada hutan sosial ini kita laksanakan lomba yang berbasis evaluasi, nah sehingga produk-produk turunan yang dihasilkan oleh hutan sosial ini bisa kita terevaluasi dengan baik yang outputnya adalah yang bisa meningkatkan kesejahteraan masyarakat menengah hutan tersebut, nah itulah yang kira-kira nanti bagaimana? inilah konsepnya ini yang perlu kita bahas lebih baik dan lebih konkret dan ini juga akan menunjang.

Ada beberapa temuan yang saya lihat dilapangan, Kepala Desanya kurang mendukung dari pengelola hutan sosial kita, nah atau sekarang lomba ini yang stempelnya adalah kementerian yang bisa kita laksanakan setiap tahun maka ini akan merangsang sinergi antara pengelola hutan sosial kita dan Kepala Desa yang ada atau Lurah yang ada di.

KETUA RAPAT:

Cukup Pak Bagus?

F-PG (A. A. BAGUS ADHI MAHENDRA PUTRA, S.H., M.H.):

Mungkin itu kira Pimpinan, ada kekurangan kiranya mohon dimaafkan, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, selanjutnya Pak Rudi tadi sudah ada belum?Pak Rudi, kalau belum, Pak Rudi ada nggak?

F-PAN (H. MUHAMMAD SYAFRUDIN, S.T., M.M.):

Assalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum salam.

F-PAN (H. MUHAMMAD SYAFRUDIN, S.T., M.M.):

Pak Ketua.

Iya terima kasih Pak Ketua.

Yang terhormat teman-teman yang di Jakarta, Ibu Menteri yang saya hormati dan Pak Dirjen.

Saya sekarang ada dikantor di Taman Nasional Tambora yang berada di Dompu, jadi salam buat semua dan saya didampingi oleh Kepala Balai kemudian dan teman-teman. bu Menteri saya ada yang ingin disampaikan untuk Taman Nasional Tambora saya mengusulkan dalam (suara tidak tidak jelas/sinyal tidak bagus) kalau bisa dipertimbangkan. (suara tidak tidak jelas/sinyal tidak bagus) kemudian yang kedua saya memohon kepada Ibu Menteri untuk mengadakan yang bisa digunakan karena sinyalnya tidak stabil sangat penting mengingat Tambora ini dikatakan tadi tidak hanya milik Indonesia tetapi milik dunia. Saya kira itu saja Ibu Menteri, sehat selalu dari kampung halaman, Pak Ketua terima kasih.

KETUA RAPAT:

Wassalaamu'alaikum warhmatullaahi wabarakaatuh.

Terima kasih Pak Rudi, yang terakhir Ibu Maria dari Kalimantan Barat.

F-PDIP (MARIA LESTARI, S.Pd.):

Baik selamat siang.

Salam sejahtera bagi kita semua.

Yang terhormat Pimpinan Rapat, beserta Wakil Ketua, beserta rekan-rekan Anggota Komisi IV DPR RI yang saya hormati,
Yang terhormat Ibu Menteri Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan beserta jajaran.

Yang pertama saya ucapkan "*Minal aidzin walfaidzin*" pada kita semua, izin Pimpinan, kedengaran Pimpinan? izin Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Jelas sekali bu,.

F-PDIP (MARIA LESTARI, S.Pd.):

Nah yang pertama tertanggal tanggal 8 April 2020 KLH melakukan refocusing kegiatan anggaran sebagai instruksi Presiden Nomor 4 2020 sebesar Rp230 miliar, nah tertanggal 15 April 2020 menindaklanjuti masukan Komisi IV DPR RI maka anggaran refocusing KLHK bertambah menjadi Rp1 triliun, anggaran penghematan sebesar Rp1,6 triliun. Nah April 2020 sehingga sampai sekarang tetap konsisten melaksanakan kegiatan berbasis masyarakat melalui cara baru. Nah sesuai data yang terlampir dalam halaman 28 yang tercantum dalam bahan Kementerian KLHK, nah yang ingin saya ketahui cara baru yang dimaksud seperti apa Ibu Menteri? nah serta seperti apa proses implementasinya, sehingga program baru tersebut bisa langsung menyentuh kepada masyarakat.

Nah selain itu saya juga menyoroti program KBR, dengan biaya yang sangat minim perkelompok Rp50 juta apakah ini bisa efektif yang nantinya bisa berdampak positif untuk mendukung perekonomian masyarakat? nah sehingga kiranya untuk menjadi bahan evaluasi kembali.

Nah kemudian program penanganan limbah dari KLHK sekedar informasi untuk di Kalimantan Barat masih banyak rumah sakit yang memerlukan APD, tong sampah serta plastik khususnya untuk limbah, yang dimaksud di mana yang bisa mengurangi maupun untuk mencegah penularan COVID-19. Jadi mohon kepada Ibu Menteri untuk memperhatikan itu juga.

Nah kemudian juga diperhatikan mengenai bantuan program untuk perhutanan sosial khususnya di Provinsi Kalimantan Barat, kita semua sepakat merupakan salah satu hutan yang terbesar di Pulau Kalimantan sehingga kiranya perlu untuk mempercepat realisasinya maupun untuk penambahan kuota karena kuota yang ada sangat minim sekali guna untuk membantu kelompok masyarakat yang sangat membutuhkan bantuan program tersebut. Nah perlu diketahui karena di daerah Kalimantan adalah pulau terbesar di Kalimantan juga, nah ini rawannya juga Bu ya? ini Kalimantan Barat nah khusus untuk yang Kalimantan Barat wilayah Kalimantan Barat perlu diwaspadai, antara kisaran Agustus dan September itu curah hujan menengah sangat tinggi. Secara umum dari BMKG memprediksi puncak musim kemarau tahun ini terjadi pada Agustus, nah

puncak kemarau tahun ini adalah di bulan Agustus dengan frekuensi jumlah wilayah antara lebih dari 64%. Dari data MKG maka saya menyarankan Kementerian atau lembaga terkait lainnya segera merencanakan berbagai upaya pencegahan dan penanganan Karhutla di daerah rawan dan salah satunya teknologi modifikasi cuaca (TMC) teknologi modifikasi cuaca mudah-mudahan ini bisa dilakukan saat periode peralihan musim hujan di musim kemarau.

KETUA RAPAT:

Cukup? Ibu Maria cukup.

Ada lagi?

F-PDIP (MARIA LESTARI, S.Pd.):

Satu lagi ya pak? Untuk Badan Restorasi Gambut, nah apakah akan dibuat kembali Perpresnya? karena yang kita ketahui di bulan Desember 2020 akan berakhir Perpres Nomor 1 tahun 2016 tentang restorasi gambut. Nah di sini ada Provinsi Riau, Jambi, Sulsel, Kalbar, Makassar dan Papua, jadi ada 7 provinsi yang ada tentang restorasi gambut, nah ini Perpres Nomor 1 Tahun 2016. Nah untuk pagunya sendiri dengan pagunya.

KETUA RAPAT:

Pagunya nggak perlu disebutkan, masing-masing Anggota sudah pegang bahan.

F-PDIP (MARIA LESTARI, S.Pd.):

Rp215.244.000.000,00 nah prediksi dibulan Agustus akan ada kemarau panjang pak, nah di BMKG.

KETUA RAPAT:

Cukup ya bu? cukup karena waktunya juga singkat.

F-PDIP (MARIA LESTARI, S.Pd.):

Siap pak, jadi saya minta Badan Restorasi Gambut.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Intrupsi Pimpinan. Setengah menit, setengah menit Pimpinan. Mumpung ingat.

Saya mumpung tadi ada yang terlewat, Ibu Menteri terkait RUU Cipta Kerja. ibu saya mohon tolong untuk KLHK membaca ulang, mengevaluasi ulang, kemarin kami mendiskusikan bawa ini perlu *one map policy, one map*

policy. Dari awal saya sampaikan kebijakan satu peta ya karena terkait dengan RUU Cipta Kerja ini karena jangan sampai nanti terus-menerus menjadi permasalahan yang tidak jelas. Itu saja pimpinan, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Pak Sekjen mengenai Omnibus Law ini banyak, banyak sekali kewenangan LHK yang dipangkas. Kalau ini sampai terjadi, bagaimana semua ditarik ke Pemerintah Pusat dengan kata lain Pemerintah Pusat adalah Presiden. Apakah sanggup membaca, menilai satu persatu, ini saja kendalanya begitu.

Demikian pertanyaan dan tanggapan yang disampaikan oleh Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, selanjutnya kami persilakan kepada Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan jawabannya bu. Saran saya tidak perlu menyebutkan Anggota satu persatu, tetapi kan ini saya pikir enggak lebih dari 10 item lah. Pertama mengenai sampah ilegal, COVID, kemudian pencegahan kebakaran hutan dan lain-lain itu saja bu, jadi supaya waktunya efisien, terima kasih.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Terima kasih.

Yang kami hormati Pimpinan Komisi IV DPR RI,
Yang terhormat Ibu dan Bapak-bapak Anggota Komisi IV DPR RI.

Dalam catatan saya ada 72 pertanyaan. Saya kira untuk keperluan RDP Pak Ketua yang terhormat, ini saya akan minta para Pejabat Eselon 1 untuk membuat jawabannya tertulis. Ini sekaligus kalau kita nulis itu kan kita jadi ingat bawa ini pekerjaan, ini PR ini harus diselesaikan.

Terima kasih Pak Ketua saya akan menjawab *highlight*. Pertama, Saya juga menyampaikan permohonan maaf lahir batin atas berbagai hal selama kita berinteraksi, tadi merespon catatan dari yang terhormat Ibu dan Bapak Anggota.

Kemudian tentang deforestasi Pak Ketua tadi beberapa yang Anggota menyampaikan *illegal logging* dan sebagainya. Langkah-langkah penegakan hukum cukup intensif dilakukan, operasi juga banyak dilakukan. Kami mohon restu karena sedang mulai membahas tentang mengenai regulasi untuk *chenso*, pemotongnya. Karena kelihatannya mungkin cara itu bagaimana kita melihat, kita teliti yang ngejual, kita teliti yang beli, kita teliti yang makai.

Jadi yang dulu pernah ada pada tahun 95 Keppres nya yaitu Keppres 21 tahun 95, kami sudah meminta Pak Sekjen untuk mulai meneliti lagi Keppres ini, mungkin relevan Pak Ketua. Jadi kami mohon nanti mungkin juga referensi dari beberapa Anggota Komisi IV DPR RI terutama yang tadi

menanyakan tentang deforestasi, ini mungkin salah satu instrumen akhirnya yang kita memang terpaksa harus pakai.

Kemudian tentang Khusus dan TORA, memang tidak mudah tetapi kita semua tahu bahwa ini program yang sangat baik, cukup kompleks banyak kejadian-kejadian di lapangannya tetapi memang Dirjen sedang terus-menerus melakukan langkah-langkah untuk memperbaikinya. Semula juga memang respons daerah juga relatif kurang tapi lama-kelamaan mungkin setelah lihat hasilnya dan kebutuhannya di lapangan itu sudah mulai. Oleh karena itu saya mohon izin untuk kita terus-menerus dulu melakukan hal ini.

Tadi catatan untuk KUPS pendamping sarana dan sebagainya untuk hutan sosial dan sebagainya, kami rekam untuk menjadi catatan dari yang terhormat Anggota Komisi IV DPR RI untuk menjadi pedoman ataupun untuk langkah-langkah yang harus dilakukan kedepannya.

Karhutla, tadi saya sudah menceritakan banyak Pak Ketua, dokumennya juga ada. intinya kami sangat mewaspadaai itu dan kita akan lakukan secara permanen sebetulnya perintah Presiden. Oleh karena itu langkah melakukan modifikasi hari hujan atau cuaca itu memang sangat penting Tetapi ada satu hal lagi yang saya juga sudah minta Pak Wamen dan Pak Sekjen untuk mengawali diskusi karena ada hal-hal lain yang secara permanen sebetulnya potensial untuk bisa menolong persoalan Karhutla ini yaitu berkaitan dengan Pasal 69 Undang-undang 32 menyangkut "pembakaran lahan 2 hektar" yang selama ini di lapangannya sebetulnya dimanfaatkan secara tidak baik tetapi ini memang diperlukan oleh masyarakat dalam pertanian tradisional, ini juga akan menjadi langkah.

Kemudian tentang limbah medis, saya kira kita sudah berusaha memang ketika kejadian COVID minggu pertama itu Dirjen PSLB3 sudah memberikan pedoman kepada daerah, kita juga terus berinteraksi dengan daerah, kita juga terus memonitor perkembangannya. Saya mencatat tadi saran-saran dan catatan-catatan untuk kita memperbaiki meningkatkan dan memperhatikan daerah-daerah seperti yang tadi disampaikan oleh yang terhormat Anggota. Jadi ada beberapa daerah-daerah tertentu yang minta perhatian untuk ini kita lakukan.

Pengelolaan DAS, ini memang sumber DAS itu kan sebetulnya kalau ada Gunung sama Gunung, kemudian punggungnya gunung sebelah kanan dengan punggung sebelah kiri, dia menyatu ada sungai besar di tengahnya itu namanya DAS. Luasnya bisa 800.000, tapi ada yang cuma 60.000, ada yang satu juta lebih seperti di Kalimantan Barat.

Nah tentang DAS ini dalam kewenangannya memang ada yang bagiannya Menteri PU karena kalau bicara Sungai tadi ada yang minta diberesin sungainya, alur Sungai nya dinormalkan itu semua urusannya PU tapi memang yang bagian pohon-pohonnya, perilaku masyarakatnya itu bagiannya KLHK. Oleh karena itu saya memang sedang memikirkan, ini sekaligus menjawab apa hal-hal baru sebenarnya yang harus kita lakukan. E-

learning yang dibantu dan di *carriage* atau yang didukung oleh yang terhormat Pimpinan dan Anggota untuk kelompok tani hutan sosial itu ternyata hasilnya baik karena ada interaksinya, masyarakat menyambut baik, dia juga dapat *sangu* begitu selama latihan.

Kita di KLHK belum punya program Padat Karya atau Padat Karya Tunai, saya sedang minta Pak Sekjen dan para Dirjen yang terkait misalnya bisa padat karya tunai untuk tanam pohon, Padat Karya tunai untuk bangunan bangunan konservasi tanah dan air misalnya bikin DAM-DAM penahan yang kecil-kecil. Kita dengan PU berbagi tugas yang disebut *cekdam* atau DAM pengendali yang nilainya diatas 300 juta itu PU tetapi kalau yang DAM kecil-kecil cuman DAM kecil di pinggir-pinggir itu yang ngeberesin tidak longsor itu atau *gali plak* itu KLHK karena dananya kecil, ada yang cuman Rp10 juta, ada yang Rp50 juta, tapi ada yang Rp200 juta. Maka dalam kaitan itu kami memikirkan catatan tadi dari yang terhormat beberapa Anggota bahwa KBR harus dievaluasi.

Pak Ketua dan Bapak Pimpinan dan Ibu dan Bapak Anggota yang terhormat.

Saya tidak keberatan kalau KBR itu untuk kita lihat lagi bersama-sama karena angka yang 50 juta itu sebetulnya sejak tahun 2010, pada saat itu kenapa angkanya 50 juta? kalau menurut historisnya karena waktu itu di Perpres tentang Perpres Pengadaan Barang yang boleh langsung angkanya adalah 50 juta, kalau sekarang udah naik jadi 200. Jadi nanti kita bisa cek kembali Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Jadi tahun 2010 itu kenapa 50 juta? karena menterinya mengatakan akan menanam satu miliar pohon. Kalau nggak percaya hitung sendiri ya bu ya? iya itu aja tapi bu kalau dievaluasi juga sesuai dengan sasaran saya tadi, kenapa nggak di 1 Kabupaten atau 1 provinsi dibuatkan pusat pembibitan misalnya diberikan sekian dana pengembaliannya itu dari hasil pembibitan yang diserahkan kepada masyarakat atas rekomendasi Kementerian Kehutanan. Tolong nanti dikaji perihal Juklak, Juknisnya supaya jangan ada pelanggaran hukum.

Silakan bu.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Terima kasih Ketua, ini ada dirjen, ada Kabalitbang, ada Kepala BP2SDM, saya kira kita punya yang namanya kebun bibit rakyat, kita punya kebun bibit desa, kita punya kebun bibit permanen dan nanti kita harus punya kebun bibit modern. Jadi seperti yang disampaikan oleh yang terhormat Pak Ketua, saya kira nanti kita lihat ini masuknya di *degree* yang mana itu.

Izinkan kami menyelesaikan dulu rencananya Pak Ketua karena ini kalau kita sekarang bicara lingkungan sulit, berat harus dipulihkan memang

larinya kesini programnya sebetulnya. Ini sama restorasi gambut, rehabilitasi gambut selama pemulihan bekas tambang iya itu memang di sekitar-sekitar itu yang harus kita selesaikan. Hal yang baru apa saja? dengan demikian kita sebetulnya kita bisa melakukan *e-learning* dengan efektivitas yang tadi saya sudah sampaikan dari pelatihan yang untuk kehutanan sosial itu bisa dilebarkan kepada perencanaan DAS misalnya, kepada tadi juga pendidikan pengelolaan sampah. Jadi saya mendukung untuk dilakukan pengelolaan sampah bagi Pondok Pesantren, *Eco Pontren* dan juga yang lain-lain untuk beberapa hal. Jadi secara umum yang sangat krusial untuk pemulihan itu adalah gambut, *mangrove deforestasi*, habitat satwa dan *konservasi landscape*, jadi hal-hal seperti ini nanti yang menjadi catatan.

Saya juga memperhatikan dan ini ada dirjennya untuk limbah infeksius, kita sudah dari awal memperhatikan itu dan juga untuk sampah. Sampah ini memang sebetulnya udah beberapa hal juga ditangani seperti TPS (Tempat Pengelolaan Sampah Terpadu) TPS 3R itu juga ada yang untuk langsung bisa jadi pupuk, untuk *composting*, itu sebetulnya ada tetapi dengan usulan tambahan saya kira memang harus diperbanyak Karena skala masalahnya juga banyak. Jadi memang kami coba susun ini dan lalu sebetulnya sampah ini juga dengan alat RDF yang kira-kira harganya kalau saya udah lihat dan mungkin nanti yang terhormat Pimpinan dan Anggota, Kita bisa belajar di Mataram. Udah ada dari sampah bisa menjadi energi dengan pelek kecil-kecil yang bisa nanti kita juga bisa tawarkan ke tempat-tempat listrik PLN, apa anak-anaknya PLN unit-unitnya karena dari situ dia sekelas batu bara muda. Jadi sebetulnya peluangnya sangat besar, kita bisa lihat contohnya dengan baik di Mataram dengan teknologi RDF.

Sampah sebetulnya secara kelembagaan dan menurut Undang-undang itu bobot penanganannya atau tanggung jawabnya itu adanya di Pemda Kabupaten dan kota. Yang saya sangat menyadari bahwa tidak mudah karena dia bukan pemberi pendapatan buat daerah, dia benar-benar *call center* sehingga tidak gampang. Oleh karena itu yang dilakukan oleh KLHK adalah melakukan stimulan-stimulan. Jadi kita lakukan dan kita dorong.

Kemudian terkait dengan kawasan pariwisata, beberapa taman nasional kita sudah buka secara bertahap dengan protokol COVID yang sangat ketat berdasarkan ketentuan Menteri Kesehatan dan Menteri Pariwisata yang contohnya Bromo Tengger Semeru pintu masuk Malang, Probolinggo, Lumajang saya kira itu udah bisa dibuka seperti kami laporkan Rinjani juga udah bisa. Saya akan beri atensi Tambora kalau kondisi kantornya seperti itu karena dia *resort* ya Pak Sekjen? yang di Tambora itu *resort* jadi di bawah nanti kami akan cek, biasanya kalau yang di bawah memang jarang kelihatan, nanti kita cek Saya akan cek Pimpinan dan Malang termasuk yang relatif baik dalam dinamika COVID sehingga Malang-Probolinggo saya kira udah bisa jalan.

Kemudian untuk daya serap anggaran, saya minta memang kitakan baru nyelesaiin, baru selesai revisi dari *refocusing* itu pada bulan Mei. Jadi memang kita akan kejar, saya akan perhatikan dengan sebaik-baiknya.

Kelihatannya itu Pak Ketua yang paling-paling prinsip, nanti yang lain-lain saya kira akan dijawab secara tertulis. Jadi saya ingin menegaskan untuk usulan kami di 2020 tambahan Pak Ketua; untuk rehabilitasi gambut, untuk modifikasi cuaca, untuk edukasi *Eco Pontren* tadi saya kira itu bisa masuk di yang baru dan *e-learning* untuk daerah aliran sungai termasuk *water balance*.

Saya pernah kerja di Pemda 20 tahun dan saya tahu persis bahwa kalo kita paham tentang *water balance* Pemda itu tahu kapan hati-hati soal banjir dan kapan hati-hati soal kekeringan dan kapan ngajarin petani menanamnya kapan mulai tanaman, apa yang kira-kira baik dan sebagainya. Jadi kami akan jadi *develope e-learning* daerah aliran sungai dan *water balance*, saya sudah minta Dirjen untuk jajaki kerjasama dengan Fakultas Geografi UGM, juga saya akan minta karena terkait tadi dengan sampah dan limbah medis, penerapan panduan dan *masterplan* serta rencana operasi penanganan pengelolaan sampah secara tersistem terutama limbah medis.

Bapak saya minta maaf kalau ada kasus -kasus yang belum tertangani, kalau boleh Tenaga Ahli Anggota itu mencatat secara spesifik dan berinteraksi langsung karena bisa kita langsung tanganin. Itu dari kami Pak Ketua, Bapak Pimpinan dan Ibu dan Bapak Anggota yang terhormat, kurang lebihnya mohon maaf dan terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih, jadi Temen-temen Anggota Komisi IV DPR RI yang saya hormati apabila di wilayahnya terdapat pelanggaran baik itu mengenal limbah dan lain-lain tolong disampaikan baik melalui meja Pimpinan atau langsung. Yang kedua Bu Menteri, kalau kita lihat hutan lindung itu dibawah Pemerintah Provinsi kalau enggak salah bu ya? ini menjadi masalah sangat besar karena kita lihat di Dinas Kehutanan Provinsi dananya minim sekali. Dananya minim jadi bagaimana mau pengawasannya? bagaimana mau pengecekannya? bagaimana mau pencegahannya? karena setahu saya contohnya di Lampung hampir tiap 2, 3 bulan sekali ada yang ditangkap pembalok liar itu kayu sonokeling, cuman kasusnya sampai dimana saya nggak tahu karena begitu beritanya ada di tangkap, selanjutnya ya kurang pahami saya itu.

Terima kasih kepada Menteri Lingkungan Hidup Kehutanan yang telah menyampaikan jawabannya.

Bapak Ibu yang terhormat.

Dari dialog diskusi saran dan masukan Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, sebelum acara ini kita akhiri kami akan bacakan rancangan kesimpulan rapat kerja padahal hari ini. Betulkan bu? yang Rp500 miliar itu mau dimasukkan atau bagaimana? Rp500 miliar angkanya untuk penanganan Karhutla. Iya tadi Ibu berhenti ada mengusulkan tambahan Rp500 miliar karena kan kita nggak tahu nih kebakaran hutan sampai seberapa besarnya, seberapa jauhnya begitu. Jadi menteri mengusulkan tambahan anggaran, pencegahan, penanganan, pengendalian.

Nah iya sampah limbah medis. Bu Vivien kalau bisa emang dana ini bisa ada tolong dibantu apa tong sampah tadi, untuk awalnya dulu, terutama untuk pondok pondok pesantrennya Pak Slamet Pimpinan. Kalau mobil sampah itu kamu Anggota Dewan beliin sendiri. Bu Vivien jangan lupa motor *disinfectant*-nya, waktu itu usulannya secepat mungkin tapi sampai sekarang realisasinya belum ada. Kalau minggu ini *Insy Allah* nanti akhir bulan saya ke Lampung saya bagikan, begitu juga Teman-teman Anggota lainnya.

Yang pertama,

1. Komisi IV DPR RI menerima penjelasan atas pagu indikatif Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam RKAKL dan RPKPL tahun 2021 sebesar **Rp7.562.517.984.000,00** (tujuh triliun lima ratus enam puluh dua miliar lima ratus tujuh belas juta sembilan ratus delapan puluh empat ribu rupiah) berdasarkan SuratBersama Menteri Keuangan dan Menteri PPN/Kepala BAPPENAS Nomor S-376/MK.02/2020 dan Nomor: B.310/M.PPN/D.8/PP/04.02/05/2020 tanggal 8 Mei 2020 tentang pagu indikatif belanja Kementerian lembaga Tahun Anggaran 2021 dengan komposisi program Eselon I sebagai berikut :
 - a. **Sekretaris Jenderal**, Rp493.415.326.000,00 (empat ratus sembilan puluh tiga miliar empat ratus lima belas juta tiga ratus dua puluh enam ribu rupiah);
 - b. **Inspektorat Jenderal**, sebesar Rp70.613.724.000,00 (tujuh puluh miliar enam ratus tiga belas juta tujuh ratus dua puluh empat ribu rupiah);

Saran saya Ibu Menteri untuk Inspektorat Jenderal ditambahkan minimal 15 sampai 20 Karena kalau Inspektorat Jenderal ke wilayah, kedaerah sudah dijemput mobil oleh yang diperiksa, di bayarin hotel, dikasih oleh-oleh, diajak makan malam, diajak yang tidak-tidak, maka *wasallam*.

- c. **Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah, Pengelolaan Hutan Produksi Lestari**, sebesar Rp307.306.014.000,00 (tiga ratus tujuh miliar tiga ratus enam juta empat belas ribu rupiah);
- d. **Direktorat Jenderal Pengendalian Daerah Aliran Sungai dan Hutan Lindung**, sebesar Rp2.040.275.579.000,00 (dua triliun empat puluh miliar dua ratus tujuh puluh lima juta lima ratus tujuh puluh sembilan ribu rupiah);
- e. **Direktorat Jenderal Konservasi Sumber Daya Alam Dan Ekosistem**, sebesar Rp1.909.725.534.000,00 (satu triliun sembilan ratus sembilan miliar tujuh ratus dua puluh lima juta lima ratus tiga puluh empat ribu rupiah);
- f. **Direktorat Jenderal Planologi Kehutanan dan Tata Lingkungan Hidup**, sebesar Rp367.777.464.000,00 (tiga ratus enam puluh tujuh miliar tujuh ratus tujuh puluh tujuh juta empat ratus enam puluh empat ribu rupiah);

- g. **Badan Penelitian Pengembangan dan Inovasi**, sebesar Rp317.017.832.000,00 (tiga ratus tujuh belas miliar tujuh belas juta delapan ratus tiga puluh dua ribu rupiah);
- h. **Badan Penyuluhan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia**, sebesar Rp310.246.386.000,00 (tiga ratus sepuluh miliar dua ratus empat puluh enam juta tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah);
- i. **Direktorat Jenderal Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan**, sebesar Rp340.969.709.000,00 (tiga ratus empat puluh miliar sembilan ratus enam puluh sembilan juta tujuh ratus sembilan ribu rupiah);
- j. **Direktorat Jenderal Penegakan Hukum, Lingkungan Hidup dan Kehutanan**, senilai Rp344.665.770.000,00 (tiga ratus empat puluh empat miliar enam ratus enam puluh lima juta tujuh ratus tujuh puluh satu ribu rupiah);
- k. **Direktorat Jenderal Pengendalian Perubahan Iklim**, sebesar Rp286.798.156.000,00 (dua ratus delapan puluh enam miliar tujuh ratus sembilan puluh delapan juta seratus lima puluh enam ribu rupiah);
- l. **Direktorat Jenderal Pengelolaan Sampah Limbah Dan Bahan Beracun Berbahaya**, berbahaya sebesar Rp266.968.331.000,00 (dua ratus enam puluh enam miliar sembilan ratus enam puluh delapan juta tiga ratus tiga puluh satu ribu rupiah);

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Intrupsi Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Apa yang mau di intrupsi?

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Hanya sekedar mengingatkan kepada Ibu Menteri Pimpinan, terkait yang point L Direktorat PSLB3 ini pasca pandemi inikan saya rasa terlalu kecil kondisinya.

KETUA RAPAT:

Saya paham, saya belum habis ngomong.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Oke terima kasih Pimpinan.

KETUA RAPAT:

Iya Rp266.968.331.000,00 saran saya ditambahkanlah tambahkan mungkin Rp100 miliar, apa Rp200 miliar yang tadi itu. Iya bu ya tolong ditambahkan untuk inikan baru awal ya.

- m. **Direktorat Jenderal Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan**, sebesar Rp193.742.633.000,00 (seratus sembilan puluh tiga miliar tujuh ratus empat puluh dua juta enam ratus tiga puluh tiga ribu rupiah); dan
- n. **Badan Restorasi Gambut**, sebesar Rp312.995.525.000,00 (tiga ratus dua belas miliar sembilan ratus sembilan puluh lima juta lima ratus dua puluh lima belas ribu rupiah).

Selanjutnya Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Indonesia akan menelaah dan LKP tahun 2021 Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Anggota?

(RAPAT: SETUJU)

Yang kedua,

2. Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mendukung usulan penambahan pada pagu indikatif Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam RRKL dan RPKL tahun 2021 sebesar **Rp5.347.698.842.500,00** (lima triliun tiga ratus empat puluh tujuh miliar enam ratus sembilan puluh delapan juta delapan ratus empat puluh dua ribu lima ratus rupiah), untuk kegiatan:

- a. Pembangunan Persemaian Modern, sebesar Rp370.000.000.000,00 (Tiga Ratus Tujuh Puluh Miliar Rupiah).
- b. Rehabilitasi Hutan dan Lahan, sebesar Rp2.253.250.000.000,00 (dua triliun dua ratus lima puluh tiga miliar dua ratus lima puluh juta rupiah).
- c. Pemulihan Dana Prioritas, sebesar Rp36.825.000.000,00 (tiga puluh enam miliar delapan ratus dua puluh lima juta rupiah).
- d. Tuan rumah COP4 Minamata, sebesar Rp151.318.996.500,00 (seratus lima puluh satu miliar tiga ratus delapan belas juta sembilan ratus sembilan puluh enam ribu lima ratus rupiah).
- e. Pembangunan Fasilitas Pengolahan Sampah Untuk Pembuatan Bahan Bakar Berbasis Bisnis/*Refuse Derived Fuel* (RDF), sebesar Rp1.250.000.000.000,00 (satu triliun dua ratus lima puluh miliar rupiah).

Yang point e ini bu saya minta tolong dipelajari secara komprehensif, khawatirnya setelah jadi maka akan jadi besi tua atau mangkrak. Kalau jadi besi tua yang paling senang Pimpinan Bayangan.

- f. Percepatan Karhutla, sebesar Rp186.161.539.000,00 (seratus delapan puluh enam miliar seratus enam puluh satu juta lima ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah).
- g. Penanggulangan Karhutla, sebesar Rp62.700.000.000,00 (enam puluh dua miliar tujuh ratus juta rupiah).
- h. Dukungan ketahanan pangan nasional terpadu Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp800.998.618.000,00 (delapan ratus lima miliar sembilan ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus delapan belas ribu rupiah).
- i. Belanja Operasional Perkantoran, sebesar Rp151.596.732.000,00 (seratus lima puluh satu miliar lima ratus sembilan puluh enam juta tujuh ratus tiga puluh dua ribu rupiah).

Saran saya ini bu kalau bisa dihemat, iya dihemat karena kalau dilihat operasional kantor 151 miliar nampaknya agak besar.

- j. Belanja Pegawai, sebesar Rp79.847.957.000,00 (tujuh puluh sembilan miliar delapan ratus empat puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh tujuh ribu rupiah),

Sehingga Pagu Indikatif Kementerian Lingkungan Hidup Dan Kehutanan Dalam RKA-K/L Dan RKP-K/L Tahun 2021 Menjadi Sebesar **Rp12.910.216.826.500,00** (dua belas triliun sembilan ratus sepuluh miliar dua ratus enam belas juta delapan ratus dua puluh enam ribu lima ratus rupiah).

Anggota?

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Intrupsi Pimpinan.

Tolong naik lagi tadi yang masalah ketahanan, nah stop yang point h, point h, nah. Dukungan ketahanan pangan nasional terpadu ini saya berharap nanti di RDP mohon kejelasannya Pimpinan, begitu.

KETUA RAPAT:

Nanti setelah jadi, nanti waktu Raker nanti kan di *breakdown*.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Karena begini, izin Pimpinan.

Kita kan mesti *clear* ini, LH posisinya dimana? Kemtan posisi dimana? itu aja sih.

KETUA RAPAT:

Iya saya paham, jadikan inikan baru pagu indikatif.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Itulah kenapa di RDP.

KETUA RAPAT:

Masih bayang-bayang, masih katanya.

F-PDIP (RIEZKY APRILIA, S.H., M.H.):

Sama kayak Pimpinan bayangan berarti?

KETUA RAPAT:

Naikin lagi, naikin lagi terus, Anggota? Pemerintah?

(RAPAT: SETUJU)

Yang ketiga, Komisi IV DPR RI mendukung usulan penambahan Pagu anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan

sepertinya nggak ada APBNP deh? penambahan anggaran saja. Sekarang APBNP-nya g ada kan ya Bang Andi?

F-PKS (Dr. ANDI AKHMAL PASLUDIN, S.P., M.M.):

Di Perpu nanti Ketua, apa itu mungkin bisa sedikit ditekankan nanti supaya LHK dapat tambahan Rp500 karena penekanan COVID ini ada tambahan lagi, mau ditambah lagi anggarannya.

KETUA RAPAT:

Jadi saya pikir tadi tidak perlu ada dalam APBNP tahun nggak perlu ada, tadi kan sudah saya kasih tahu tidak ada APBNP penambahan saja ya.

Saya ulang lagi Nomor 3,

3. Komisi IV DPR RI mendukung usulan penambahan pagu anggaran Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan Tahun 2020 sebesar **Rp500.000.000.000,00** (lima ratus miliar rupiah) untuk kegiatan pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan pengelola limbah infeksius dalam penanganan COVID-19, serta rehabilitasi lahan gambut.

Anggota? Pemerintah?

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Terima kasih Ketua, setuju.

KETUA RAPAT:

(RAPAT: SETUJU)

Empat,

4. Komisi IV DPR RI mengapresiasi kinerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atas pencapaian target Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP), dimana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan merupakan salah satu Kementerian/Lembaga penyumbang devisa negara. selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta agar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan terus menjaga dan meningkatkan pencapaian kinerja yang dimaksud.

Anggota? Anggota? Pemerintah?

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Terima kasih Ketua.

KETUA RAPAT:

(RAPAT: SETUJU)

Lima,

5. Komisi IV DPR RI meminta kepada Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar segera menindaklanjuti hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan Semester II Tahun Anggaran 2019, terkait kelemahan sistem pengendalian internal (SPI) dan kelemahan atas kepatuhan terhadap ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.

Anggota? Pemerintah?

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Setuju Ketua, terima kasih.

KETUA RAPAT:

(RAPAT: SETUJU)

Enam,

6. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk terus meningkatkan kegiatan pengamanan hutan dalam rangka pencegahan dan pengendalian kebakaran hutan dan lahan, pencegahan *illegal logging*, pencegahan perambahan

kawasan hutan, serta pencegahan perburuan satwa liar secara ilegal dan pengendalian konflik satwa liar. Selanjutnya Komisi IV DPR RI mendorong Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dalam hal, sebagai berikut:

- a. Peningkatan anggaran dalam rangka pemenuhan kebutuhan sarana, prasana perlengkapan kerja serta peningkatan kualitas dan jumlah Sumber Daya Manusia (SDM) atas personil Polisi Kehutanan (Polhut) yang saat ini tersedia.
- b. Peningkatan peran serta seluruh pemangku kepentingan baik Pemerintah Daerah, masyarakat didalam dan diluar kawasan hutan maupun pemegang izin usaha di Bidang Kehutanan (Hutan Tanaman Industri, Hak Pengusahaan Hutan dan Pemegang Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan) dalam rangka mengoptimalkan kegiatan pengamanan kawasan hutan.

Anggota? Pemerintah?

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Siap Ketua, setuju, terima kasih.

KETUA RAPAT:

(RAPAT: SETUJU)

Tujuh,

7. Komisi IV DPR RI mendesak Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan agar terus melakukan upaya pemberantasan kegiatan perusakan hutan dan lingkungan sebagai tindak kejahatan luar biasa. Pelaku kejahatan luar biasa agar dikenakan sanksi sesuai dengan Undang-undang Nomor 41 tahun 1999 tentang Kehutanan, Undang-undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Undang-undang Nomor 18 tahun 2013 tentang pencegahan dan pemberantasan perusakan hutan, serta Undang-undang Nomor 39 tahun 2014 tentang Perkebunan sehingga diharapkan menjadi efek jera bagi pelaku. Selanjutnya Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan pengawalan terhadap seluruh proses penegakan hukum sampai akhirnya kasus tersebut.

Anggota? Pemerintah?

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Setuju Ketua, terima kasih.

KETUA RAPAT:

(RAPAT: SETUJU)

Delapan,

8. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan laporan hasil proses penegakan hukum atas tindak kejahatan perusakan hutan lingkungan selama tahun 2015 s.d. 2019, termasuk jumlah denda ganti rugi yang disetorkan kepada kas negara melalui Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Laporan yang dimaksud disampaikan kepada Komisi IV DPR RI selambat-lambatnya.

Saya minta diganti selambat-lambatnya 3 hari sebelum pelaksanaan Rapat Kerja yang akan datang.

Anggota? Pemerintah?

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Setuju Ketua, terima kasih.

KETUA RAPAT:

(RAPAT: SETUJU)

Karena aturannya bahan Rapat Kerja 3 hari sebelum rapat sudah disampaikan.

9. Komisi IV DPR RI meminta Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk melakukan langkah korektif yang nyata terhadap kebijakan masa lalu yang dalam menentukan kawasan hutan yang akan dibebani konsesi atau izin usaha serta kawasan hutan yang akan di konversi di alih statuskan menjadi kawasan non hutan (HGU/kebun)...

Apa itu maksudnya kurang pertimbangan?

F-PKS (Dr. ANDI AKHMAL PASLUDIN, S.P., M.M.):

Mungkin yang kurang disitu Pak Ketua, yang kurang mempertimbangkan aspek konservasi.

KETUA RAPAT:

Yang Kurang mempertimbangkan aspek konservasi atas habitat tumbuhan dan satwa liar yang dilindungi dan/atau koridor habitat satwa liar

dilindungi, dalam rangka mendukung pelaksanaan program konservasi keanekaragaman hayati.

Anggota?Pemerintah?setuju?

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Kami sedang memperhatikan terima kasih.

KETUA RAPAT:

Kalau sudah selesai, terima kasih atas tanggapannya.

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Sebelah kanan intrupsi sedikit.

KETUA RAPAT:

Gimana Pak Slamet?

F-PKS (drh. H. SLAMET):

Terima kasih hanya memberikan catatan saja kepada Ibu Menteri terkait dengan konferensi minamata yang saya lihat anggarannya cukup besar dalam tataran internasional itu tentunya menjadi penting tetapi ketika kemudian kita lihat anggaran dan juga kemanfaatan langsung pada rakyat ini tidak menyentuh langsung, oleh karena itu dalam proses nantinya efisiensi dan keterbukaan kepada Komisi IV sebagai mitra ini menjadi penting Pimpinan sehingga komunikasi dan transparansi harus terus dibangun dalam rangka kita pertanggungjawaban untuk pengawasan anggaran yang cukup besar itu, terima kasih Pimpinan.

F-PD (Hj. NUR'AENI, S.Sos., M.Si.):

Intrupsi ya.

KETUA RAPAT :

Saya sangat setuju sekali sama usulannya Pak Slamet dan perlu diingat ini baru pagu indikatif ya, nanti tinggal waktu Rapat Kerja, RDP dibahas secara detail, iya silakan.

F-PD (Hj. NUR'AENI, S.Sos., M.Si.):

Intrupsi Pimpinan.

Iya baik, pada prinsipnya saya setuju mendukung sekali atas usulan tambahan anggaran untuk 2020 kaitan dengan pengendalian lahan Karhutlah

ya? akan tetapi mohon mungkin untuk bahan evaluasi karena terhadap pemeriksaan hasil LHP ini ada salah satunya itu pekerjaan revegetasi, karena ini kaitan dengan hasil pemeriksaan LHP BPK ini ada kaitan dengan belanja barang, pekerjaan revegetasi dan revitalisasi gambut yang kurang tepat sasaran. Jadi mohon kiranya terhadap jenis kegiatan ini juga harus terukur dan terarah agar ada solusi terhadap Karhutla kedepannya Pak Ketua, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih atas usulannya.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-NasDem (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):

Terakhir Pimpinan.

Pak Ketua satu detik Pak Ketua.

KETUA RAPAT:

Iya sudah cukup satu detik udah ngomong.

WAKIL KETUA KOMISI IV DPR RI/F-NasDem (Drs. H. HASAN AMINUDDIN, M.Si.):

Iya belum Pak Ketua, minta izin dulu.

Iya mempertebal apa yang disampaikan oleh Ibu Ema dan Pak Slamet Madura, saya mohon yang Rp500 miliar yang akan ada penambahan minta disisihkan untuk pondok pesantren dan lembaga pendidikan yang berasrama sebagai dukungan kepada anak bangsa agar supaya COVID ini betul-betul menjaga kebersihan. Saya minta hanya komitmennya 10 % atau 5 % Pak Ketua, jadi tidak gambut Rp500 miliar itu sisihkan 5 % untuk seluruh lembaga pendidikan yang sedang mulai belajar mengajar dan berasrama. Sekian terima kasih.

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Ketua, sedikit Ketua.

Intrupsi Suhardi.

KETUA RAPAT:

Oh iya silakan pak.

F-PD (Dr. H. SUHARDI DUKA, M.M.):

Tadi saya sudah kasih Dirjen Gakkum, youtubanya juga alamatnya lengkap dengan perusahaan, tinggal Ibu Menteri saya minta tindak lanjutnya mungkin kalau rapat berikut saya akan pertanyakan, terima kasih.

KETUA RAPAT:

Terima kasih ada lagi? kalau tidak ada terima kasih atas tanggapannya. Apakah draft rancangan kesimpulan rapat dapat disetujui menjadi kesimpulan Rapat Kerja hari ini?

(RAPAT: SETUJU)

Bapak/Ibu yang saya hormati.

Sebelum kami menutup Rapat Kerja hari ini, kami persilakan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk menyampaikan kata penutup dalam Rapat Kerja hari ini, silakan.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Terima kasih.

Yang kami hormati Pimpinan Komisi IV DPR RI,
Yang kami hormati dan selalu kami banggakan, seluruh Anggota dan Pimpinan Komisi IV DPR RI.

Saya mohon izin untuk menyampaikan kata penutup ini pada beberapa hal. Pertama Kami menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang tinggi serta kami memperhatikan apresiasi dan harapan dari yang terhormat Pimpinan dan yang terhormat Ibu dan Bapak Anggota Komisi IV DPR RI kepada KLHK.

Yang kedua, Saya memperhatikan dan akan bersungguh-sungguh untuk menindaklanjuti pesan dan harapan dari yang terhormat Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR RI mengenai daya serap Anggaran 2021 untuk dipercepat penyelesaiannya, saya juga mohon izin melaporkan barusan dilaporkan oleh Pak Sekjen bahwa baru keluar pengumuman dari BPK RI bahwa untuk laporan hasil pemeriksaan keuangan LHK tahun 2019, saya udah lama nunggu-nunggu ini memperoleh opini wajar tanpa pengecualian, terima kasih. Saya deg-degan banget nungguin ini.

ANGGOTA KOMISI IV DPR RI:

Alhamdulillah.

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN:

Terima kasih, selanjutnya kami akan menyusun jawaban tertulis hari ini hari Rabu, saya dilaporkan Pak Sekjen akan ada RDP pada hari Senin dan nanti akan di sampaikan jawaban tertulis. Terakhir Pak Ketua bahwa Bapak-bapak Pimpinan Komisi IV DPR RI dan yang terhormat Ibu dan Bapak Anggota, saya masih terus kita masih terus mengikuti perkembangan di lapangan Pandemi COVID dan lain-lain dan juga kebutuhan masyarakat, oleh karena itu kami berkomitmen dan kita akan menindaklanjuti konsolidasi CSR menjelang Idul Adha untuk bagi kegiatan di Dapil Bapak Ibu Anggota Komisi IV DPR RI yang kami hormati. Jadi itu sebagai catatan penutup kami Pak Ketua, terima kasih atas dukungan, *carried*, keberanian, inspirasi bagi KLHK untuk kami bekerja keras menindaklanjuti dan semakin memperbaiki kinerja KLHK.

Terima kasih kurang lebihnya mohon maaf atas hal-hal yang telah berlangsung dan kurang berkenan, terima kasih.

Wassalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

KETUA RAPAT:

Wa'alaikum salam.

Catatan saya Ibu Menteri, tadi saya diperintahkan oleh Pimpinan Bayangan kalau ngasih CSR-nya jangan 500 paketlah, kalau bisa 1.000 Paket saya diperintahkan sama pimpinan bayangan.

Yang kedua, untuk ibu Dirjen Vivien, apabila anggaran tambahan Rp500 miliar disetujui sesuai usulan tadi Pimpinan saya Pak Hasan untuk disisihkan untuk pondok pesantren. Pengertiannya gini loh, diberikanlah tong-tong sampah tapi dengan catatan, saya inginnya logonya besar jangan logo tempel. Jadi ketahuan kalau itu ditempatkan di tempat yang tidak tempatnya ya? logonya agar besar di depan tapi jangan ditempel, itu.

Terima kasih dengan demikian berakhir sudah Rapat Kerja kita pada hari ini, atas nama Pimpinan dan Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia mohon maaf apabila selama kami memimpin rapat hari ini ada kekurangan dan kekhilafan, kami mengucapkan *alhamdulillahirabbil'alamin.*

Rapat Kerja hari ini kami tutup.

Wassalaamu'alaikum warahmatullaahi wabarakaatuh.

(RAPAT DITUTUP PUKUL 16.30 WIB)

a.n. Ketua Rapat
Sekretaris Rapat,

Ttd.

Drs. Budi Kuntaryo
NIP. 196301221991031001

